



RENCANA STRATEGIS POLITEKNIK NEGERI KUPANG TAHUN 2020-2024



Revisi 2022



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur patut dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat pertolongan dan rahmat-Nya, maka reviu Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Negeri Kupang 2020-2024 dapat diselesaikan dengan baik. Pelaksanaan reviu renstra ini adalah dalam kerangka mensinergiskan hasil reviu Renstra Kementerian dengan Renstra Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, memastikan indikator kinerja unit organisasi bersifat *outcome* dan mendukung indikator kinerja program Kementerian, penyeragaman perumusan Perjanjian Kinerja (PK) unit organisasi sekaligus sebagai bahan monitoring dan evaluasi. Sasaran pelaksanaan reviu Rencana Strategis Politeknik Negeri Kupang (PNK) 2020 – 2024 dimaksudkan supaya terjadi sinkronisasi target Perjanjian Kinerja antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terlaksana pengukuran dan pengelolaan data kinerja secara periodik serta terbangun sistem akuntabilitas kinerja di Kementerian.

Menjawab tuntutan maupun amanat perubahan atas paradigma tata kelola yang terus bergulir, menuntut semua unit organisasi atau satuan kerja kementerian untuk menyelaraskan visi; misi; tujuan; sasaran program, indikator kinerja dan target; strategi kebijakan dan program. Hal ini tentunya memerlukan kajian dan analisis yang komprehensif dari tim yang dibentuk dalam rangka penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Sasaran Kinerja Utama (SKU) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah lebih dahulu ditetapkan. Reviu Renstra yang dirumuskan ini tidak mempengaruhi agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahap III yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025. Tanggungjawab penyusunan revisi rencana strategis PNK ini lebih menekankan pada *outcome* (kebermanfaatan) sesuai sasaran strategis lembaga dan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan berpedoman pada :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025
5. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

~ i ~



8. Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2019, tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No 148/O/2004 Tahun 2009 tentang Kemandirian Politeknik Negeri Kupang.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Statuta Politeknik Negeri Kupang
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 28 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Politeknik Negeri Kupang
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2015-2019
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi RI Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Dilingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020

Peraturan diatas memberikan tuntunan kepada Politeknik Negeri Kupang untuk melakukan *update* atau penyesuaian terhadap Renstra yang telah dirumuskan sebelumnya dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kementerian seperti : *Mewujudkan Sistem Tata Kelola Manajemen dan Kualitas pendidikan Vokasi Berstandar Industri, Mewujudkan Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi, Mewujudkan Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi dan Mewujudkan Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran.* Ketiga Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut masing-masing memiliki sasaran yakni meningkatkannya relevansi, kuantitas dan kualitas pendidikan tinggi; meningkatnya kemampuan iptek dan inovasi; dan terlaksananya revormasi birokrasi. Khusus Indeks Perguruan Tinggi yang menjadi lokus utama RPJM 2015-2019 guna meraih visi yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yakni mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu serta memiliki kemampuan iptek dan inovasi dalam mendukung daya saing bangsa.

Senada dengan penyelarasan penetapan indikator kinerja institusi dengan kementerian menjadi tonggak baru penetapan Rencana Strategis Politeknik Negeri Kupang 2020-2024 dan melalui penyusunan ini diharapkan menjadi kiblat pencapaian tujuan institusi, sebagai bahan dasar dan pedoman bagi seluruh unit kerja di Politeknik Negeri Kupang dalam menyusun dokumen-dokumen perencanaan seperti Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), Penetapan Kinerja (PK), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi



Pemerintah (LAKIP).

Dengan terealisasinya Reviu Dokumen Renstra Politeknik Negeri Kupang Periode 2020-2024 pada tahun 2022 ini momentum penyegaran atas penetapan arah dan langkah kebijakan pendidikan pada RPJMN IV. Patut pula dinaikkan syukur kepada Tuhan atas segala rahmat-Nya maupun apresiasi kepada Tim Perumus yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen renstra ini. Semoga Kasih Karunia Tuhan Yang Maha Esa selalu menolong dan memberkati seluruh upaya kita, untuk mewujudkan PNK sebagai salah satu Politeknik yang *berwawasan global, inovatif dan berdaya saing dalam bidang rekayasa, tataniaga dan pariwisata*



Kupang, Juli 2022

Direktur PNK

Erans Mangngi, ST., M.Eng

Nip.196803011994031001



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Gambar.....	vii
SK Renstra Politeknik Negeri Kupang Periode 2020-2024 Reviu Tahun 2022	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Kondisi Umum Politeknik Negeri Kupang.....	6
1.3. Potensi Politeknik Negeri Kupang.....	12
1.4. Permasalahan Politeknik Negeri Kupang.....	14
1.5. Peluang/Opportunities Politeknik Negeri Kupang.....	16
1.6. Tantangan Politeknik Negeri Kupang.....	18
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN.....	20
2.1. Visi.....	20
2.2. Misi.....	21
2.3. Tujuan Strategi.....	21
2.4. Sasaran Strategi.....	23
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGIS, KERANGKA KELEMBAGAAN KEMENDIKBUD DAN PNK	27
3.1. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGIS, KERANGKA KELEMBAGAAN KEMENDIKBUD.....	27
3.1.1 Arah Kebijakan, dan Strategis Nasional.....	27
3.1.2 Arah Kebijakan, dan Strategis Kementerian	29
3.1.3 Kerangka Kelembagaan Kemdikbud	31
3.1.4 Struktur Organisasi	32
3.2. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGIS, KERANGKA KELEMBAGAAN PNK.....	35
3.2.1 Arah Kebijakan, dan Strategis PNK	35
3.2.2 Kerangka Kelembagaan PNK.....	42



BAB IV	TARGET KINEREJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	52
	4.1. Kerangka Kinerja.....	52
	4.2. Kerangka Pendanaan.....	58
BAB V	PENUTUP.....	60
	Lampiran II. Kerangka Pendanaan	61
	Lampiran III. Definisi Operasional Metode Perhitungan Pengukuran IKU dan Sumber Data.....	71
	Lampiran IV. Matrik Kerangka Regulasi.....	91



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	Daftar Program Studi Berdasarkan Jenjang dan Ijin Operasional	7
Tabel 1.2	Mahasiswa Aktif PNK Tiga Tahun Terakhir	8
Tabel 1.3	Data Penelusuran Tracer Study PNK	12
Tabel 2.1	Sasaran Strategis Politeknik Negeri Kupang pada tahun 2020-2024	24
Tabel 3.1	Peran Kemendikbud dalam Agenda Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	27
Tabel 3.2	Proyeksi Bezzetting CPNS PNK Tahun 2021-2024	45
Tabel 3.3	Roadmap SDM PNK Tahun 2020-2024	46
Tabel 4.1	Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja Politeknik Negeri Kupang Tahun 2020-2024	52
Tabel 4.2	Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Politeknik Negeri Kupang Tahun 2020-2024	58
Tabel 4.3	Target dan Ijin Penggunaan PNBPN dalam DIPA Politeknik Negeri Kupang Tahun 2021 – 2024	59



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Animo dan Daya Tampung Mahasiswa Tahun 2015-2020	7
Gambar 1.2 Komposisi Mahasiswa Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2021	8
Gambar 1.3 Komposisi Mahasiswa Berdasarkan Pilihan Jurusan 2021	9
Gambar 1.4 Profil Dosen PNK Bersertifikasi	10
Gambar 1.5 Profil Fungsional Dosen PNK	10
Gambar 1.6 Sebaran Pranata Laboratorium Pendidikan PNK	11
Gambar 3.1 Kebijakan Merdeka Belajar.....	29
Gambar 3.2 Empat Proses Utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.....	31
Gambar 3.3 Struktur Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.....	33
Gambar 3.4 Struktur Organisasi Politeknik Negeri Kupang	42
Gambar 3.5 Jumlah ASN Politeknik Negeri Kupang Tahun 2022	44
Gambar 3.6 Jumlah ASN PNK Yang Memasuki Purnabakti Tahun 2020-2025	44
Gambar 3.7 Tampilan Kampus II PNK	49
Gambar 3.8 Rancang Bangun Lahan Kampus II PNK	49
Gambar 3.9 Model Desain Interior	51



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI KUPANG**

Kampus Penfui : Jl. Adi Sucipto P.O. BOX 139
Telp. (0380) 881245 – 881246 Fax. (0380) 881245

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KUPANG
NOMOR : 324a TAHUN 2022**

Tentang

**RENCANA STRATEGIS POLITEKNIK NEGERI KUPANG PERIODE 2020 – 2024
REVIU TAHUN 2022**

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KUPANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maupun pengimplementasian Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 pada setiap satuan kerja dilingkungan kementerian perlu mereviu kembali Dokumen Rencana Strategis pada tahun berjalan sesuai perodesasi RPJMN yang berlaku;
- b. bahwa perlu menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 dengan merujuk pada Indikator Kinerja Utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. bahwa, berdasarkan butir a, dan b, di atas maka perlu dilakukan reviu atas dokumen Rencana Strategis Politeknik Negeri Kupang Periode 2020 – 2024 pada tahun 2022 dengan menyelaraskan target dan Indikator Kinerja Utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seturut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3/M/2021 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Kupang;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
4. Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara;

5. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan kebudayaan;
13. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 28 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Politeknik Negeri Kupang;
14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 133 Tahun 2021 tanggal 5 Oktober 2021 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Kupang Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Dokumen Rencana Strategis Politeknik Negeri Kupang Periode 2020-2024 yang telah direvisi.
- Pertama : Rencana Strategis Politeknik Negeri Kupang Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Politeknik Negeri Kupang adalah dokumen perencanaan Politeknik Negeri Kupang dilingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yang merupakan penjabaran dokumen perencanaan pembangunan nasional sekaligus menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- Kedua : Rencana Strategis Politeknik Negeri Kupang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku di lingkungan Politeknik Negeri Kupang dalam melakukan :
1. Penyusunan Renstra Unit/Bagian/Jurusan;
 2. Penyusunan Renja Politeknik Negeri Kupang;
 3. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran;

4. Pengendalian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran, dan/atau;
5. Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Ketiga : Rencana Strategis Politeknik Negeri Kupang sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama disusun untuk pencapaian Sasaran Strategis Kemendikbudristek pada periode 2020-2024.

Rencana Strategis Politeknik Negeri Kupang sebagaimana dimaksud Point (1) diktum Ketiga meliputi :

1. Pendahuluan;
2. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
3. Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, Definisi Operasional Metode Perhitungan Pengukuran IKU dan Sumber Data serta Kerangka Kelembagaan;
4. Penutup

Rencana Strategis Politeknik Negeri Kupang sebagaimana Point (1) dan (2) diktum Ketiga tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.

Keempat : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 8 Juli 2022



Direktur,

Frans Mangnqi, ST., M.Eng
NIP. 196803011994031001



Lampiran I

Keputusan Direktur Politeknik Negeri Kupang

Nomor : 324a Tahun 2022

**Tentang : Rencana Strategis Politeknik Negeri
Kupang Periode 2020-2024
Reviu Tahun 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) merupakan komponen penting dalam manajemen sebuah organisasi Kementerian/Lembaga karena menjadi panduan dan pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan *stakeholder*. Rencana tersebut disusun dan dilaksanakan oleh para pimpinan yang membidangi bagian / sub bagian / jurusan / unit / UPT untuk mencapai tujuan organisasi yang lebih luas. Untuk itu dalam penerapannya di dalam sebuah organisasi, pejabat tertinggi perlu membuat suatu perencanaan strategis yang mana dikoordinasi dengan para pegawai untuk dijalankan bersama demi mencapai tujuan yang diinginkan dari sebuah organisasi. Esensinya yang dipandang penting tersebut, sehingga harus dirancang sendiri oleh masing-masing organisasi dengan memperhitungkan kondisi nyata dan sumber daya yang dimiliki, untuk menjadi landasan dan pedoman kerja bagi setiap pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Sebagai dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai yang di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan organisasi. Setiap satuan kerja diwajibkan menyusun Renstra sesuai kurun waktu kerja 1-5 tahun (jangka menengah) dengan tetap merujuk pada renstra kementerian yang telah ada dengan harapan penjabaran sasaran strategis satker telah bersinergi dengan sasaran program kementerian dalam mencapai visi dan misi bersama. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk melakukan proyeksi kondisi organisasi pada masa depan.

Kebijakan penyusunan rencana strategis berlaku untuk semua unit kerja Kementerian/Lembaga, maka satker pendidikan pun dituntut hal yang sama. Penyelenggaraan pendidikan tinggi merupakan sebuah panggilan dan amanah untuk menyiapkan generasi muda agar memiliki akhlak mulia, kompetensi akademik dan intelektual yang unggul serta membantu mereka tumbuh menjadi pemimpin andal dimasa depan. Dengan posisi strategis ini, perguruan tinggi diharapkan senantiasa



mengembangkan diri, menjaga relevansinya bagi kebutuhan pembangunan nasional, dan meningkatkan kontribusinya bagi kehidupan sosial secara umum. Dengan demikian, perguruan tinggi dituntut agar terus berinovasi dan mengembangkan berbagai kebijakan strategi, program maupun kegiatan guna pencapaian maksud tersebut yang pada gilirannya diharapkan dapat mewujudkan cita-cita dan amanat nasional, yakni mewujudkan insan Indonesia yang cerdas, adil, makmur, dan sejahtera. Hal ini jugalah yang mendasari pembentukan Politeknik Negeri Kupang (PNK).

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan pembukaan UUD itu, batang tubuh konstitusi tersebut di antaranya Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32, juga mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Sistem pendidikan nasional tersebut harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Untuk itu, perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dan pendidikan tinggi merupakan faktor yang penting dalam pembangunan di Indonesia. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar (UUD) yang menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan pemerintah.

Dasar hukum pembangunan Iptek nasional dan pendidikan tinggi tersebut adalah UUD Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen ke-4 Pasal 28 C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5). Dalam UUD Pasal 28 C ayat (1) disebutkan bahwa "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari Iptek, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia". Selanjutnya dalam UUD Pasal 31 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Sementara itu, Pasal 31 ayat (3) menyebutkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Di samping itu, Pasal 31 ayat (4) menjelaskan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan nasional. Tambahan pula, Pasal 31 ayat (5) menyatakan bahwa Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-



nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia serta tidak terlepas pula dari agenda pengarusutamaan kebudayaan.

Kemendikbud mengemban amanat untuk mengendalikan pembangunan SDM melalui ikhtiar bersama semua anak bangsa dalam meningkatkan mutu pendidikan dan memajukan kebudayaan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten/kota berwenang dalam pengelolaan pendidikan anak usia dini, dasar dan kesetaraan; pemerintah provinsi berwenang dalam pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus; dan Kemendikbud berwenang dalam pengelolaan pendidikan tinggi. Memasuki periode RPJMN selanjutnya 2020 - 2024, dengan bergabung kembalinya sektor pendidikan tinggi, Kemendikbud memiliki kewenangan mengawal dan memperhitungkan tren global terkait kemajuan pesat teknologi, pergeseran sosio-kultural, perubahan lingkungan hidup, dan perbedaan dunia kerja masa depan dalam bidang pendidikan pada setiap tingkatan dan bidang kebudayaan. Upaya Kemendikbud tersebut ditandai dengan beberapa langkah konkrit antara lain : **Pertama**, kemajuan teknologi yang mendorong Revolusi Industri 4.0 bersama dengan terobosan-terobosan yang menyertainya mempengaruhi segala sektor kehidupan. Di seluruh dunia dan di segala industri, diterapkan otomatisasi, kecerdasan buatan, *big data*, *3D printing* dan lain sebagainya. Keterhubungan antar manusia juga semakin meningkat, difasilitasi oleh teknologi, seperti konektivitas 5G yang memungkinkan munculnya kendaraan otonom (*autonomous vehicle*), dan *delivery drone*; **Kedua**, secara sosio-kultural, terjadi pergeseran demografi dan profil sosio-ekonomi populasi dunia. Semakin banyak orang yang harapan hidupnya lebih panjang dan oleh karenanya dapat bekerja semakin lama. Negara-negara berkembang akan mengalami peningkatan migrasi, urbanisasi, keragaman budaya, dan jumlah kelas menengah. Tenaga kerja akan memiliki fleksibilitas dan mobilitas yang semakin tinggi, sehingga mengaburkan batasan antara pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Konsumen akan semakin peduli akan persoalan etika, privasi, dan kesehatan; **Ketiga**, pada bidang lingkungan hidup, kebutuhan akan energi dan air akan terus naik, sedangkan sumber daya alam akan menipis dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan. Penggunaan energi alternatif atau energi bersih akan meningkat untuk melawan dampak dari perubahan iklim dan polusi. Upaya yang dikerahkan untuk mempertahankan keberlanjutan lingkungan hidup dan mengatasi berbagai permasalahan lingkungan juga akan semakin besar; **Keempat**, dunia kerja masa depan akan sangat berbeda dari keadaan sekarang. Ketiga perubahan besar yang telah disebutkan sebelumnya membentuk dunia kerja yang berbeda dalam hal struktur, teknologi, dan konsep aktualisasi diri. Struktur pekerjaan akan semakin bersifat fleksibel, tak mengenal batas geografis dan tak terikat akan mengakibatkan pekerja tidak akan terikat pada satu institusi saja sepanjang kariernya. Pekerja lepas dan sementara (*freelance* dan *temporary*) akan bertumbuh pesat. Pekerja



dari berbagai usia dapat bekerja bersama karena harapan hidup makin panjang, sehingga menuntut penghargaan atas keragaman latar belakang.

Teknologi mempermudah pekerjaan sehari-hari, namun juga menuntut penguasaan keterampilan dan pengetahuan baru. Tenaga kerja masa depan juga lebih mampu mengendalikan arah kariernya dan mencari kepuasan pribadi dalam pekerjaannya. Agar dapat berhasil di lingkungan kerja masa depan, Kemendikbud telah menetapkan 6 (enam) profil Pelajar Pancasila yang harus ditumbuhkembangkan di antara peserta didik saat ini: (1) berkebinekaan global, (2) bergotong royong, (3) kreatif, (4) bernalar kritis, (5) mandiri, dan (6) beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia. Dengan mempertimbangkan empat pilar antisipasi terobosan di atas, Kemendikbud melalui kebijakan Merdeka Belajar berupaya merangkul semua pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan antara lain keluarga, pendidik dan tenaga kependidikan, lembaga pendidikan, industri dan pemberi kerja, serta masyarakat untuk menghela semua potensi bangsa menyukseskan pemajuan pendidikan dan kebudayaan yang bermutu tinggi bagi semua rakyat sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Rencana strategis (Renstra) Kemendikbud Tahun 2020-2024 berfokus pada kebijakan Merdeka Belajar sebagai pedoman bagi pembangunan SDM dalam menata dan memaksimalkan bonus demografi yang menjadi kunci tercapainya bangsa maju yang berkeadilan sosial, seperti yang dicita-citakan oleh para Pendiri Bangsa.

Renstra Kemendikbud yang telah bersinergi dengan RPJMN Tahun 2020 - 2024 dan Perubahan Renstra Kemendikbud berdasarkan Permendikbudristek No 13 tahun 2022 menjadi pedoman bagi semua tingkatan pengelola pendidikan tinggi di pusat dan daerah dalam merencanakan, mengawal dan melaksanakan dengan terus menerus dilakukan evaluasi atas program dan kegiatan pembangunan pendidikan tinggi yang ditetapkan dalam Renstra Satuan Kerja. Renstra Kemendikbud periode 2020 - 2024 mempunyai Visi : ***“Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global”***. Senada dengan visi Kemendikbud tersebut, Politeknik Negeri Kupang yang merupakan satuan kerja yang terintegrasi sebagai bagian dari Kemendikbud telah membuat Renstra Politeknik Negeri Kupang Tahun 2020 - 2024 dengan visi : ***“Terwujudnya pendidikan tinggi vokasional berwawasan global, inovatif dan berdaya saing dalam bidang rekayasa, tataniaga dan pariwisata”***. Berdasarkan visi diatas maka Politeknik Negeri Kupang akan berupaya menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi yang ***unggul*** yaitu berorientasi untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang unggul sesuai bidangnya; ***adaptif*** yaitu mudah menyesuaikan diri dengan keadaan dan perkembangan teknologi; ***inovatif*** yaitu terus menerus mengembangkan



dan mengimplementasi cara dan metode baru dalam mengembangkan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Strategis kebijakan Politeknik Negeri Kupang dalam mengemban amanat pendidikan keahlian terapan (vokasional) merujuk pada isu-isu utama Kemendikbud khususnya Pendidikan Vokasi yakni **meningkatkan kualitas lulusan, meningkatnya kualitas dosen, meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran serta meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi** yang terjabarkan dalam 10 (sepuluh) pilar Indikator Kinerja Utama Kementerian antara lain : **1)** Meningkatkan Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi, melalui persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi dan/atau menjadi wiraswasta; **2)** Persentase Lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (duapuluh) SKS diluar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional; **3)** Meningkatkan Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi melalui persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (*QS100 by subject*), bekerja sebagai praktisi di dunia industry, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir; **4)** Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industry dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industry atau dunia kerjai; **5)** Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen; **6)** Meningkatkan Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran melalui Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerjasama dengan mitra; **7)** Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah; **8)** Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team based project*) sebagian bobot evaluasi; **9)** Meningkatkan tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi melalui rata-rata predikat SAKIP satker **10)** Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker

Seturut Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Kupang berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 28 Tahun 2020, di usia yang ke-35 tahun Politeknik Negeri Kupang tetap mengemban amanat Undang-Undang No. 12 tahun 2012 yang menjalankan pendidikan vokasi. Kurun waktu yang telah dilewati maupun dan yang akan dihadapi tidak terlepas dari dinamika dan problematika yang membutuhkan penanganan maksimal dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Dalam kerangka mengantisipasi dinamika dan problematika yang berkembang, telah ditetapkan sasaran strategis lembaga yang ditunjang dengan sejumlah indikator eksternal (yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja) maupun indikator internal (yang ditetapkan dalam Rencana Strategis) sebagai berikut : **Pertama**, Meningkatkan Kualitas Lulusan



Pendidikan Tinggi, melalui persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi dan/atau menjadi wiraswasta dan persentase Lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (duapuluh) SKS diluar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional; **Kedua**, Meningkatnya Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi melalui persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (*QS100 by subject*), bekerja sebagai praktisi di dunia industry, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir, Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industry dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industry atau dunia kerja, serta Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen; **Ketiga**, Meningkatnya Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran melalui Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerjasama dengan mitra, Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah, serta Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team based project*) sebagian bobot evaluasi; **Keempat**, Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi melalui rata-rata predikat SAKIP satker, serta rata-rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker melalui Predikat SAKIP Satker minimal BB dan Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-KL Satker minimal 93.

Sistematika pencapaian kegiatan yang tergambar pada Bab I Renstra Politeknik Negeri Kupang adalah sebagai berikut :

- a. Kondisi umum yang menjelaskan pencapaian dalam periode 2015-2019;
- b. Permasalahan yang masih dihadapi; dan
- c. Tantangan yang harus diatasi untuk menyukseskan Renstra Politeknik Negeri Kupang 2020 – 2024.

1.2. Kondisi Umum Politeknik Negeri Kupang

A. Akreditasi Institusi

Perjalanan panjang yang dilalui Politeknik Negeri Kupang untuk mendapatkan pengakuan resmi atas status akreditasi institusi pada akhirnya membuahkan hasil sesuai yang ditargetkan dalam perjanjian kinerja lembaga. Upaya yang dilaksanakan tersebut selain karena ketentuan regulasi, juga dipengaruhi oleh sejumlah program studi yang belum reakreditasi maupun pengajuan borang sesuai ketentuan dalam SAPTO Akreditasi. Pada semester satu tahun anggaran berkajan di 2020, setelah melalui *assesment* lapangan secara daring oleh Tim BAN PT, terjawab sudah penantian tersebut dengan predikat **BAIK**.

B. Program Studi dan Status Akreditasi

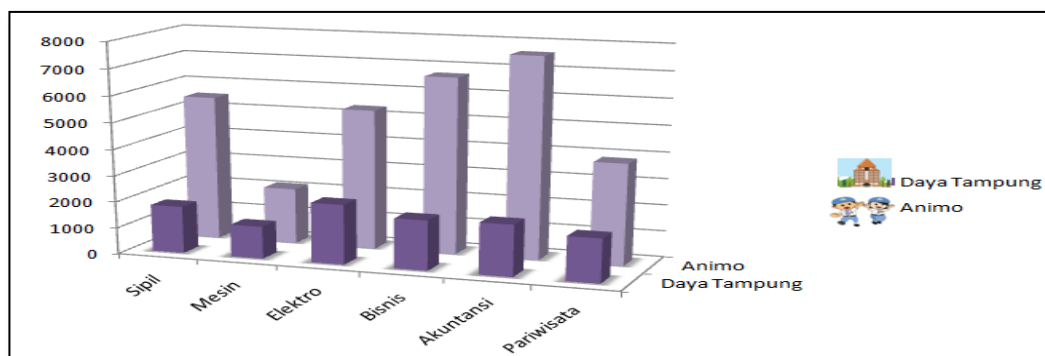
Politeknik Negeri Kupang hingga awal tahun 2019 masih memiliki 18 program studi yang terkonsentrasi dalam kelompok rekayasa maupun *commerce*. Namun animo mahasiswa pada Prodi Perkakas dan Prodi Teknik Perawatan Perbaikan yang menunjukkan tren penurunan yang signifikan sehingga diusulkan penutupan prodi dan telah ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 242/KPT/I/2019 tertanggal 25 Maret 2019. Komposisi jumlah prodi yang masih eksis berjumlah 16 prodi yang datanya tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 1.1 Daftar Program Studi Berdasarkan Jenjang dan Ijin Operasional

No 1	Program Studi 2	Jenjang 3	Ijin Operasional 4
1	Teknik Sipil	D3	Kepmendiknas No. 4753/D/T/K-N/2010
2	Teknik Perenc. Jalan dan Jembatan	D4	Kepmendiknas No. 12912/D/T/K-N/2012
3	Teknik Perenc. Irigasi dan Penganganan Pantai	D4	Kepmendiknas No. 12911/D/T/K-N/2012
4	Teknik Mesin	D3	Kepmendiknas No. 4752/D/T/K-N/2010
5	Mesin Otomotif	D3	Kepmendikbud No. 154/E/O/2013
6	Teknik Mesin Produksi dan Perawatan	D4	Kepmendikbud No. 327/E/O/2014
7	Teknik Elektronika	D3	Kepmendikbud No. 430/E/O/2013
8	Teknik Komputer dan Jaringan	D3	Kepmenistekdikti No. 62/KPT/I/2016
9	Teknik Listrik	D3	Kepmendiknas No. 4740/D/T/K-N/2010
10	Teknik Instalasi Listrik	D4	Kepmenistekdikti No. 62/KPT/I/2016
11	Administrasi Bisnis	D3	Kepmendiknas No. 1775/D/T/K-N/2009
12	Manajemen Perusahaan	D4	Kepmendiknas No. 4755/D/T/K-N/2010
13	Akuntansi	D3	Kepmendiknas No. 1775/D/T/K-N/2009
14	Akuntansi Sektor Publik	D4	Kepmendiknas No. 4754/D/T/K-N/2010
15	Perhotelan	D4	Kepmendikbud No. 429/E/O/2013
16	Usaha Perjalanan Wisata	D4	Kepmendikbud No. 32/E/O/2014

C. Animo Pendaftar

Animo pendaftar merupakan gambaran jumlah peminat/orang yang ikut mendaftar pada jurusan/prodi tertentu. Total animo mahasiswa sangat dipengaruhi oleh pilihan jurusan serta quota yang tersedia dan ratio ketetapan. Sebagai salah satu kampus vokasi di Kupang, Politeknik Negeri Kupang setiap tahunnya selalu kebanjiran pendaftar melampaui ekspektasi, selain karena ditentukan oleh letaknya yang strategis, kualitas lulusan yang memiliki kompetensi sesuai *demand* dunia kerja, status negeri ini juga jadi magnet yang kuat karena biasanya kampus negeri ini memiliki sarana prasarana pendukung pembelajaran yang memadai, kualitas yang bagus dan biaya yang lebih terjangkau. Cerminan animo pendaftar mahasiswa Politeknik Negeri Kupang berdasarkan jurusan dari akumulasi tahun 2015 sampai 2021.

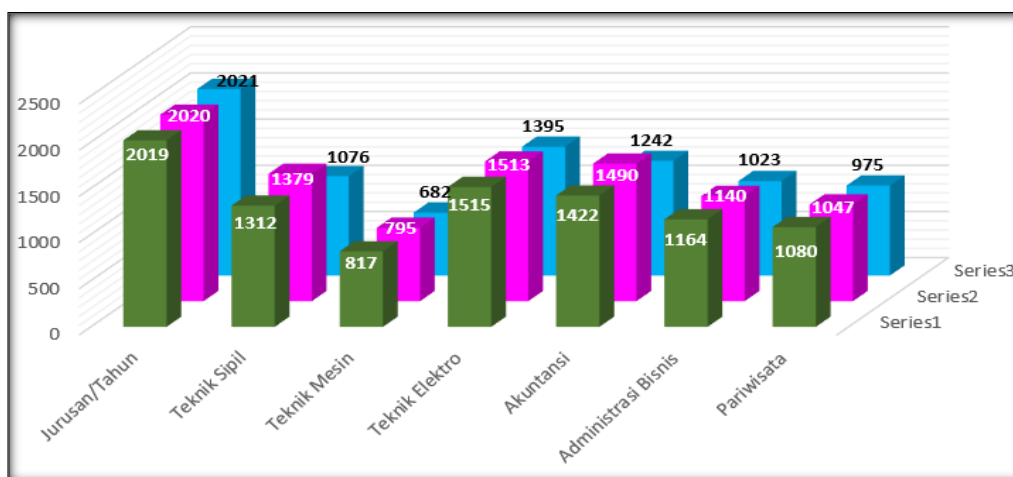


Gambar 1.1 Animo dan daya tampung mahasiswa tahun 2015-2020

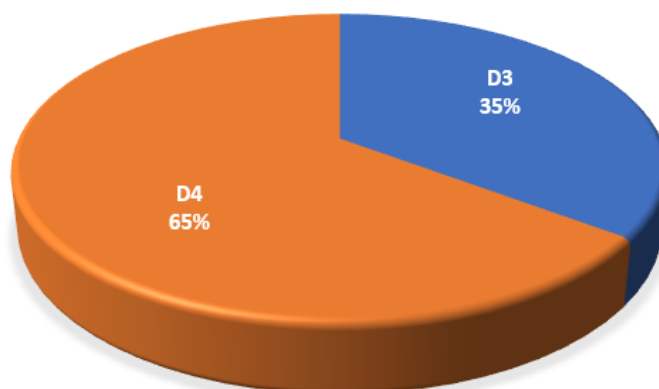
D. Mahasiswa Aktif

Kategori mahasiswa aktif merupakan mahasiswa yang terdaftar pada semester tertentu dan mengikuti seluruh kegiatan akademik serta mendapatkan layanan administratif dan akademik. Mahasiswa aktif dalam lembaga pendidikan menjadi pilihan investasi jangka panjang bagi setiap orang, khususnya bagi *Quipperian* yang menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi. Data mahasiswa aktif dapat menjadi rekam jejak/bukti bagi seorang PNS, pelamar di perusahaan BUMN, swasta, atau ingin membuka usaha mandiri. Dibawah ini disajikan profil mahasiswa aktif Politeknik Negeri Kupang periode 2019-2021 yang dijabarkan berdasarkan jurusan sebagai berikut :

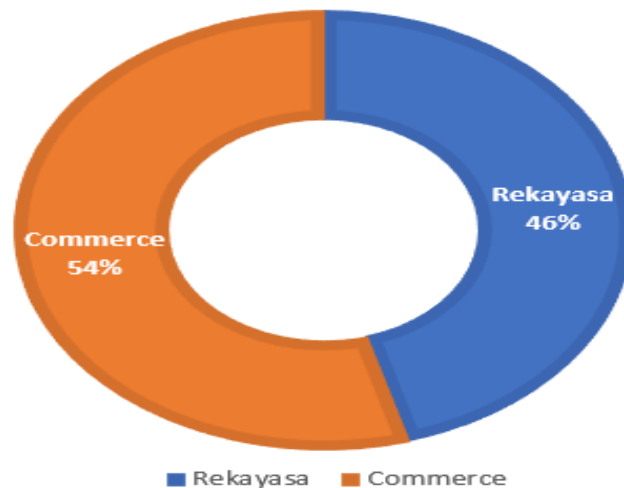
Tabel 1.2 Mahasiswa Aktif PNK Tiga Tahun Terakhir



Berdasarkan Tabel 1.2 diatas, komposisi total mahasiswa aktif didominasi Jurusan Teknik Elektro, Akuntansi, Teknik Sipil, Administrasi Bisnis, Pariswisata dan Teknik Mesin. Berikut ini disajikan komposisi mahasiswa Politeknik Negeri Kupang berdasarkan strata/jenjang terhadap total mahasiswa aktif Tahun 2021_1. Mahasiswa jenjang D4 berjumlah 4.140 mahasiswa dengan persentase 65% sementara mahasiswa D3 berjumlah 2.253 mahasiswa dengan persentase 35%.



Gambar 1.2 Komposisi Mahasiswa Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2021



Gambar 1.3 Komposisi Mahasiswa Berdasarkan Pilihan Jurusan 2021

Gambar 1.3 menyajikan informasi komposisi mahasiswa Politeknik Negeri Kupang berdasarkan pilihan jurusan rekayasa dan commerce. Tahun 2021 berdasarkan Data PDDikti diperoleh total mahasiswa Rekayasa sebanyak 2.913 mahasiswa dengan persentase 46% sementara mahasiswa Commerce sebanyak 3.480 mahasiswa dengan persentase 54%. Dominasi mahasiswa rekayasa ditunjukkan oleh mahasiswa pada jurusan Teknik Elektro diikuti mahasiswa Teknik Sipil dan terakhir mahasiswa Teknik Mesin. Sementara dominasi mahasiswa commerce ditunjukkan oleh mahasiswa pada jurusan Akuntansi disusul mahasiswa Adm. Bisnis dan Pariwisata.

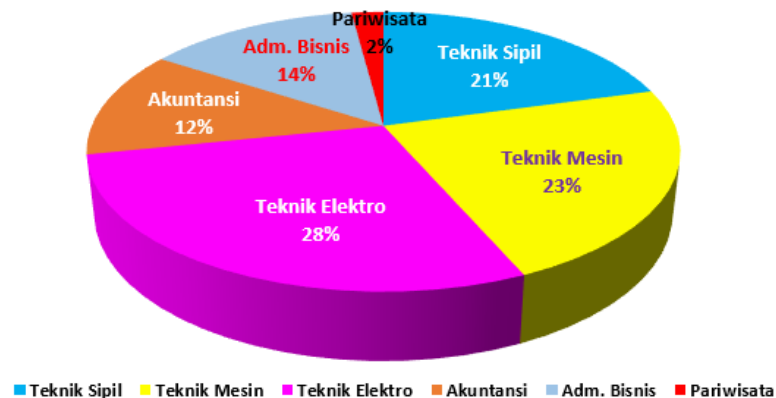
E. Pemerataan Mutu Pendidikan

Usaha mengembangkan kualitas sumber daya manusia menjadi pilihan yang tidak dapat ditawar dalam menghadapi era persaingan global. Tanpa sumber daya manusia yang berkualitas, suatu bangsa pasti akan tertinggal dari bangsa lain dalam percaturan dan persaingan kehidupan dunia internasional yang semakin kompetitif. Pengembangan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas menjadi tanggung jawab semua pemangku kepentingan pada semua strata, terutama dalam mempersiapkan peserta didik untuk menjadi subjek yang memiliki peran penting dalam menampilkan dirinya sebagai manusia yang tangguh, kreatif, mandiri, dan profesional pada bidangnya. Berkenaan dengan upaya pengembangan sumber daya manusia Indonesia, Politeknik Negeri Kupang sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam layanan pendidikan tinggi vokasi telah mengembangkan amanat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam mewujudkan pendidikan yang mampu membangun insan Indonesia cerdas dan kompetitif dengan adil, bermutu, dan relevan untuk kebutuhan masyarakat global.

Pencapaian mutu pendidikan tersebut selain ditentukan oleh penerapan kurikulum, aktualisasi implementasi kemitraan kampus dengan DUDI melalui program “Pernikahan Massal”, juga ditentukan oleh komitmen lembaga terhadap layanan

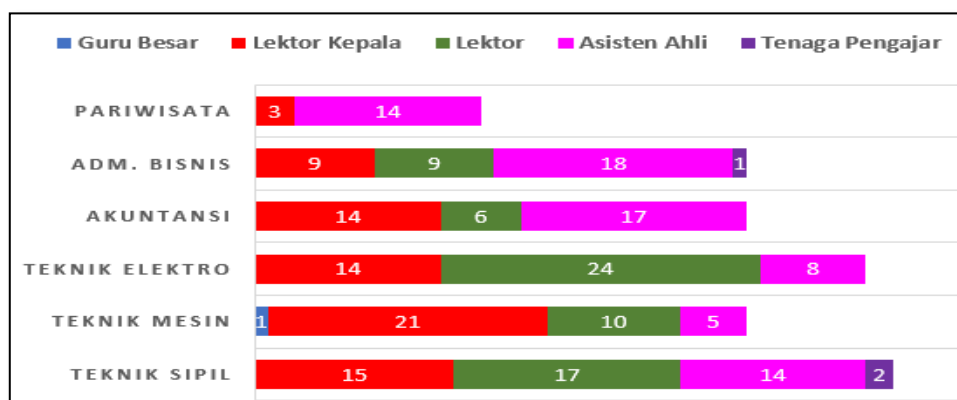


pendidikan dan pembelajaran yang diusung, sarana prasarana penunjang pembelajaran, layanan operasional lainnya, serta ketersediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pengelola manajemen kampus. Tercatat tenaga pendidik Politeknik Negeri Kupang hingga tahun 2022 berjumlah 222 orang, yang telah memiliki sertifikasi dosen mencapai 145 orang dan menyisakan 77 orang terus berproses untuk mendapatkan sertifikat profesi.



Gambar 1.4 Profil Dosen PNK Bersertifikasi

Terhadap total dosen yang telah bersertifikasi diatas, rincian dosen bersertifikasi dosen berdasarkan jurusan dapat diurai sebagai berikut : Teknik Elektro 40 orang, Teknik Mesin 33 orang, Teknik Sipil 30 orang, Akuntansi 20 orang, Adm. Bisnis 18 orang dan terakhir Pariwisata 3 orang. Secara akumulatif total dosen ASN PNK berjumlah 222 orang dengan jenjang pendidikan sebagai berikut : 11 orang (S3), dan 211 orang (S2) termasuk didalamnya 1 orang Guru Besar. Berdasarkan rasio gender total dosen laki-laki berjumlah 150 orang dan dosen perempuan 72 orang. Komposisi jabatan fungsional dosen seperti Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor, Asisten Ahli dan Tenaga Pengajar di lingkungan Politeknik Negeri Kupang disajikan dalam Gambar 1.5 dibawah ini.

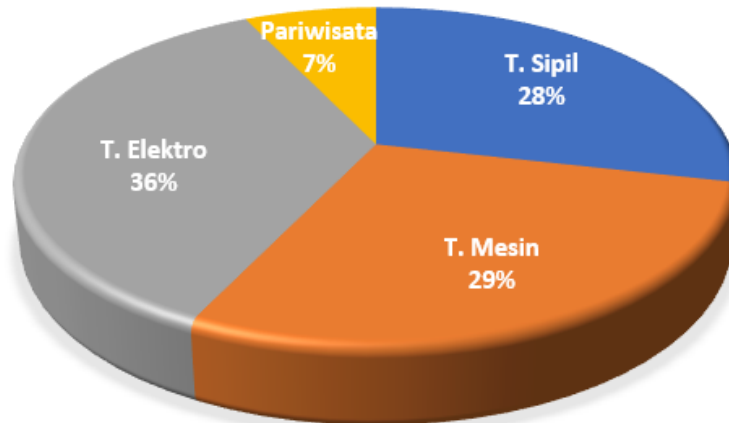


Gambar 1.5 Profil Fungsional Dosen PNK

Berdasarkan gambar diatas, sebaran jabatan fungsional terhadap 222 orang dosen dari tiap jurusan dapat dijelaskan sebagai berikut : Guru Besar berjumlah 1 orang, Lektor Kepala berjumlah 76 orang, Lektor berjumlah 66 orang dan Asisten Ahli berjumlah



76 orang sementara terdapat 3 dosen lainnya yang masih berstatus tenaga pengajar. Dalam menunjang aktivitas pembelajaran praktikum mahasiswa dilaboratorium / bengkel tenaga pengajar (dosen) dibantu oleh sejumlah tenaga Pranata Laboratorium Pendidikan. Data PLP di Politeknik Negeri Kupang tersebar pada Jurusan Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Elektro dan Pariwisata yang dijelaskan berdasarkan Gambar 1.6 berikut ini.



Gambar 1.6 Sebaran Pranata Laboratorium Pendidikan PNK

Saat ini dari terdapat total 28 PLP yang tersebar pada Jurusan Teknik Sipil 8 orang (29%), Teknik Mesin 8 orang (29%), Teknik Elektro 10 orang (36%) dan Pariwisata 2 orang (7%). Kedepan komposisi jumlah ini akan semakin berkurang dikarenakan memasuki masa purnabakti sehingga membutuhkan tenaga P3K sebagaimana regulasi yang berlaku.

F. Relevansi Pendidikan

Terkait dengan relevansi pendidikan, Politeknik Negeri Kupang melalui LSP P1-nya telah memiliki Tempat Uji Kompetensi dengan sejumlah skema uji yang dijelaskan dalam tabel berikut dengan dukungan 29 Asesor. Adapun TUK yang tersedia meliputi : Laboratorium Konstruksi Jurusan Teknik Sipil, Komputer dan Teknologi Mekanik dengan sejumlah skema internal yang dimiliki antara lain Sertifikasi Klaster Pengoperasian Mesin Bubut, Juru Las SMAW 2, Teknisi Muda Jaringan Komputer, dan Junior Network Administrator. Sementara Skema Uji mitra dengan instansi lainnya meliputi : Pengawas Pekerjaan Bangunan Gedung, Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung, Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jaringan Irigasi, Pengawas Bangunan Gedung, Pengawas Bendungan, Pengawas Lapangan Pekerjaan Jembatan, Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan, dan Pelaksana Pekerjaan Jalan.

Out comes proses bisnis pendidikan terkait alumni yang terserap di dunia kerja dan industri belum terdata secara maksimal dan perlu segera dilakukan perbaikan dari sisi administrasi maupun sistem aplikasi pendukung yang mumpuni. Sajian data trucer



study dalam tabel berikut menggambarkan kondisi capaian pengukuran serapan alumni yang terdata pada bidang Akademik, Kerjasama dan Alumni.

Tabel 1.3 Data Penelusuran Tracer Study PNK

No	Program Studi	Tracer Study		
		≤ 6 Bulan	> 6 dan ≤ 12 Bulan	> 12 Bulan
1	2	3	4	5
1	Teknik Sipil	0	0	0
2	Teknik Perenc. Jalan dan Jembatan	12	0	0
3	Teknik Perenc. Irigasi dan Penganganan Pantai	18	0	0
4	Teknik Mesin	0	0	0
5	Mesin Otomotif	4	0	0
6	Teknik Mesin Produksi dan Perawatan	0	0	0
7	Teknik Elektronika	0	0	0
8	Teknik Komputer dan Jaringan	18	0	0
9	Teknik Listrik	7	0	0
10	Teknik Instalasi Listrik	0	0	0
11	Administrasi Bisnis	5	0	0
12	Manajemen Perusahaan	18	0	0
13	Akuntansi	33	0	0
14	Akuntansi Sektor Publik	11	0	0
15	Perhotelan	7	0	0
16	Usaha Perjalanan Wisata	9	0	0

1.3. Potensi Politeknik Negeri Kupang

A. Angka Partisipasi Pendidikan

Rasio sebaran mahasiswa Politeknik Negeri Kupang setiap tahunnya khusus mahasiswa baru maupun secara kolektif terhadap keseluruhan mahasiswa aktif menunjukkan pemerataan akses kesempatan melanjutkan pendidikan dari 21 Kabupaten/Kota maupun antar ibukota provinsi.

B. Program Studi

Bertambahnya jumlah kualifikasi doktor pada sejumlah program studi rekayasa maupun *commers* serta kemajuan teknologi dan informasi serta tuntutan perubahan dikalangan masyarakat memberikan peluang untuk pengembangan dan pembukaan program studi baru baik S1 maupun S2 vokasi yang keberadaannya dinantikan semua pemerhati pendidikan di NTT.

C. Animo Mendaftar

Sebagai salah satu PTN Vokasi yang terletak NTT, besarnya animo mendaftar kuliah di Politeknik Negeri Kupang setiap tahun menunjukkan jumlah peminat yang signifikan sehingga telah memposisikan PNK sebagai kampus favorit. Selain itu dukungan kesejahteraan mahasiswa baik beasiswa PPA, Bidikmisi, CSR BUMN, disediakan kepada mahasiswa berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Demikian pula halnya dengan perhatian lembaga mengirim/mengutus mahasiswa dalam setiap kompetensi penalaran mahasiswa serta minat bakat.



D. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Politeknik Negeri Kupang telah memiliki *blue print* sistem *smart campus* berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Berdasarkan *blue print* Pengembangan TIK tersebut maka PNK sedang mengembangkan sistem *smart campus* yang terdiri dari pengembangan infrastruktur ICT berupa infrastruktur pusat data (*data center*), infrastruktur jaringan *Backbone Fiber Optic* dan infrastruktur jaringan data. Penerapan sistem e-layanan juga sedang dikembangkan untuk membantu layanan manajemen akademik dan layanan manajemen kelembagaan PNK.

E. Pengembangan SDM

Sumber daya manusia memegang peranan penting bagi keberlanjutan dan kemajuan suatu lembaga. Bentuk pengembangan SDM berupa kesempatan melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (program magister dan doktor) baik didalam negeri maupun di luar negeri untuk pengembangan kompetensi, skill, profesionalitas dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan dikalangan tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Pendanaan bagi pengembangan SDM yang bersumber dari kemendikbudristek berupa beasiswa dalam maupun luar negeri. Sumber dana juga bisa didapatkan dari beasiswa LPDP.

F. Penelitian dan Pengabdian

Realisasi penelitian dan pengabdian setiap tahunnya melampaui ekspektasi yang ditargetkan lembaga. Hal tersebut ditunjang pula oleh kinerja penelitian yang luar biasa dengan jumlah publikasi internasional yang meningkat, pemeringkatan jurnal bereputasi nasional, maupun citasi karya ilmiah.

G. Kerjasama Berbasis Pendidikan

Orientasi dan pengembangan pendidikan tinggi vokasi di Indonesia kini keberadaannya menjadi semakin mumpuni, kuat serta menghasilkan talenta-talenta yang berdaya saing dan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi daya dorong kemajuan bangsa. Bergulirnya kebijakan “pernikahan massa” yang diprakarsai Kementerian Pendidikan Nasional, mendorong sinergitas dan kemitraan yang saling menguntungkan antara lembaga pendidikan dan dunia industry agar tercapai *link and match*. Bentuk lokus kerjasamanya intens pada pengembangan kurikulum, model pembelajaran, maupun praktek kerja industri.

H. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)

Terbentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang menjembatani pemenuhan kebutuhan sertifikasi kompetensi dan profesi bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan pendidikannya serta menjadi bekal dalam berkiprah di dunia kerja.



I. Sarana Prasarana Penunjang Perkantoran dan Pembelajaran

Ketersediaan fasilitas ruang kuliah yang memadai serta ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran dan pembelajaran di kampus 2, menjadi icon tersendiri bagi Politeknik Negeri Kupang dalam menjalankan amanah pendidikan vokasi di NTT. Penyediaan venue olahraga berstandar nasional/internasional dan penyediaan infrastruktur ICT berupa infrastruktur pusat data (*data center*) serta perangkat penunjangnya membuat PNK siap untuk melayani seluruh civitas akademika dan stakeholder lainnya yang membutuhkan jasa layanan pendidikan di Politeknik Negeri Kupang.

1.4. Permasalahan Politeknik Negeri Kupang

A. Angka Partisipasi Pendidikan

Angka partisipasi pendidikan di Politeknik Negeri Kupang setiap tahunnya ditandai oleh jumlah mahasiswa yang diterima. Terhadap jumlah mahasiswa yang diterima tersebut pada gilirannya akan diakumulasikan sebagai mahasiswa aktif bersama mahasiswa *on going* lainnya. Potensi permasalahan yang timbul justru diakibatkan oleh rasio jumlah mahasiswa dan dosen. Sesuai ketentuan Permenristekdikti Nomor 2 Tahun 2016 terkait komposisi mahasiswa, rasio ideal mahasiswa rekayasa adalah sebesar 1 : 20 (toleransi 50%) dan *commeres* sebesar 1 : 30 (toleransi 50%). Faktanya membuktikan bahwa pada periodisasi sebelumnya 2015-2019 masih dijumpai adanya simpangan deviasi yang cukup besar.

B. Fasilitas Penunjang Proses Praktikum dan Pembelajaran Mahasiswa

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat dewasa ini perlu didukung oleh kesiapan SDM penggerak dan ketersediaan sarana prasarana penunjang pembelajaran yang sesuai dengan kemajuan jaman tersebut agar kualitas lulusan mampu beradaptasi secara cepat dalam pasar kerja. Fasilitas pembelajaran berupa alat laboratorium yang dimiliki perlu dilakukan tera ulang/kalibrasi sehingga lebih akurat dan dapat digunakan dalam proses praktikum di laboratorium khususnya prodi-prodi rekayasa. Perlu juga diadakan perawatan dan perbaikan terhadap peralatan fungsional pendidikan serta pengadaan peralatan laboratorium sesuai dengan rancangan kurikulum yang berbasis kebutuhan DUDI dan teknologi yang berkembang.

C. Kebutuhan dibukanya Program Studi Magister Terapan

Dalam rangka penataan prodi di lingkungan Politeknik Negeri Kupang, Menteri Riset, Tekonogi dan Pendidikan Tinggi melalui suratnya Nomor 242/KPT/1/2019 tanggal 25 Maret 2019 menyatakan mencabut Izin Pembukaan Program Studi Mesin Perkakas dan Program Studi Mesin Perawatan dan Perbaikan. Dengan penutupan dua program studi tersebut dari



total program studi semula 18 program studi kini menjadi 16 program studi. Namun animo masyarakat dan alumni sarjana terapan untuk melanjutkan studi ke jenjang magister terapan cukup tinggi sehingga PNK merasa perlu untuk membuka prodi magister terapan.

D. Kerjasama Berbasis Pendidikan

Perlu memaksimalkan setiap bentuk kerjasama berbasis pendidikan antara Politeknik Negeri Kupang dengan pihak eksternal termasuk didalamnya membangun kemitraan dalam kolaborasi penelitian serta memelihara dan menjaga keberlanjutan kerjasama yang telah dibangun secara profesional dan transparan.

E. Asesor Kompetensi dan Tempat Uji Kompetensi

Politeknik Negeri Kupang telah memiliki 24 Asesor Kompetensi yang lisensi Asesor kompetensi sudah berakhir sehingga perlu mengikuti lagi ujian Asesor Kompetensi. PNK perlu menyediakan Tempat Uji Kompetensi sesuai skema yang telah mendapatkan lisensi BNSP sehingga pelaksanaan Uji Kompetensi bagi mahasiswa dan kemitraan luar dapat dilaksanakan. Perlu dilakukan lisensi Skema uji kompetensi oleh BNSP sehingga proses uji kompetensi dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

F. Ketimpangan Kualitas Pendidikan

Aspek wilayah geografis, dan topografis NTT yang sulit, status sosial ekonomi, *culture* budaya, ketersediaan sarana prasarana penunjang pembelajaran, keterbatasan SDM kampus menjadi variable penentu akses pemerataan maupun kualitas pendidikan. Pengembangan minat dan bakat dalam mewujudkan prestasi tingkat nasional belum ditunjang dengan pembinaan intensif UKM serta penyediaan venue olahraga yang memadai.

G. Rekrutmen Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lainnya

Belum dilakukan penajakan dan perekrutmen tenaga pendidikan dari kalangan industri dalam menunjang proses belajar mengajar, minimnya realisasi rekrutmen jumlah dosen pasca seleksi penerimaan ASN, dan sebaliknya jumlah penerimaan tenaga kependidikan Non ASN dalam berbagi peran dengan tenaga kependidikan PNS setiap tahunnya justru bertambah dan komposisinya tidak berimbang yang justru menimbulkan beban dalam APBN. Penataan komposisi pembagian beban kerja sesuai kelas jabatan baik tenaga kependidikan ASN maupun Non ASN belum dilakukan secara optimal dan belum dilakukan pemberlakuan SKS dan/atau penetapan kinerja secara berjenjang.

H. Organisasi Tata Kerja PNK

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2020, Politeknik Negeri Kupang secara resmi memiliki OTK baru menggantikan



OTK tahun 2008 yang didalamnya telah mengatur penambahan subbag dalam menunjang penyelenggaraan tata kelola namun belum dilakukan penataan organisasi sesuai keputusan.

I. Sarana Prasarana Penunjang Pembelajaran

Terdapat sejumlah fasilitas gedung perkuliahan yang masuk kategori Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dan belum diselesaikan dan difungsikan sebagaimana peruntukannya akibat terkendala anggaran pembangunan serta ketersediaan internet, meubelar, peralatan laboratorium, *sport center*, akses jalan lingkar kampus, dan *landscape*. Sistem pembelajaran yang mulai tergeser dari sistem tatap muka menjadi sistem daring, membutuhkan tambahan kuota layanan internet bagi penyelenggaraan operasional perkantoran, dan pembelajaran dosen serta mahasiswa

1.5. Peluang/*Opportunities* Politeknik Negeri Kupang

- a) UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan secara umum merubah paradigma pendidikan nasional dengan adanya tuntutan pembaharuan. Tuntutan tersebut menyangkut pembaharuan sistem pendidikan, diantaranya pembaharuan kurikulum, yaitu diversifikasi kurikulum untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam, diversifikasi jenis pendidikan yang dilakukan secara profesional, penyusunan standar kompetensi tamatan yang berlaku secara nasional dan daerah menyesuaikan dengan kondisi setempat; penyusunan standar kualifikasi pendidik yang sesuai dengan tuntutan pelaksanaan tugas secara profesional; penyusunan standar pendanaan pendidikan untuk setiap satuan pendidikan sesuai prinsip-prinsip pemerataan dan keadilan; pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah dan otonomi perguruan tinggi; serta penyelenggaraan pendidikan dengan sistem terbuka dan multimakna. Pembaharuan sistem pendidikan juga meliputi penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat, serta pembedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum. Pembaharuan-pembaharuan tersebut menimbulkan kebutuhan bagi PNK untuk melakukan pembenahan di seluruh aspek, di antaranya pembenahan aspek SDM, sarana prasarana, administrasi dan keuangan agar memenuhi standar nasional pendidikan dan berorientasi pada perubahan paradigma tersebut. Selain itu, undang-undang tersebut juga mengamanatkan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran 20% dari APBN untuk pembiayaan pendidikan. Namun pada kenyataannya sampai saat ini dana yang tersalur untuk anggaran pendidikan belum mencapai seperti yang diharapkan.



- b) UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, memberikan peluang bagi Peguruan Tinggi untuk dapat meningkatkan profesionalitas dosen, serta peningkatkan kesejahteraan profesi dosen. Peluang tersebut hingga tahun 2019 dosen yang telah bersertifikasi berjumlah 146 orang sementara sisanya 48 orang sementara mempersiapkan dokumen dan akan mengikuti ujian portofolio dosen pada tahun 2020 keatas.
- c) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi membawa berkah bagi perkembangan pendidikan politeknik karena pendidikan politeknik diberikan kesempatan untuk mengembangkan program sarjana terapan sesuai Pasal 16 ayat 1 menyebutkan “pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan”. Implikasi kebijakan tersebut, PNK telah mengembangkan program sarjana terapan pada 8 program studi yang ada.
- d) Otonomi daerah memberikan peluang kepada PNK untuk dapat membangun jaringan kerjasama dan menyumbangkan hasil karyanya bagi pemerintah daerah baik dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- e) Kemajuan teknologi informasi dan kebutuhan masyarakat terhadap teknologi informasi, memberikan peluang yang luas kepada PNK yang telah mengembangkan sistem informasinya berbasis ICT (*Information and Communication Technology*) untuk memberikan layanan informasi tentang pendidikan politeknik, memberikan kemudahan akses kepada mahasiswa dan masyarakat dengan menggunakan perangkat teknologi informasi, serta membangun jaringan yang lebih luas dengan alumni, institusi pemerintah dan swasta serta masyarakat yang lebih luas.
- f) Animo dan kepercayaan terhadap kualitas Politeknik Negeri Kupang sangat tinggi dan tidak disangkal lagi dengan semakin banyaknya kepercayaan instansi pemerintah memanfaatkan fasilitas maupun jasa tenaga ahli sesuai disiplin ilmu yang butuhkan dalam kerangka penegakan hukum maupun seleksi penerimaan pegawai negeri sipil/ASN, pegawai BUMN maupun pegawai swasta. Selain itu jumlah peminat terhadap program studi yang ditawarkan juga terus meningkat serta daya serap terhadap lulusan PNK semakin diminati oleh *stakeholders* dan pemerintah.
- g) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2001 tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia yang meliputi 13 wilayah propinsi: Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Irian Jaya (Papua Barat), Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah menjadi barometer pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum



maupun NTT secara khusus yang cukup stabil telah mendorong tumbuhnya berbagai industri dan peluang kerja semakin tinggi bagi lulusan bidang *humaniora* PNK;

1.6. Tantangan Politeknik Negeri Kupang

- a) Memasuki era Pendidikan 4.0 sebagai akibat revolusi industri 4.0 yang bercirikan pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran dengan sistem siber (*cyber sistem*) menuntut kesiapan lembaga dalam menyediakan infrastruktur maupun pendanaan terkait pengintegrasian model pembelajaran *daring* bagi civitas akademika.
- b) Politeknik Negeri Kupang dalam Era Pendidikan 4.0 diperhadapkan akan tanggungjawab menciptakan karakteristik Mahasiswa 4.0 melalui pembelajaran sebagai penjelajahan pengetahuan (*a learning journey*), pengembangan karakter, *personalize learners*, penerapan pendekatan *design thinking*, *creative process*, *collaborative learning*, *project based learning*, *problem based learning* serta *pedagogy / andragogy / heutagogy* dan Dosen 4.0 melalui kompetensi inti keilmuan (*core competencies*) yang kuat, memiliki ketampilan penunjang (*soft skill*) dalam *critical thinking*, *creative*, *communication*, *collaboration* serta berperan sebagai agen dalam menebar *passion* dan menginspirasi mahasiswa, menjadi teman bagi mahasiswa dan memberikan teladan karakter.
- c) Kebijakan pendidikan yang dikenal dengan gerakan "Pernikahan Massal" (*Link and Match*) antara pendidikan vokasi dengan dunia industri dan dunia kerja (DUDI) mengisyaratkan komitmen permanen yang sifatnya segera dalam menghadirkan praktisi dan merevisi kurikulum yang mengikuti kebutuhan industri.
- d) Dalam rangka mewujudkan SDM yang unggul, Politeknik Negeri Kupang sesuai Organisasi Tata Kerja yang diterbitkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2020 telah merestrukturisasi jabatan struktural sesuai ketentuan MenPAN-RB. Jabatan-jabatan struktural tersebut akan *reduksi* bila penerapan reformasi birokrasi terkait ASN (memiliki keahlian mumpuni, berkompeten, profesional dan berintegritas) berlaku menyeluruh pada setiap kementerian/lembaga.
- e) Akibat globalisasi maka adanya peluang negara asing mendirikan pendidikan tinggi di Indonesia, dibuktikan dengan meningkatnya jumlah pendidikan tinggi internasional. Hal ini merupakan ancaman bagi pembangunan pendidikan nasional, selain juga meningkatnya persaingan memperoleh kesempatan kerja bagi lulusan.



- f) Ancaman liberasisasi pendidikan sangat potensial untuk menurunkan minat masyarakat dan menuntut perguruan tinggi harus meningkatkan berbagai aspek internal yang dimiliki dalam memberikan layanan prima.
- g) Tuntutan masyarakat untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, serta menguasai *hardskill* dan *softskill* agar mampu bersaing di tingkat global termasuk kesiapan menghadapi penerapan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) serta persaingan kerja di era globalisasi dan informasi menuntut penguasaan bahasa, teknologi termasuk teknologi informasi.



BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Berdasarkan amanat dan mandat Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta dengan mempertimbangkan kondisi umum dan aspirasi masyarakat, kerangka kerja logis yang dibangun untuk mendukung Visi Presiden pada RPJMN Tahun 2020-2024, serta Visi Indonesia 2045, mengoptimalkan potensi yang dimiliki sekaligus mencermati potret permasalahan-permasalahan yang telah dijelaskan pada bagian I maka Politeknik Negeri Kupang menyusun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis sebagai berikut:

2.1 Visi

Dalam rangka menjalankan agenda reformasi pendidikan tinggi sebagaimana tuntutan RPJMN 2015-2019 dan melaksanakan amanah sesuai tugas dan fungsinya untuk kurun waktu yang sama Politeknik Negeri Kupang menetapkan visi sebagai berikut ***“Merwujudkan pendidikan tinggi vokasional berwawasan global, inovatif dan berdaya saing dalam bidang rekayasa, tataniaga dan pariwisata.”*** Visi tersebut menggambarkan komitmen Politeknik Negeri Kupang mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden melalui Kemendikbud dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki secara konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan tetap mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia.

Peranan dan amanat yang diemban Politeknik Negeri Kupang dalam mendukung proses pembangunan SDM Indonesia adalah membentuk mahasiswa yang berideologi Pancasila yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dituntut memiliki kemampuan yang bercirikan :

1. Pendidikan Tinggi Vokasional berwawasan global adalah merupakan suatu proses pendidikan yang dirancang untuk mempersiapkan generasi bangsa dengan kemampuan intelektual dan tanggungjawab guna menghadapi tuntutan kehidupan yang semakin kompetitif. Implikasi logis dari kondisi tersebut ditandai oleh pembaharuan kurikulum, penataan sistem, struktur dan proses pendidikan yang merupakan kombinasi antara kebijakan dan mekanisme pasar kerja.
2. Inovatif diartikan sebagai suatu proses dan/atau hasil pengembangan pemanfaatan pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman untuk menghasilkan suatu produk, proses atau sistem yang baru sekaligus memberikan nilai yang berarti secara signifikan.
3. Berdaya saing diartikan sebagai kemampuan berinteraksi/beradaptasi secara normal sesuai disiplin ilmu yang dimiliki karena memiliki tingkat *total factor productivity*, dan



biaya satuan rata-rata sama atau lebih diantara kompetitor yang ada atau dengan kata lain kontribusi iptek dan pendidikan tinggi dalam perekonomian.

4. Bidang Rekayasa, Tataniaga dan Pariwisata sebagai bidang keilmuan yang menjadi basis layanan pendidikan bagi mahasiswa yang menempuh dan melanjutkan studi di Politeknik Negeri Kupang.

2.2 Misi

Sebagai langkah konkrit mendukung pencapaian Visi Presiden, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai tugas dan kewenangan yang dimilikinya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal dengan Nawacita kedua yaitu menjabarkan Misi nomor [1] Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; Misi nomor [5] Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; dan Misi nomor [8] Pengelolaan Pemerintah yang Bersif, Efektif dan Terpercaya. Selaras dengan misi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi 2020-2024 dalam rangka mewujudkan dan mensinergikan misi yang sama, maka Politeknik Negeri Kupang menerapkan 1 (satu) Misi sebagai berikut :

Kode	MISI
M1	Mewujudkan Pendidikan Tinggi Vokasi yang berkualitas dan berstandar industri yang berkelanjutan dengan dukungan infrastruktur dan teknologi

Misi Renstra Politeknik sebagaimana merujuk pada Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yang merupakan manivestasi dari Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024 dapat dimaknai sebagai berikut yakni mewujudkan Pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi adalah proses Pendidikan harus mampu menjawab tantangan atas perubahan tren globalisasi yang demikian pesat. Pendidikan sebagai factor utama pembentukan SDM sebagai ikhtiar mencetak generasi anak bangsa yang unggul, bermutu serta berkelanjutan merata diseluruh penjuru tanah air. Tentu dalam proses Pendidikan mesti didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan yang layak berstandar serta sesuai dengan sasaran pembentukan kompetensi yang diampunya.

2.3 Tujuan Strategis dan Indikator Kinerja Tujuan

Dalam upaya merealisasikan Visi dan Misi Politeknik Negeri Kupang sebagaimana penjabaran diatas, dirumuskan tujuan dan Indikator Tujuan yang lebih jelas untuk menggambarkan ukuran dapat terlaksananya misi dan tercapainya Visi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Tujuan Politeknik Negeri Kupang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Tujuan Strategi 1 [T1] Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Relevansi Pendidikan Tinggi Vokasi

Peningkatan kualitas SDM diharapkan mampu menciptakan tenaga kerja yang dinamis, produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan pasar dan industri 4.0. diakhir periodisasi renstra seluruh target yang ditetapkan seperti tersedianya lulusan yang kompeten dan profesional serta siap kerja, lulusan yang dihasilkan pendidikan tinggi vokasi telah bersertifikat kompetensi.

T1	Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Relevansi Pendidikan Tinggi Vokasi	Baseline 2019	Target Sasaran				
			2020	2021	2022	2023	2024
IKT [1.1]	Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi jenjang S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	3.15	4.2	5.15	6.5	7.35	8.75
IKT [1.2]	Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi jenjang S1 dan D4/D3/D2 yang melanjutkan studi	1	3	5	8	10	12
IKT [1.3]	Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang berwirausaha	1	1	2	2	3	4
IKT [1.4]	Persentase Pekerja Lulusan Politeknik D1, D2 dan D3 dengan gaji minimum sebesar 1.2 x UMR	20	30	40	50	60	75
IKT [1.5]	Persentase Pekerja Lulusan Politeknik D4/Sarjana Terapan dengan gaji minimum sebesar 1.5 x UMR	30	50	70	85	90	95

T1 merupakan sasaran yang memfokuskan pada dampak peningkatan kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan salah satunya pendidikan tinggi vokasi sehingga lulusan dari program pendidikan vokasi akan mendapatkan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun setelah kelulusan. Relevansi pendidikan yang dimaksudkan adalah terdapat keterkaitan antara kompetensi yang diperoleh peserta didik merupakan hasil dari proses pembelajaran yang sesuai dengan konsep link and match pada dunia industri. Dimana kurikulum pendidikan dapat disusun bersama dengan industri, mendorong keterlibatan profesional industri untuk dapat memberikan teaching factory, ketersediaan serta pemenuhan kebutuhan fasilitas praktik atau laboratorium sesuai ketrampilan keahlian yang diampu, dan optimalisasi sumber daya (resources) Pendidikan vokasi bagi peningkatan manfaat bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat.

Keberhasilan pendidikan vokasi salah satunya diukur dari lulusan yang dapat diterima di dunia kerja dan berwirausaha. Hal ini untuk mengetahui efektivitas dan indeks keberhasilan pendidikan vokasi dalam menghasilkan lulusan siap kerja sehingga perlu dihitung persentase lulusan vokasi dalam satu tahun yang bekerja atau berwirausaha.

Lulusan Pendidikan vokasi bekerja dihitung adalah peserta didik yang lulus kemudian yang bekerja atau berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan berbanding dengan jumlah lulusan selama setahun tersebut. Kategori lulusan Pendidikan vokasi yang bekerja adalah lulusan yang tercatat maupun yang ikut dalam proses produksi sebagai tenaga kerja di DUDI, sementara yang berwirausaha adalah lulusan yang bekerja atas inisiatifnya mendirikan suatu

usahan yang dikelola sendiri. Indikator kinerja tujuan lainnya yang menjadi tolak ukur dalam pengukuran tujuan strategi meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi vokasi adalah lulusan Pendidikan vokasi yang melanjutkan studi, lulusan D1/D2/D3 yang bekerja dengan gaji minimum sebesar 1.2 x UMR, dan lulusan D4/Sarjana yang bekerja dengan gaji minimum sebesar 1.5 x UMR.

2. Tujuan Strategi 2 [T2] Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan vokasi

Kondisi saat ini ragam dan jenis pekerjaan baru mulai muncul dan menggantikan pekerjaan lama, bahkan jenis pekerjaan lama kini telah tergantikan dengan perkembangan teknologi dan robotika. Pada setiap jenis pekerjaan, etrampilan dan kompetensi yang dibutuhkan mengalami perubahan. Perubahan ini membutuhkan pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi. Untuk menghasilkan lulusan siap bekerja atau berwirausaha pada bidang keahlian menengah dan tinggi, perlu melakukan peningkatan terhadap kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan Tinggi Vokasi.

T2	Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan vokasi	Baseline 2019	Target Sasaran				
			2020	2021	2022	2023	2024
IKT [2.1]	Persentase Dosen yang sertifikat kompetensi/profesi yang diakui industri dan dunia kerja	5	10	20	30	40	50
IKT [2.2]	Persentase Tenaga Kependidikan yang memiliki sertifikat jabatan fungsional tertentu	10	13	15	20	25	30
IKT [2.3]	Persentase Tenaga Kependidikan yang mengikuti diklat kompetensi	0	5	10	12	15	20

Peningkatan mutu dan kualitas SDM pada satuan Pendidikan tinggi vokasi yaitu tersedianya sumber daya manusia yang memiliki ketrampilan dan penguasaan ilmu yang relevan dengan kebutuhan industri dan dunia kerja. SDM pendidikan tinggi vokasi yang dimaksud adalah dosen, pranata laboratorium pendidikan, dan pimpinan perguruan tinggi vokasi yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi berbasis standar industri untuk memperoleh sertifikat kompetensi terstandar industri. Peningkatan kompetensi yang dimaksudkan adalah pemberian pelatihan yang berstandar industri

2.4 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian atau terealisasinya Sasaran Strategis yang telah dirumuskan Politeknik Negeri Kupang untuk menggambarkan ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi Politeknik Negeri Kupang. Sasaran strategis dan indicator kinerja sasaran Politeknik Negeri Kupang dilingkup Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Tahun 2020-2024, dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Sasaran Program 1 [SP.1] Meningkatnya sistem tata kelola manajemen pendidikan vokasi berstandar industri yang berkualitas

Terwujudnya tata kelola yang baik di lingkungan Politeknik Negeri Kupang adalah suatu keharusan dan tentu hal ini memerlukan partisipasi aktif antara pemerintah dan masyarakat. Indeks Reformasi Birokrasi merupakan salah satu indikator pencapaian terwujudnya tata kelola yang baik dan hasil pelaksanaan kegiatan pada delapan area perubahan reformasi birokrasi. Selain itu juga terdapat hasil penilaian tingkat akuntabilitas kinerja yang berupa SAKIP, yang nanti hasilnya menentukan tingkat predikat keberadaan Politeknik Negeri Kupang. Setiap tahunnya hingga berakhir perodesasi renstra.

SP1	Meningkatnya sistem tata kelola manajemen pendidikan vokasi berstandar industri yang berkualitas	Baseline 2019	Target Sasaran				
			2020	2021	2022	2023	2024
IKP [1.1]	Rata-rata predikat SAKIP satker pendidikan tinggi vokasi minimal BB	B	BB	BB	BB	BB	A
IKP [1.2]	Rata-rata kinerja anggaran pendidikan tinggi vokasi atas pelaksanaan RKA-KL satker minimal 93	90	93	93,5	93,6	93,7	93,8

2. Sasaran Program 2 [SP.2] Terwujudnya kualitas lulusan pendidikan tinggi vokasi yang profesional, bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada TYM

Kualitas lulusan selain predikat prestasi akademik yang disandang, tentunya interaksi selama proses pembelajaran termasuk keikutsertaan dalam aktivitas diluar kampus yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) SKS serta berprestasi berprestasi minimal tingkat nasional menjadi barometer pen gukuran kinerja satker pendidikan dalam program Merdeka Belajar.

SP2	Terwujudnya kualitas lulusan pendidikan tinggi vokasi yang profesional, bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada TYM	Baseline 2019	Target Sasaran				
			2020	2021	2022	2023	2024
IKP [2.1]	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil men-dapatkan pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta.	0	55	55	56	58	60
IKP [2.2]	Persentase lulusan S1 dan D4 /D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) SKS diluar kampus, atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	0	10	10	15	16	18

3. Sasaran Program 3 [SP.3] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi vokasi

Pendidikan tinggi vokasi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan IPTEK untuk masyarakat, bangsa dan negara dan untuk itulah pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu. Kualitas lulusan tidak terlepas dari peranan dosen, PLP dan manajemen. Mutu pendidikan tinggi selain berkegiatan tridharma di internal kampus, juga sangat ditentukan oleh kebiatan tridharma di kampus lain yang terstandarisasi yakni di QS100 sesuai bidang keilmuan, kemampuan dosen mendampingi mahasiswa hingga meraih prestasi minimal di tingkat nasional, kualifikasi dosen berkualifikasi S3, jumlah dosen yang bekerja

sebagai praktisi di dunia industri, pelibatan dosen dari kalangan profesi dan dunia industri atau dunia kerja, dan keluaran atas setiap penelitian dan pengabdian dosen yang mendapatkan rekognisi internasional dan diterapkan oleh masyarakat.

SP3	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi vokasi	Baseline 2019	Target Sasaran				
			2020	2021	2022	2023	2024
IKP [3.1]	Persentase dosen yang ber-kegiatan tridharma di kampus lain di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri atau membina maha-siswa dan berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir	0	15	15	16	17	18
IKP [3.4]	Persentase Dosen berkualifikasi akademik S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan profesional, dunia industri atau dunia kerja	10	30	30	35	45	46
IKP [3.6]	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen	0.05	0.1	0.2	0.5	0.75	0.8

4. **Sasaran Program 4 [SP.4] Terwujudnya kualitas kurikulum dan pembelajaran pendidikan tinggi vokasi yang sesuai tuntutan Dunia Industri dan Dunia Kerja**

Penerapan kurikulum *link and match* dengan industri, dalam arti yang dipelajari oleh peserta didik pada pendidikan tinggi vokasi sesuai dengan kebutuhan dan analisis perkembangan kebutuhan pada DUDI. Perwujudan pencapaian sasaran program ini juga ditentukan oleh kesiapan dan implementasi program studi yang dimiliki melaksanakan kerjasama dengan mitra, ketersediaan program studi yang memiliki akreditasi/sertifikasi internasional yang diakui pemerintah serta ketersediaan kurikulum yang menggunakan metode pemecahan kasus atau pembelajaran kelompok berbasis proyek sebagai bobot evaluasi.

SP4	Terwujudnya kualitas kurikulum dan pembelajaran pendidikan tinggi vokasi yang sesuai tuntutan Dunia Industri dan Dunia Kerja	Baseline 2019	Target Sasaran				
			2020	2021	2022	2023	2024
IKP [4.1]	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerjasama dengan mitra	0	35	35	35	35	35
IKP [4.2]	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah	0	2,5	2,5	2,6	2,7	2,8
IKP [4.3]	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projec (team based project) sebagai bobot evaluasi	35	36	45	55	62	63

Keempat Sasaran Strategis/Program memiliki keterkaitan yang erat dengan Tujuan Strategis dalam mewujudkan Visi dan Misi Politeknik Negeri Kupang yang mendukung kinerja Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi 2020-2024 dengan tautan yang dijelaskan dalam Tabel 2.1.



Tabel 2.1 Keterkaitan Sasaran Strategis dan Tujuan Strategi Politeknik Negeri Kupang
Tahun 2020-2024

No.	Sasaran Strategis	Tujuan terkait
1	Meningkatnya sistem tata kelola manajemen pendidikan vokasi berstandar industri yang berkualitas	1
2	Terwujudnya kualitas lulusan pendidikan tinggi vokasi yang profesional, bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada TYM	2
3	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi vokasi	2
4	Terwujudnya kualitas kurikulum dan pembelajaran pendidikan tinggi vokasi yang sesuai tuntutan Dunia Industri dan Dunia Kerja	1



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGIS, KERANGKA KELEMBAGAAN KEMENDIKBUD
DAN POLITEKNIK NEGERI KUPANG

3.1. Arah Kebijakan, Strategis, Kerangka Kelembagaan Kemendikbud

3.1.1 Arah Kebijakan, dan Strategis Nasional

Visi Presiden tahun 2020-2024 adalah: “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong”. Visi tersebut dijalankan dalam 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Nawacita dalam periode 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
2. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
3. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
4. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
5. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
6. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
7. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
8. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

RPJMN memberikan penjelasan lebih lanjut tentang lima arahan utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita, termasuk di antaranya arahan tentang pembangunan SDM : *“Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global.”* Sesuai dengan RPJMN, arahan presiden yang berkenaan dengan pembangunan SDM dilaksanakan dalam dua agenda pembangunan: (1) meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, dan (2) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 yang Terkait Langsung dengan Tugas dan Fungsi Kemendikbud, seperti yang disebutkan sebelumnya, terdapat dua agenda pembangunan yang berkaitan erat dengan tugas dan fungsi Kemendikbud. Kedua agenda tersebut dilaksanakan melalui arahan kebijakan dan strategi bidang pendidikan dan kebudayaan, seperti yang dirangkum dalam Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Peran Kemendikbud dalam Agenda Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

No	Agenda Pembangunan	Arah Kebijakan	Strategi
1	Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	1. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran 2. Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun 3. Peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata

No	Agenda Pembangunan	Arah Kebijakan	Strategi
			4. Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antarwilayah 5. Peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan dan peningkatan efektifitas pemanfaatan anggaran pendidikan;
		Meningkatkan produktivitas dan daya saing	1. Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industry; dan 2. Penguatan pendidikan tinggi berkualitas
2	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Revolusi mental dan pembinaan ideology Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter	1. Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti 2. Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani dan responsive. 3. Pembinaan ideology Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan, dan nasionalisme dan patriotisme
		Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia	1. Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan local untuk menumbuhkan semangat kekeluargaan, musyawarah, gotong royong dan kerjasama antar warga 2. Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat 3. Pelindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif 4. Pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia, dan 5. Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan
		Peningkatan literasi, inovasi dan kreativitas	1. Pengembangan budaya literasi 2. Pengembangan, pembinaan dan pelindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra, dan 3. Penguatan institusi social penggerak literasi dan inovasi

Tabel 3.1 menjadi pertimbangan dalam menentukan arahan kebijakan dan strategi Kemendikbud yang akan dilaksanakan melalui sinergi antara Kemendikbud dengan kementerian/lembaga lain terkait beserta dengan pemerintah daerah dan masyarakat.

3.1.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian

Arah kebijakan dan strategi pendidikan dan kebudayaan pada kurun waktu 2020-2024 dalam rangka mendukung pencapaian 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita Kedua) dan tujuan Kemendikbud melalui Kebijakan Merdeka Belajar yang bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi diseluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Selain itu, fokus pembangunan pendidikan dan pemajuan kebudayaan diarahkan pada pemantapan budaya dan karakter bangsa melalui perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan serta pengembangan kesadaran akan pentingnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan penyerapan nilai baru dari kebudayaan global secara positif dan produktif.

Secara lebih detail, Kebijakan Merdeka Belajar mendorong partisipasi dan dukungan dari semua pemangku kepentingan: keluarga, guru, lembaga pendidikan, DU/DI, dan masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Kebijakan Merdeka Belajar

Sumber: Peta Jalan Pendidikan Indonesia, 2020

Gambar 3.1 di atas menjelaskan bahwa Kebijakan Merdeka Belajar dapat terwujud secara optimal melalui : (1) peningkatan kompetensi kepemimpinan, kolaborasi antar elemen masyarakat, dan budaya; (2) peningkatan infrastruktur serta pemanfaatan teknologi di seluruh satuan pendidikan; (3) perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan; dan (4) penyempurnaan kurikulum, pedagogi, dan asesmen.

Perubahan yang diusung oleh Kebijakan Merdeka Belajar terjadi pada kategori :

(1) Ekosistem pendidikan;

Pada ekosistem pendidikan, Kemendikbud akan mengubah pandangan dan praktik yang bersifat mengekang kemajuan pendidikan, seperti penekanan pada pengaturan yang kaku, persekolahan sebagai tugas yang memberatkan, dan manajemen sekolah yang terfokus pada



urusan internalnya sendiri menjadi ekosistem pendidikan yang diwarnai oleh suasana sekolah yang menyenangkan, keterbukaan untuk melakukan kolaborasi lintas pemangku kepentingan pendidikan, dan keterlibatan aktif orang tua murid dan masyarakat.

(2) Guru;

Kebijakan Merdeka Belajar akan mengubah paradigma guru sebagai penyampai informasi semata menjadi guru sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar. Dengan demikian guru memegang kendali akan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di ruang kelasnya masing-masing. Penghargaan setinggi-tingginya bagi profesi guru sebagai fasilitator dari beragam sumber pengetahuan akan diwujudkan melalui pelatihan guru berdasarkan praktik yang nyata, penilaian kinerja secara holistik, dan pembenahan kompetensi guru.

(3) Pedagogi;

Dalam hal pedagogi, Kebijakan Merdeka Belajar akan meninggalkan pendekatan standardisasi menuju pendekatan heterogen yang lebih paripurna memungkinkan guru dan murid menjelajahi khasanah pengetahuan yang terus berkembang.

Murid adalah pemimpin pembelajaran dalam arti merekalah yang membuat kegiatan belajar mengajar bermakna, sehingga pembelajaran akan disesuaikan dengan tingkatan kemampuan siswa dan didukung dengan beragam teknologi yang memberikan pendekatan personal bagi kemajuan pembelajaran tiap siswa, tanpa mengabaikan pentingnya aspek sosialisasi dan bekerja dalam kelompok untuk memupuk solidaritas sosial dan keterampilan lunak (*soft skills*). Dengan menekankan sentralitas pembelajaran siswa, kurikulum yang terbentuk oleh Kebijakan Merdeka Belajar akan berkarakteristik fleksibel, berdasarkan kompetensi, berfokus pada pengembangan karakter dan keterampilan lunak, dan akomodatif terhadap kebutuhan DU/DI.

Sistem penilaian akan bersifat formatif/mendukung perbaikan dan kemajuan hasil pembelajaran dan menggunakan portofolio.

(4) Kurikulum; dan

(5) Sistem penilaian.

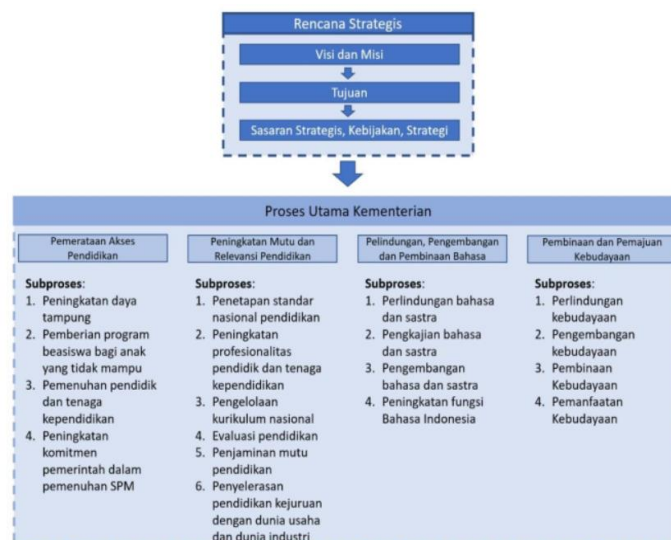
Adapun implementasi dari Kebijakan Merdeka Belajar pada aras pendidikan tinggi adalah Kebijakan Kampus Merdeka. Kebijakan Kampus Merdeka diawali dengan empat butir kebijakan yaitu: 1) Pembukaan program studi baru; 2) Sistem akreditasi perguruan tinggi; 3) Perguruan tinggi negeri berbadan hukum; dan 4) Hak belajar tiga semester di luar program studi. Keempat butir kebijakan ini bertujuan untuk memulai perubahan paradigma pendidikan tinggi agar lebih otonom dengan kultur pembelajaran yang inovatif. Perguruan tinggi akan memiliki proses pembelajaran yang semakin fleksibel dan bebas untuk melakukan inovasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi. Kebijakan Kampus Merdeka akan menyentuh semua elemen dalam ekosistem pendidikan tinggi, namun mahasiswa adalah fokus utama dari Kebijakan Kampus Merdeka.

Mahasiswa akan mampu memilih jurusan studi yang lebih mutakhir dan berpadanan dengan kebutuhan pengetahuan dan keterampilan, serta memiliki kebebasan untuk memilih mata kuliah yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan kapasitas dirinya.

3.1.3. Kerangka Kelembagaan Kemendikbud

Dalam rangka mencapai visi, misi dan strategi Kemendikbud sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya, Kemendikbud harus didukung oleh kerangka kelembagaan yang mencakup struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil Negara yang efektif dan efisien, agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Kemendikbud secara optimal. Kerangka kelembagaan dimaksudkan agar penataan organisasi sejalan dan mendukung pencapaian sasaran strategis, serta mendorong efektifitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi.

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai oleh Kemendikbud Tahun 2020-2024, ditetapkan 4 (empat) proses utama kementerian yaitu (1) pemerataan akses pendidikan; (2) peningkatan mutu dan relevansi pendidikan; (3) perlindungan, pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra; dan (4) pelestarian dan pemajuan kebudayaan seperti yang tergambar pada Gambar 3.2. Di dalam setiap proses utama tersebut mengandung penguatan karakter bagi peserta didik.



Gambar 3.2 Empat Proses Utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Sejalan dengan keempat proses utama kementerian tersebut diatas, Kemendikbud memiliki fungsi sebagai berikut :

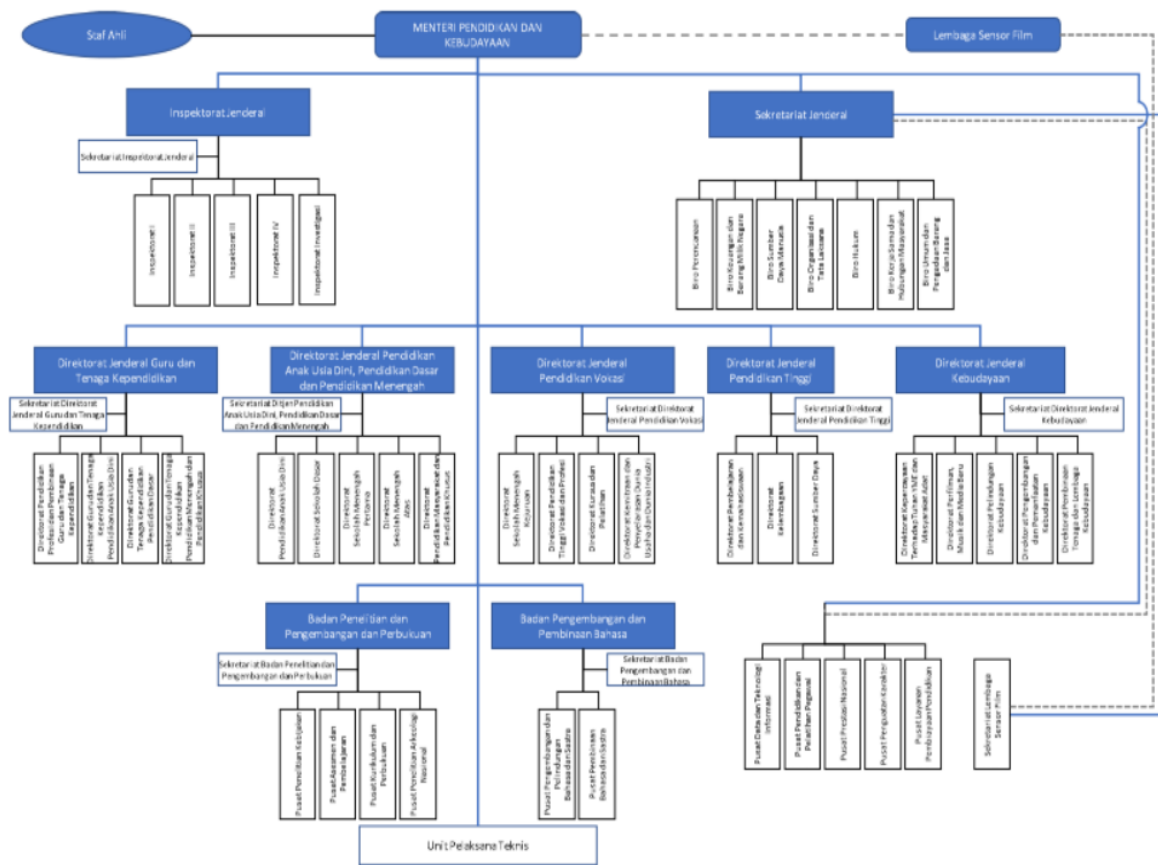
- Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, pendidikan tinggi, dan pengelolaan kebudayaan;



- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik, serta pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi;
- c) Penetapan standar nasional pendidikan dan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
- d) Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan tinggi;
- e) Pelaksanaan fasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, dan pendidikan tinggi, serta pengelolaan kebudayaan;
- f) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, pendidikan tinggi, dan pengelolaan kebudayaan;
- g) Pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan;
- h) Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan perfilman nasional;
- i) Pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra Indonesia;
- j) Pelaksanaan pengelolaan sistem perbukuan;
- k) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah;
- l) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian;
- m) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian;
- n) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian; dan
- o) Pelaksanaan dukungan substantif untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis kementerian.

3.1.4. Struktur Organisasi

Mengacu pada tugas dan fungsi Kemendikbud yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka Struktur Organisasi Kemendikbud adalah seperti yang tergambar pada Gambar 3.3 berikut ini :



Gambar 3.3 Struktur Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Seperti yang terlihat pada Gambar 3.3 di atas, dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendikbud, Menteri Pendidikan dan kebudayaan dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian, didukung oleh 9 (Sembilan) Unit Eselon I sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;
5. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
6. Direktorat Jenderal Kebudayaan;
7. Inspektorat Jenderal;
8. Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan; dan
9. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Setiap Unit Eselon I tersebut di atas memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan spesifik. Sekretariat Jenderal, sebagai sekretaris pimpinan dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administratif kepada seluruh unsur



organisasi di lingkungan kementerian. Sementara itu, masing-masing direktorat jenderal dan badan merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis sesuai bidangnya masing-masing. Adapun Inspektorat Jenderal melaksanakan pengawasan internal di lingkungan kementerian. Selain unit-unit Eselon I, Menteri Pendidikan dan kebudayaan juga didukung oleh Staf Ahli bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan yang bertugas untuk memberikan telaahan dan masukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait regulasi bidang pendidikan dan kebudayaan.

3.1.4.1. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kebijakan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas, profesional, dan kompeten berdasarkan sistem merit sesuai bidang tugasnya sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan Kemendikbud. Untuk itu, dalam 5 (lima) tahun kedepan Kemendikbud diharapkan dapat mewujudkan birokrasi berkelas dunia (SMART ASN) sesuai dengan *Roadmap* SDM secara nasional yaitu ASN yang memiliki kompetensi integritas, nasionalisme, berwawasan global, TIK dan bahasa asing, *hospitality*, *networking*, dan *entrepreneurship*. Untuk memastikan ketersediaan SDM tersebut, strategi utama yang dilakukan dalam pengelolaan SDM adalah melalui proses rekrutmen yang transparan untuk mendapatkan *talent* terbaik, peningkatan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan organisasi, serta penerapan sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) dalam rangka meningkatkan kinerja seluruh ASN.

3.1.4.2. Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Reformasi birokrasi internal Kemendikbud merupakan upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik di lingkungan Kemendikbud. Reformasi birokrasi dihadapkan pada upaya mengatasi masalah inefisiensi, inefektivitas, tidak profesional, tidak netral, tidak disiplin, tidak patuh pada aturan, rekrutmen ASN tidak transparan, belum ada perubahan paradigma (*mindset*), KKN yang masih terjadi di berbagai jenjang pekerjaan, abdi masyarakat yang belum sepenuhnya terwujud, pemerintahan belum akuntabel, transparan, partisipatif, dan kredibel, pelayanan publik belum berkualitas dan pelayanan publik prima (mudah, murah, cepat, dan lebih baik) belum sepenuhnya terbangun secara luas.

Sebagai kementerian yang mengemban amanat dalam membangun SDM melalui peningkatan mutu pendidikan dan pemajuan kebudayaan dengan memperhitungkan capaian kinerja, potensi, dan permasalahan, Kemendikbud berupaya mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berkarakter. Untuk itu, Program Reformasi Birokrasi Kemendikbud Tahun 2020-2024 diharapkan dapat mencapai SDM yang berkualitas, baik dari aspek jumlah, kompetensi (*hard competencies* dan *soft competencies*), maupun integritas; termasuk pula



manajemen serta kinerja SDM yang tinggi. Sumber Daya Manusia aparatur merupakan elemen terpenting bagi instansi pemerintah yang berperan sebagai penggerak utama dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan Kemendikbud. Mengingat begitu pentingnya SDM aparatur, maka manajemen SDM diperlukan untuk mengelolanya secara sistematis, terencana dan terpola agar tujuan yang diinginkan organisasi pada masa sekarang maupun yang akan datang dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu pula dalam reformasi birokrasi, aspek SDM aparatur menjadi aspek penting, sehingga perlu dilakukan penataan secara sistematis. Di samping aspek SDM aparatur, ketercapaian peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di lingkungan Kemendikbud juga merupakan hal yang sangat penting.

Selain itu, Kemendikbud juga terus melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah berjalan baik meliputi delapan area perubahan, yakni:

1. Manajemen Perubahan
2. Penguatan Pengawasan
3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
4. Penguatan Kelembagaan
5. Penguatan Tata Laksana
6. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
7. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang terdiri atas:
 - a. Layanan peserta didik;
 - b. Layanan satuan pendidikan;
 - c. Layanan substansi pendidikan;
 - d. Layanan guru dan tenaga kependidikan;
 - e. Layanan kebudayaan;
 - f. Layanan kebahasaan; dan
 - g. Layanan PAUD dan pendidikan masyarakat

3.2. Arah Kebijakan, Strategis, Kerangka Kelembagaan Politeknik Negeri Kupang

3.2.1. Arah Kebijakan dan Strategi Politeknik Negeri Kupang

Pelaksanaan Rencana Strategis Politeknik Negeri Kupang tidak terlepas dari target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Perpres No. 2 Tahun 2015 yang telah ditandatangani tanggal 8 Januari 2015 terjabarkan dalam tiap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Rencana Strategis Politeknik Negeri Kupang 2020-2024 merupakan tahapan keempat dari pelaksanaan RPJMN yang menyusun/menyesuaikan rencana program kegiatan satker dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan pendidikan melalui visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam menunjang arah dan kebijakan strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maka Politeknik Negeri Kupang memandang prinsip diatas sebagai suatu hal yang mutlak untuk dilaksanakan oleh segenap pemangku kepentingan melalui :

1. Mewujudkan Sistem Tata Kelola Manajemen dan Kualitas pendidikan Vokasi Berstandar Industri
2. Mewujudkan Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi
3. Mewujudkan Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi
4. Mewujudkan Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran

Upaya pengimplementasian arah kebijakan Politeknik Negeri Kupang perlu didasari oleh beberapa kebijakan strategi yang dijabarkan berdasarkan tanggungjawab/bidang pelayanan oleh masing-masing pemangku kegiatan antara lain :

A. Mewujudkan Sistem Tata Kelola Manajemen dan Kualitas Pendidikan Vokasi Berstandar Industri

Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dari tujuan pertama adalah melalui indikator kinerja sasaran program, indikator kinerja sasaran kegiatan antara lain meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis, dan pembinaan pendidikan vokasi dan profesi yang dijabarkan dalam sebagai berikut :

Sasaran Strategis (Outcome) / Indikator Kinerja Sasaran Program		Pemangku Kegiatan
I K S	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	Keuangan
	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-KL Satker minimal 93	Keuangan
Kegiatan / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja Kegiatan		
Kegiatan I	Meningkatkan Kualitas Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	
SK I.1 (Output)	Layanan Perkantoran	
IKK 1.1	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	Keuangan
IKK 1.2	Jumlah Tenaga Kependidikan ASN Penerima Tunjangan Kinerja Pegawai	Keuangan
IKK 1.3	Jumlah Dosen Penerima Sertifikasi Dosen	Keuangan
SK I.2 (Output)	SDM Penggerak Tata Kelola	
IKK 2.1	Presentase Nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran)	Keuangan
IKK 2.2	Presentase Nilai EKA (Evaluasi Kinerja Anggaran)	Keuangan
IKK 2.3	Presentase Daya Serap Anggaran Tahunan	Keuangan
IKK 2.4	Presentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Keuangan
IKK 2.5	Penerimaan Hibah	Keuangan
IKK 2.6	Presentase Capaian Serapan SBSN	Keuangan
IKK 2.7	Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di kampus	Akademik & Kemahasiswaan
IKK 2.8	Target Keindahan, Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan di kampus	Keuangan
IKK 2.9	Nilai score SINDE dari Biro Umum Kemdikbudristek	Keuangan
IKK 2.10	Jenis urusan manajemen kampus berbasis digital	UPT TIK
IKK 2.11	Jumlah upaya yang dilakukan untuk Meningkatkan Daya Tarik Kampus	Keuangan
IKK 2.12	Pembentukan Tim Humas	Kerjasama
IKK 2.13	Jumlah Tenaga Kependidikan yang Bersertifikat Kompetensi (Fungsional)	Kepegawaian
IKK 2.14	Jumlah Tenaga Kependidikan Mengikuti Diklat Kompetensi (Teknisi/PLP)	Kepegawaian
IKK 2.15	Tenaga kependidikan (Non Dosen) yang ditingkatkan kompetensinya	Kepegawaian
IKK 2.16	Persentase Kuantitas Tindak Lanjut Temuan Inspektorat	Keuangan
IKK 2.17	Persentase Tindak Lanjut Bernilai Rupiah Temuan Inspektorat	Keuangan
IKK 2.18	Penyelesaian temuan BPK-RI	Keuangan



Kegiatan / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja Kegiatan		Pemangku Kegiatan
IKK 2.19	Publikasi pemberitaan/sosialisasi yang dilaksanakan secara digital	Humas
IKK 2.20	Publikasi pemberitaan/sosialisasi yang dilaksanakan secara konvensional	Humas
IKK 2.21	Persentase Laporan LHKPN	Kepegawaian
IKK 2.22	Persentase Laporan LHKSN	Kepegawaian
IKK 2.23	Jumlah pimpinan pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti pelatihan manajemen bisnis berbasis industry	Kepegawaian
SK I.3 (Output)	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Evaluasi, Serta Akuntabilitas dan Pencapaian Kinerja	
IKK 3.1	Dokumen Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	Keuangan
IKK 3.2	Dokumen Penyusunan Standar Satuan Biaya Pendidikan Tinggi (UKT)	Keuangan
IKK 3.3	Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran (SPASIKITA)	Keuangan
IKK 3.5	Laporan Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Keuangan
IKK 3.6	Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIN)	Akademik
SK I.4 (Output)	Layanan Internal (Overhead)	
IKK 4.1	Jumlah Layanan Pengadaan Perlengkapan Operasional Perkantoran	Keuangan
IKK 4.2	Pengadaan Kendaraan Operasional Pimpinan dan Perkantoran	Keuangan
IKK 4.3	Jumlah Kendaraan Operasional Roda 4 dan 6	Keuangan
IKK 4.4	Jumlah Kendaraan Operasional Roda 2	Keuangan
IKK 4.5	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi	Keuangan
IKK 4.6	Pengadaan Aplikasi Sistem e-Layanan	Keuangan
Kegiatan II	Pembinaan Pendidikan Vokasi dan Profesi	
SK II.1 (Output)	Dukungan Operasional PTN (BOPTN/Vokasi)	
IKK 1.1	Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	Keuangan
IKK 1.2	Operasional Penyelenggaraan Perkantoran	Keuangan
SK II.2 (Output)	Pengembangan Kelembagaan	
IKK 2.1	Jumlah institusi pendidikan tinggi vokasi mendapatkan pembinaan menuju BLU	Akademik
IKK 2.2	Jumlah Satker yang dibina menuju WBK	Akademik

B. Mewujudkan Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi

Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dari tujuan kedua adalah melalui indikator kinerja sasaran program dan indikator kinerja sasaran kegiatan antara lain pembinaan pendidikan vokasi dan profesi.

Sasaran Strategis (Outcome) / Indikator Kinerja Sasaran Program		Pemangku Kegiatan
IKS	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	Kerjasama
	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 SKS diluar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	Kerjasama
Kegiatan I	Pembinaan Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi	
SK I.1 (Output)	Layanan Pembelajaran (BOPTN Vokasi)	
IKK 1.1	Dukungan Pengadaan Bahan Praktikum Jurusan	Akademik
IKK 1.2	Dukungan Pengadaan Bahan Kuliah Jurusan	Akademik
IKK 1.3	Dukungan Pengadaan Tools Praktikum Jurusan	Akademik
SK I.2 (Output)	Buku Perpustakaan (BOPTN Vokasi)	
IKK 2.1	Pengadaan Literasi, CD Pembelajaran dan Buku Perpustakaan	Akademik
IKK 2.2	Dukungan Pengadaan Bahan Pustaka dan Jurnal	Akademik
SK I.3 (Output)	Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola. Kelembagaan dan SDM (BOPTN Vokasi)	
IKK 3.1	Dokumen Pelaksanaan Audit SPI	SPI
IKK 3.2	Dokumen Pelaksanaan Audit SPMI	SPMI
SK I.4 (Output)	Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN Vokasi)	
IKK 4.1	Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran	Akademik
IKK 4.2	Pengadaan Meubelair Pendukung Layanan Pembelajaran	Keuangan



Kegiatan / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja Kegiatan		Pemangku Kegiatan
IKK 4.3	Pemeliharaan Sarana Prasarana Pembelajaran	Keuangan
SK 1.5 (Output)	Layanan Kegiatan Kemahasiswaan (BOPTN Vokasi)	
IKK 5.01	Jumlah Pembinaan Unit Kegiatan Mahasiswa	Kemahasiswaan
IKK 5.02	Jumlah Mahasiswa Berprestasi Dalam Minat dan Bakat	Kemahasiswaan
IKK 5.03	Jumlah Mahasiswa Berprestasi Dalam Penalaran Akademik	Kemahasiswaan
IKK 5.04	Hasil Karya penelitian terapan Mahasiswa (Berupa Produk)	Kemahasiswaan
IKK 5.05	Hasil karya penelitian terapan mahasiswa yang dapat dihilirisasi ke pasar/masyarakat/industri	Kemahasiswaan
IKK 5.06	Forum ajang kreatifitas mahasiswa yang dilaksanakan di kampus	Kemahasiswaan
IKK 5.07	Ajang kreatifitas mahasiswa yang diikuti diluar kampus	Kemahasiswaan
SK 1.6 (Output)	Layanan Pendidikan (PNBP/BLU Vokasi)	
IKK 6.01	Penerimaan Mahasiswa	Akademik
IKK 6.02	Peningkatan Jumlah Mahasiswa	Akademik
IKK 6.03	Mahasiswa yang memperoleh beasiswa	Kemahasiswaan
IKK 6.04	Mahasiswa yang diluluskan	Akademik
IKK 6.05	Jumlah mahasiswa yang mengikuti program D2 Fast Track	Akademik
IKK 6.06	Pabrik Wirausaha – Mahasiswa D4/D3/D2	Kemahasiswaan
IKK 6.07	Dokumen Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru	Kemahasiswaan
IKK 6.08	Dokumen Bantuan Beasiswa Swadana	Kemahasiswaan & Kerjasama
IKK 6.09	Dukungan Pembinaan Unit Organisasi Kemahasiswaan (BEM/BLM, UKM Kerohanian, HMJ)	Akademik
IKK 6.10	Dukungan Pembinaan Penalaran Keilmuan/ Kerjasama Berbasis Pendidikan (Kompetisi Internal Jurusan, Remedial Course, Workshop ESP, Seminar Jurusan)	Akademik
IKK 6.11	Dukungan Kewirausahaan Mahasiswa	Kemahasiswaan
IKK 6.12	Dokumen Seminar/Pelatihan/Workshop PSDM Tenaga Pendidik	Kepegawaian
IKK 6.13	Dokumen Penyelenggaraan Tugas Tambahan dan KJM Dosen	SPI, Keuangan
SK 1.7 (Output)	Sarana Prasarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU Vokasi)	
IKK 7.01	Pengadaan Tambahan Peralatan Pendukung Perkantoran	Keuangan
IKK 7.02	Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran	Keuangan
IKK 7.03	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran	Keuangan
SK 1.8 (Output)	Dukungan Layanan Pembelajaran (PNBP/BLU Vokasi)	
IKK 8.01	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran	Keuangan
IKK 8.02	Laporan Kinerja Tenaga Kependidikan Non PNS	Kepegawaian
IKK 8.03	Dokumen/Laporan Sistem Tata Kelola dan Kelembagaan	Keuangan
SK 1.9 (Output)	Peningkatan Layanan Kemahasiswaan dan Penyiapan Karir	
IKK 9.01	Berapa penghargaan/prestasi nasional yang dapat diperoleh dari aktifitas mahasiswa	Akademik
IKK 9.02	Berapa penghargaan/prestasi internasional yang dapat diperoleh dari aktifitas mahasiswa	Akademik
IKK 9.03	Jumlah mahasiswa yang menghabiskan paling sedikit 20 SKS di luar kampus	Akademik
IKK 9.04	Jumlah mahasiswa yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat	Akademik
IKK 9.05	Jumlah mahasiswa baru yang diterima karena prestasi olahraga dan seni	Akademik
IKK 9.06	Persentase lulusan D4 Tepat Waktu	Akademik
IKK 9.07	Persentase lulusan D3 Tepat Waktu	Kerjasama
IKK 9.08	Rata-rata Lama Studi lulusan D4	Kemahasiswaan
IKK 9.09	Rata-rata Lama Studi lulusan D3	Kemahasiswaan
IKK 9.10	Rata-rata IPK lulusan D4	Akademik
IKK 9.11	Rata-rata IPK lulusan D3	Akademik
IKK 9.12	Rata-rata Waktu Tunggu Mendapatkan Pekerjaan	Kerjasama
IKK 9.13	Jumlah Mahasiswa Aktif	Akademik
IKK 9.14	Persentase Mahasiswa Drop Out	Akademik



C. Mewujudkan Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi

Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dari tujuan ketiga adalah melalui indikator kinerja sasaran program dan indikator kinerja sasaran kegiatan antara lain pembinaan pendidikan vokasi dan profesi

Sasaran Strategis (Outcome) / Indikator Kinerja Sasaran Program		Pemangku Kegiatan
I K S	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (<i>QS100 by subject</i>), bekerja sebagai praktisi di dunia industry, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir	Akademik, Kerjasama
	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industry dan dunia kerja; atau beraal dari kalangan praktisi profesional, dunia industry atau dunia kerja	Akademik, Kerjasama
	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen	Akademik
Kegiatan I		
SK I.1 (Output)		
Penelitian (PNBP/BLU Vokasi)		
IKK 1.1	Dosen yang memperoleh Hibah Bersaing penelitian dari berbagai sumber	Akademik, P2M
IKK 1.2	Hasil penelitian terapan dosen yang dipublikasikan	Akademik, P2M
IKK 1.3	Hasil penelitian Terapan Dosen yang dihilirisasi ke pasar/industry/masyarakat	Akademik, P2M
IKK 1.4	HAKI / Paten yang diperoleh	Akademik
IKK 1.5	Berapa penghargaan nasional yang dapat diperoleh dari aktifitas Tenaga Kependidikan	Kerjasama
IKK 1.6	Berapa penghargaan internasional yang dapat diperoleh dari aktifitas Tenaga Kependidikan	Kerjasama
IKK 1.7	Jumlah Publikasi Internasional	Akademik, P2M
IKK 1.8	Jumlah Jurnal Internasional Terakreditasi	Akademik, P2M
IKK 1.9	Jumlah Publikasi Nasional	Akademik, P2M
IKK 1.10	Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Nasional	Akademik, P2M
IKK 1.11	Jumlah Jurnal Nasional Terakreditasi	Akademik, P2M
IKK 1.12	Jumlah Produk Inovasi	Akademik, P2M
IKK 1.13	Jumlah Sitasi Karya Ilmiah	Akademik, P2M
IKK 1.14	Jumlah Prototipe Penelitian dan Pengembangan (Research and Development / R & D)	Akademik, P2M
IKK 1.15	Jumlah Prototipe Industri	Akademik, P2M
IKK 1.16	Persentase SDM R & D Yang Berkualifikasi Doktor	Akademik, P2M
SK I.2 (Output)		
Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU Vokasi)		
IKK 2.1	Jumlah Judul Pengabdian Dosen Kepada Masyarakat	Akademik, P3M
IKK 2.2	Jumlah Judul Hibah Pengabdian	Akademik, P3M
SK I.3 (Output)		
Pengembangan Mutu Sumber Daya Manusia Tenaga Pendidik		
IKK 3.1	Jumlah Dosen Tetap	Keuangan, Kepegawaian
IKK 3.2	Jumlah Dosen P3K	Keuangan, Kepegawaian
IKK 3.3	Jumlah Dosen dari PT lain/tidak tetap	Keuangan, Kepegawaian
IKK 3.4	Jumlah SDM Yang Meningkatkan Karirnya	Keuangan, Kepegawaian
IKK 3.5	Jumlah Dosen Bersertifikasi Pendidik (Serdos)	Keuangan, Kepegawaian
IKK 3.6	Jumlah Dosen Bersertifikat Kompetensi/Profesi	Keuangan, Kepegawaian
IKK 3.7	Ratio Jumlah Dosen Terhadap Jumlah Mahasiswa	Akademik
IKK 3.8	Ratio Dosen Tetap Terhadap Jumlah Dosen	Akademik, Kepegawaian
IKK 3.9	Persentase Dosen Politeknik berasal dari kalangan praktisi profesional atau industri	Akademik, Kepegawaian
IKK 3.10	Jumlah dosen berkualifikasi S2 dalam negeri	Akademik, Kepegawaian
IKK 3.11	Jumlah dosen berkualifikasi S2 luar negeri	Akademik, Kepegawaian
IKK 3.12	Jumlah dosen berkualifikasi S3 dalam negeri	Akademik, Kepegawaian



Kegiatan / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja Kegiatan		Pemangku Kegiatan
IKK 3.13	Jumlah dosen berkualifikasi S3 luar negeri	Akademik, Kepegawaian
IKK 3.14	Jumlah dosen yang naik pangkat dan golongan	Akademik, Kepegawaian
IKK 3.15	Jumlah Lektor Kepala	Akademik, Kepegawaian
IKK 3.16	Jumlah Guru Besar	Akademik, Kepegawaian
IKK 3.17	Jumlah Dosen Mengikuti Pelatihan Pekerti	Akademik, SPMI, P3AI
IKK 3.18	Jumlah Dosen Mengikuti Pelatihan AA	Akademik, SPMI, P3AI
IKK 3.19	Jumlah Dosen yang mengikuti short course di luar negeri	Akademik, SPMI, Kerjasama
IKK 3.20	Jumlah Dosen yang mengikuti pelatihan dan sertifikasi dosen di luar negeri	Akademik, SPMI, Kerjasama
IKK 3.21	Jumlah Dosen yang mengikuti Bridging Course	Akademik, SPMI, Kerjasama
IKK 3.22	Jumlah Dosen yang Magang ke Industri Dalam Negeri	Akademik, SPMI, Kerjasama
IKK 3.23	Jumlah Dosen yang Magang ke Industri Luar Negeri	Akademik, SPMI, Kerjasama
IKK 3.24	Jumlah Dosen Mengikuti Pelatihan/Workshop/Seminar/Konferensi ke PT di Dalam Negeri	Akademik, Keuangan, Kepegawaian
IKK 3.25	Jumlah Dosen Mengikuti Pelatihan/Workshop/Seminar/Konferensi ke PT di Luar Negeri	Akademik, Keuangan, Kepegawaian
IKK 3.26	Jumlah penghargaan nasional yang diraih tenaga kependidikan	Keuangan, Kepegawaian
IKK 3.27	Jumlah penghargaan Internasional yang diraih tenaga kependidikan	Keuangan, Kepegawaian
IKK 3.28	Jumlah dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain (nasional)	Akademik, Keuangan, Kepegawaian
IKK 3.29	Jumlah dosen yang berkegiatan tridharma di kampus QS 100 berdasarkan bidang ilmu	Akademik, Keuangan, Kepegawaian
SK 1.4 (Output)	Layanan Pendidikan	
IKK 4.01	Jumlah dosen yang bekerja sebagai praktisi di DUDI	Akademik, Kerjasama
IKK 4.02	Jumlah dosen yang membina mahasiswa dan berhasil meraih prestasi tingkat nasional dalam 5 tahun terakhir	Akademik, Kemahasiswaan
IKK 4.03	Jumlah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi dan diakui oleh DUDI	Akademik, Kerjasama
IKK 4.04	Jumlah dosen yang berasal dari kalangan praktisi profesional	Akademik, Kerjasama
IKK 4.05	Jumlah dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan berhasil mendapat rekognisi nasional	P2M
IKK 4.06	Praktisi DU/DI yang mengajar di kampus	Akademik, Kerjasama
IKK 4.07	Dosen yang menerapkan metode pembelajaran PBL	Akademik
IKK 4.08	Jumlah Dosen Tetap Non PNS	Kepegawaian
IKK 4.09	Jumlah Dosen Luar Biasa	Kepegawaian

D. Mewujudkan Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran

Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dari tujuan keempat adalah melalui indikator kinerja sasaran program dan indikator kinerja sasaran kegiatan antara lain pembinaan pendidikan vokasi dan profesi

Sasaran Strategis (Outcome) / Indikator Kinerja Sasaran Program		Pemangku Kegiatan
I K S	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerjasama dengan mitra	Akademik
	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah	Akademik
	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team based project</i>) sebagian bobot evaluasi	Akademik
Kegiatan I	Pembinaan Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi	
SK 1.1 (Output)	Dukungan Operasional PTN (BOPTN/Vokasi)	
IKK 1.1	Jumlah Pembukaan Program Studi Baru	Akademik
IKK 1.2	Persentase Program Studi Terakreditasi Unggul	Akademik
IKK 1.3	Persentase Program Studi Terakreditasi Minimal Sangat Baik	Akademik



Kegiatan / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja Kegiatan		Pemangku Kegiatan
IKK 1.4	Jumlah prodi yang melibatkan praktisi profesional industri dalam proses pembelajaran dan perkuliahan	Akademik, Kerjasama
IKK 1.5	Program Studi Mendapat Fasilitas dan Bimbingan Teknis SPMI	Akademik
SK 1.2 (Output)	Peningkatan Layanan Mutu Pendidikan Tinggi	
IKK 2.1	Dokumen Pelaksanaan Audit SPMI	Akademik, SPMI
IKK 2.2	Dokumen Instrumen Uji Kompetensi	Akademik, SPMI
IKK 2.3	Laporan Penyelenggaraan Uji Kompetensi	Kerjasama, LSP
IKK 2.4	Jumlah Program Studi Penyelenggara Uji Kompetensi	Kerjasama, LSP
IKK 2.5	Penghargaan yang diraih tingkat internasional	Akademik
IKK 2.6	Penghargaan yang diraih tingkat nasional	Akademik
IKK 2.7	Jumlah Kerja Sama dengan Dunia Kerja (DU/DI) dalam negeri	Kerjasama
IKK 2.8	Jumlah Kerja Sama dengan Dunia Kerja (DU/DI) Luar negeri	Kerjasama
IKK 2.9	Survei Kepuasan Masyarakat dan Industri	Kerjasama
IKK 2.10	Jumlah dan jenis media informasi dan publikasi	Keuangan, Kerjasama
IKK 2.11	Jumlah Follower pada Akun Sosial Media	Keuangan, Kerjasama
IKK 2.12	Jumlah Subscriber pada Akun Youtube Official	Keuangan, Kerjasama
IKK 2.13	Laporan Pengelolaan Data dan Informasi (PDPT)	Akademik
IKK 2.14	Jumlah Laboratorium Terakreditasi	Akademik
IKK 2.15	Jumlah Kalibrasi Peralatan Fungsional	Akademik, Keuangan
SK 1.3 (Output)	Layanan BOPTN Non Penelitian	
IKK 3.1	Layanan Langganan Daya dan Jasa Lainnya	Keuangan
IKK 3.2	Jumlah Tenaga Admin, Teknisi Non PNS, Sopir, Satpam dan Cleaning Service	Keuangan
SK 1.4 (Output)	Dukungan Layanan Pembelajaran PNB/BLU Vokasi	
IKK 4.1	Jumlah lulusan yang terserap di dunia kerja/bekerja satu tahun setelah lulus	Kemahasiswaan, Kerjasama
IKK 4.2	Jumlah lulusan yang terserap dengan wirasaha satu tahun setelah lulus	Kemahasiswaan, Kerjasama
IKK 4.3	Jumlah Mahasiswa yang lulus dan melanjutkan ke Perguruan Tinggi	Kemahasiswaan, Kerjasama
IKK 4.4	Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA)	Kemahasiswaan, Kerjasama
IKK 4.5	Kampus Mengajar Mahasiswa D4	Kemahasiswaan, Kerjasama
IKK 4.6	Mahasiswa yang dimagangkan ke Perusahaan Luar Negeri	Kemahasiswaan, Kerjasama
IKK 4.7	Mahasiswa yang dimagangkan ke Perusahaan Dalam Negeri	Kemahasiswaan, Kerjasama
IKK 4.8	Mahasiswa yang magang bersertifikat kampus merdeka (microcedensial bermagang) Mahasiswa D4/D3/D2	Kemahasiswaan, Kerjasama
IKK 4.9	Mahasiswa mengikuti studi Independent bersertifikat kampus merdeka (microcedensial non magang) Mahasiswa D4/D3/D2	Kemahasiswaan, Kerjasama
IKK 4.10	Jumlah Mahasiswa yang memperoleh sertifikat kompetensi dalam negeri dalam satu tahun	Kemahasiswaan, Kerjasama
IKK 4.11	Jumlah Mahasiswa yang memperoleh sertifikat kompetensi luar negeri dalam satu tahun	Kemahasiswaan, Kerjasama
SK 1.5 (Output)	Sarana Prasarana Pembelajaran (BOPTN Vokasi)	
IKK 5.1	Reviu DED dan Master Plan	Keuangan
IKK 5.2	Pengadaan Bangunan/Gedung Bertingkat	Keuangan
IKK 5.3	Pengadaan Bangunan Bertingkat/Sederhana lainnya	Keuangan

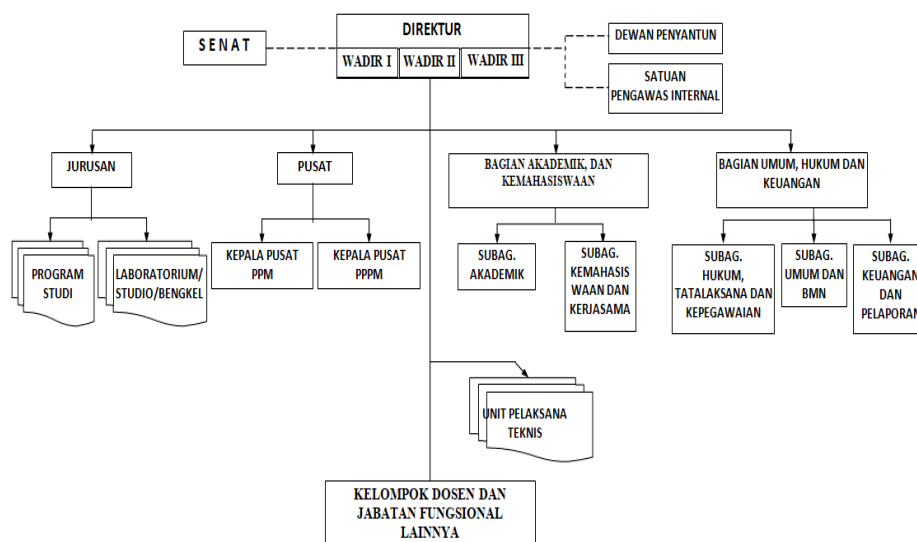
3.2.2. Kerangka Kelembagaan Politeknik Negeri Kupang

Dalam rangka mencapai visi, misi dan strategi Politeknik Negeri Kupang sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya harus didukung oleh kerangka kelembagaan yang mencakup struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil Negara yang efektif dan efisien, dengan memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh Kemendikbud. Kerangka kelembagaan dimaksudkan agar penataan organisasi sejalan dan mendukung pencapaian sasaran strategis, serta mendorong efektifitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi dan ketepatan proses (tata laksana) organisasi.

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai oleh Politeknik Negeri Kupang Tahun 2020-2024, ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis dalam mendukung program pendidikan vokasi yaitu (1) Peningkatan Sistem Tata Kelola Manajemen dan Kualitas pendidikan Vokasi Berstandar Industri; (2) Peningkatan Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi; (3) Peningkatan Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi; dan (4) Peningkatan Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran.

3.2.2.1. Struktur Organisasi Politeknik Negeri Kupang

Mengacu pada tugas dan fungsi Politeknik Negeri Kupang yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 28 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Kupang, maka Struktur Organisasi Politeknik Negeri Kupang adalah seperti yang tergambar pada Gambar 3.4 berikut ini:



Gambar 3.4 Struktur Organisasi Politeknik Negeri Kupang

Seperti yang terlihat pada Gambar 3.4 di atas, dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Politeknik Negeri Kupang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dengan fungsi antara lain : pengembangan pendidikan tinggi vokasi dan vokasi; penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi; pengabdian kepada masyarakat; pembinaan civitas akademika dan hubungan dengan lingkungan; dan pelaksanaan kegiatan administrasi didukung oleh unsur pelaksana akademik, pelaksana



administrasi, pendukung dan penunjang akademik yang berjumlah 19 (Sembilan belas) Unit sebagai berikut: **(1)** unsur pelaksana akademik : Jurusan (6 Unit) serta Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (1 Unit); **(2)** unsur pelaksana administrasi : Bagian Akademik dan Kemahasiswaan (1 Unit), serta Bagian Umum, Hukum dan Keuangan (1 Unit); **(3)** unsur pendukung : Pusat Pengembangan, Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (1 Unit) dan Satuan Pengawas Internal (1 Unit); dan **(4)** unsur penunjang akademik : Unit Pengadaan Barang Jasa (1 Unit), UPT Perpustakaan (1 Unit), UPT TIK (1 Unit), UPT Pemeliharaan dan Perbaikan (1 Unit), UPT Pengembangan Karier dan Kewirausahaan (1 Unit), UPT Bahasa (1 Unit), LSP (1 Unit) dan Kerjasama Internasional (1 Unit).

Setiap Unit tersebut di atas memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan spesifik seperti Jurusan memiliki tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan vokasi dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung studi. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat memiliki tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan memiliki tugas melaksanakan pelayanan di bidang akademik, kemahasiswaan, kerjasama, hubungan masyarakat dan alumni. Bagian Umum, Hukum dan Keuangan memiliki tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, perencanaan, kerjasama, hubungan masyarakat, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian dan keuangan. Pusat Pengembangan, Pembelajaran dan Penjaminan Mutu memiliki tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran serta penjaminan mutu. Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur penunjang penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Politeknik Negeri Kupang yang meliputi UPT Perpustakaan merupakan unit pelaksanaan teknis di bidang perpustakaan; UPT TIK merupakan unit pelaksanaan teknis di bidang pengembangan dan pengelolaan sistem dan teknologi informasi dan komunikasi; UPT Bahasa merupakan unit pelaksanaan teknis di bidang pengembangan pembelajaran dan layanan kebahasaan; UPT Teknologi Permesinan dan Peralatan Penunjang Akademik merupakan unit pelaksanaan teknis di bidang pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan mesin dan peralatan penunjang akademik; UPT Pengembangan Karier dan Kewirausahaan merupakan unit pelaksanaan teknis di bidang pengembangan karier dan kewirausahaan; Unit Layanan Uji Kompetensi / LSP merupakan unit pelaksanaan teknis di bidang layanan uji kompetensi; Satuan Pengawas Internal merupakan unit pelaksanaan teknis di bidang pengawasan terhadap layanan nonakademik untuk dan atas nama direktur; Unit Kerjasama Internasional merupakan unit pelaksanaan teknis di bidang kerjasama internasional; dan Unit Pengadaan Barang Jasa merupakan unit pelaksanaan teknis di bidang pengadaan barang dan jasa.

3.2.2.2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi

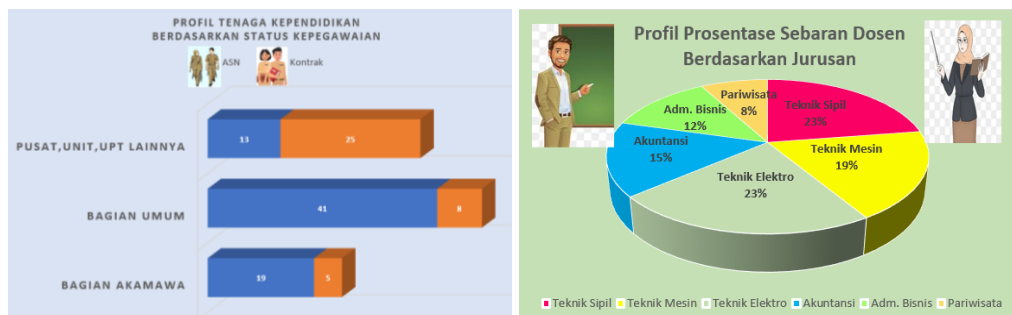
Kebijakan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Politeknik Negeri Kupang dilakukan menyeluruh berdasarkan dokumen *beezeeting* dalam rangka memastikan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berintegrasi, profesional dan kompeten berdasarkan sistem seleksi pegawai yang ditetapkan Kementerian PAN-RB dalam mendukung pencapaian tujuan Politeknik Negeri Kupang. Kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang Politeknik Negeri Kupang diharapkan dapat mewujudkan birokrasi yang memenuhi Roadmap SDM kementerian yang memiliki kompetensi integritas, nasionalisme, berwawasan global, *hospitality*, *networking*, dan entrepreneurship.

Strategi pencapaian ketersediaan dan pengelolaan SDM di lingkup Politeknik Negeri Kupang berdasarkan proses rekrutmen yang transparan sehingga dihasilkan ASN yang berkualitas, peningkatan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan organisasi dan penerapan penghargaan dan sanksi dalam rangka meningkatkan kinerja ASN.

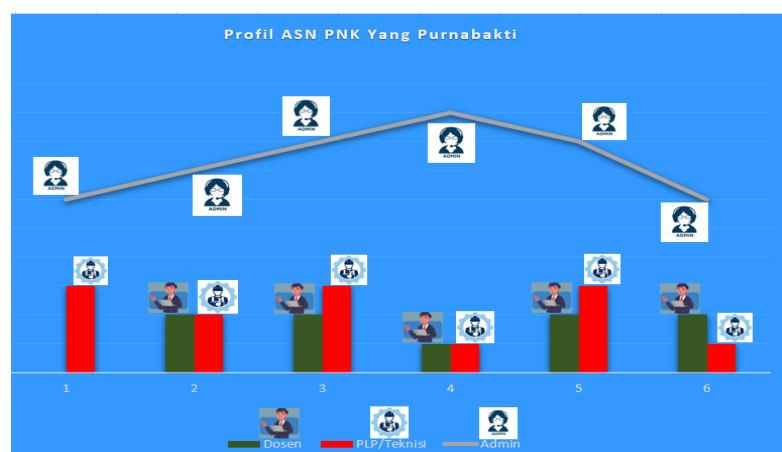
a. Kondisi Aparatur Sipil Negara Politeknik Negeri Kupang Tahun 2022

Keberadaan sumber daya manusia dilingkup Politeknik Negeri Kupang saat ini berjumlah 348 orang yang terdiri dari tenaga pendidik, tenaga kependidikan, instruktur/PLP/Teknisi, tenaga kependidikan lainnya yang tergambarkan dalam gambar 3.5 dan gambar 3.6 dibawah ini.

Gambar 3.5. Jumlah ASN Politeknik Negeri Kupang Tahun 2022



Gambar 3.6 Jumlah ASN PNK Yang Memasuki Purnabakti Tahun 2020-2025



Berdasarkan profil ASN yang purnabakti sesuai tabel 3.4 dapat dijelaskan sebagai berikut : kondisi untuk tahun 2020, jumlah ASN Politeknik Negeri Kupang yang memasuki masa purnabakti berjumlah 12 orang terdiri dari unsur PLP/Teknisi (3 orang) dan Tenaga

Kependidikan (9 orang). Tahun 2021 jumlah ASN yang purnabakti berjumlah 11 orang terdiri dari unsur Dosen (2 orang), PLP/Teknisi (2 orang) dan Tenaga Kependidikan (7 orang). Tahun 2022 jumlah ASN yang purnabakti berjumlah 13 orang terdiri dari unsur Dosen (2 orang), PLP/Teknisi (3 orang) dan Tenaga Kependidikan (8 orang). Tahun 2023 jumlah ASN yang purnabakti berjumlah 11 orang terdiri dari unsur Dosen (1 orang), PLP/Teknisi (1 orang) dan Tenaga Kependidikan (9 orang). Tahun 2024 jumlah ASN yang purnabakti berjumlah 13 orang terdiri dari unsur Dosen (2 orang), PLP/Teknisi (3 orang) dan Tenaga Kependidikan (8 orang) sementara Tahun 2025 jumlah ASN yang purnabakti berjumlah 9 orang terdiri dari unsur Dosen (2 orang), PLP/Teknisi (1 orang) dan Tenaga Kependidikan (6 orang). Selama periodisasi Renstra Politeknik Negeri Kupang 2020-2024 jumlah ASN yang memasuki masa purnabakti mencapai 48 orang. Kondisi ini perlu didukung dengan upaya pemenuhan kebutuhan tenaga pengelola manajemen kampus baik pada level eselon, jabatan fungsional dosen, jabatan fungsional tertentu serta jabatan pengelola sesuai regulasi rekrutmen yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

b. Proyeksi Kebutuhan ASN Tahun 2020-2024

Proyeksi kebutuhan/Bezzetting CPNS telah diperhitungkan Tim Baperjakat Politeknik Negeri Kupang dengan mengalokasikan kebutuhan CPNS berdasarkan skala kebutuhan dan formasi yang ditetapkan sebagaimana table diatas. Total proyeksi kebutuhan CPNS berjumlah 271 orang hingga akhir periodisasi renstra tahun 2020-2024.

Tabel. 3.2 Proyeksi Bezzetting CPNS PNK Tahun 2021-2024

No	Tahun	Proyeksi Bezzetting CPNS PNK 2021-2024								Jumlah
		Esl. III/IV		JF Dosen		JFT		JP		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	2021	3	0	20	10	6	3	20	8	70
2	2022	0	0	15	15	7	2	18	10	67
3	2023	0	0	21	9	4	5	14	14	67
4	2024	0	0	12	18	5	4	15	13	67
Total		3	0	68	52	22	14	67	45	271

3.2.2.3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Kebijakan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak berbeda dengan sistem pengelolaan yang dijalankan kementerian yang dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas, profesional, dan kompeten berdasarkan sistem merit sesuai bidang tugasnya sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan Kemendikbud.

Dalam periodisasi renstra lembaga dalam rangka mewujudkan birokrasi yang berkualitas sesuai dengan *Roadmap* SDM secara nasional. Untuk memastikan ketersediaan SDM tersebut, strategi utama yang dilakukan dalam pengelolaan SDM adalah melalui proses rekrutmen

yang transparan untuk mendapatkan *talent* terbaik, peningkatan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan organisasi, serta penerapan sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) dalam rangka meningkatkan kinerja seluruh ASN.

Tabel. 3.3 Roadmap SDM PNK Tahun 2020-2024

No	Sasaran Strategi	Uraian Kegiatan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Mewujudkan Sistem Tata Kelola Manajemen dan Kualitas Pendidikan Vokasi Berstandar Industri	Jumlah Tenaga Kependidikan yang bersertifikat Kompetensi (Fungsional)	54	56	56	60	65
		Jumlah Tenaga Kependidikan Mengikuti Diklat Kompetensi (Teknisi/PLP)	6	9	12	15	21
		Tenaga kependidikan (Non Dosen) yang ditingkatkan kompetensinya	0	6	15	24	30
2	Mewujudkan Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi	Jumlah Dosen Bersertifikasi Pendidik (Serdos)	194	197	222	237	267
		Jumlah Dosen Bersertifikat Kompetensi/Profesi	79	79	26	74	102
		Jumlah Dosen yang mengikuti short course di luar negeri	0	0	5	10	12
		Jumlah Dosen yang mengikuti pelatihan dan sertifikasi dosen di luar negeri	0	0	2	4	7
		Jumlah Dosen yang mengikuti Bridging Course	0	0	3	5	9
		Jumlah Dosen yang Magang ke Industri Dalam Negeri	0	1	2	4	6
		Jumlah Dosen yang Magang ke Industri Luar Negeri	0	0	0	5	6
		Jumlah Dosen Mengikuti Pelatihan/Workshop/Seminar/Konferensi ke PT di Dalam Negeri	10	20	35	40	45
		Jumlah Dosen Mengikuti Pelatihan/Workshop/Seminar/Konferensi ke PT di Luar Negeri	0	0	2	5	10

3.2.2.4. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi menjadi salah satu langkah pemerintah untuk mewujudkan *good governance* dan melakukan pembaharuan serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dimana uang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam penerapan reformasi birokrasi pada pemerintah baik pada kementerian, lembaga serta pemerintah daerah harus didukung dengan langkah-langkah yang tepat, sinergis dan berkelanjutan. Langkah-langkah tersebut dimuat kedalam Road Map Reformasi Birokrasi yang menjadi acuan dalam penerapan dan pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah.

Road Map Reformasi birokrasi tersebut harus disusun berdasarkan sasaran yang ingin dicapai dalam Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 sesuai Peraturan Menteri PANRB No. 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 yakni 1. *Birokrasi yang bersih dan akuntabel*; 2. *Birokrasi yang efektif dan efisien*; serta 3. *Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas*. Sasaran tersebut selanjutnya menjadi fokus dalam penentuan strategi serta penerpaan program dan kegiatan sesuai dengan kondisi yang ada pada instansi pemerintah. Selain itu, road map juga memuat isu strategis dan rencana aksi yang dilakukan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.



Rencana aksi memuat strategi dan program Reformasi Birokrasi yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di berbagai kebijakan dalam delapan area perubahan reformasi birokrasi yakni : Mental Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja, Kelembagaan, Tatalaksana, SDM Aparatur, Peraturan Perundangan-Undangan dan Pelayanan Publik.

1) Mental Aparatur

Salah satu sumber permasalahan birokrasi adalah perilaku negatif yang ditunjukkan dan dipraktikkan oleh para birokrat. Perilaku ini mendorong terciptanya citra negatif birokrasi. Perilaku yang sudah menjadi mental model birokrasi yang dipandang lambat, berbelit-belit, tidak inovatif, tidak peka, inkonsisten, malas, feodal, dan lainnya.

2) Karena itu, fokus perubahan reformasi birokrasi ditujukan pada perubahan mental aparatur dengan harapan mendorong terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas.

3) Pengawasan

Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi, salah satu penyebabnya adalah lemahnya sistem pengawasan. Kelemahan sistem pengawasan mendorong tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku negatif lainnya yang semakin lama semakin menjadi, sehingga berubah menjadi sebuah kebiasaan. Karena itu perubahan perilaku koruptif aparatur harus pula diarahkan melalui perubahan atau penguatan sistem pengawasan.

4) Akuntabilitas

Kemampuan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan berbagai sumber yang diberikan kepadanya bagi kemanfaatan publik seringkali menjadi pertanyaan masyarakat. Pemerintah dipandang belum mampu menunjukkan kinerja melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mampu menghasilkan outcome (hasil yang bermanfaat) bagi masyarakat. Karena itu, perlu diperkuat penerapan sistem akuntabilitas yang dapat mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya.

5) Kelembagaan

Kelembagaan pemerintah dipandang belum berjalan secara efektif dan efisien. Struktur yang terlalu gemuk dan memiliki banyak hirarki menyebabkan timbulnya proses yang berbelit, kelambatan pelayanan dan pengambilan keputusan, dan akhirnya menciptakan budaya feodal pada aparatur. Karena itu, perubahan pada sistem kelembagaan akan mendorong efisiensi, efektivitas, dan percepatan proses pelayanan dan pengambilan keputusan dalam birokrasi. Perubahan pada sistem kelembagaan diharapkan akan dapat mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien.



6) Tatalaksana

Kejelasan proses bisnis/tatakerja/tatalaksana dalam instansi pemerintah juga sering menjadi kendala penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai hal yang seharusnya dapat dilakukan secara cepat seringkali harus berjalan tanpa proses yang pasti karena tidak terdapat sistem tatalaksana yang baik. Hal ini kemudian mendorong terciptanya perilaku hirarkis, feodal, dan kurang kreatif pada birokrat/aparatur. Karena itu, perubahan pada sistem tatalaksana sangat diperlukan dalam rangka mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, sekaligus juga untuk mengubah mental aparatur.

7) SDM Aparatur

Sistem manajemen SDM yang tidak diterapkan dengan baik mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan, hingga pemberhentian akan berpotensi menghasilkan SDM yang tidak kompeten. Hal ini akan berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan. Karena itu, perubahan dalam pengelolaan SDM harus selalu dilakukan untuk memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional.

8) Peraturan Perundang-Undangan

Masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, disharmonis, dapat disinterpretasi berbeda atau sengaja dibuat tidak jelas untuk membuka kemungkinan penyimpangan. Kondisi seperti ini seringkali dimanfaatkan oleh aparatur untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan negara. Karena itu, perlu dilakukan perubahan/penguatan terhadap sistem peraturan perundang-undangan yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat.

9) Pelayanan Publik

Penerapan sistem manajemen pelayanan belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan, yang lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas, dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas pelayanan. Karena itu, perlu dilakukan penguatan terhadap sistem manajemen pelayanan publik agar mampu mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta peningkatan kualitas pelayanan.

Berdasarkan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi sebagaimana penjelasan diatas, Politeknik Negeri Kupang telah melaksanakan kebijakan institusi sebagai berikut : a) Kinerja Politeknik Negeri Kupang setiap tahunnya selalu disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) berdasarkan indikator kinerja yang diperjanjikan diawal tahun, b) Dalam rangka penataan kelembagaan pemerintah mendorong efisiensi, efektivitas, dan percepatan proses pelayanan dan pengambilan keputusan dalam birokrasi, Politeknik Negeri Kupang telah mengajukan usulan perubahan OTK dengan diterbitkannya OTK yang baru berdasarkan Kepmendikbud Nomor 28 Tahun 2020, c) Penerapan sistem layanan berbasis elektronik dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga, d) SDM Aparatur setiap tahunnya telah dilakukan analisis kebutuhan ASN dalam rangka menutupi keterbatasan personil akibat memasuki masa purnabakti maupun tuntutan ratio kebutuhan tenaga pendidik dengan jumlah mahasiswa

yang semakin bertambah setiap tahunnya. e) Menindaklanjuti Kepmendikbud tentang OTK Politeknik Negeri Kupang yang baru, telah dirumuskan turunan peraturan Direktur sesuai OTK sebagai pedoman penyelenggaraan kehidupan kampus, f) Menunjang akses pelayanan public telah diberlakukan SMS Maskin dan sejumlah sistem aplikasi berupa Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru berbasis Web, Heregistrasi Mahasiswa selain aplikasi outsorcing lainnya seperti PD-Dikti.



Gambar 3.7 Tampilan Kampus II PNK

Berdasarkan Desain Berulang Parsial telah dilakukan Reviu Pengulangan Kedua terhadap DED dan Master Plan Kampus 2 dengan rancangan pengembangan lahan diperuntukan bagi pembangunan prasarana antara lain : Bangunan/Gedung Kuliah 7 lantai, 2) Gedung Training Centre 5 lantai, 3) Gedung Exhibition 3 lantai, 4) Laboratorium/Bengkel sejumlah Prodi, 5) Vanue Olahraga, 6) Rumah Gardu, dan 7) Pagar Kampus II.

Gambar 3.8 Rancang Bangun Lahan Kampus II PNK



Gapura Kampus



Gedung Direktorat/Pusat Data Centre



Gedung Exhibition Hall



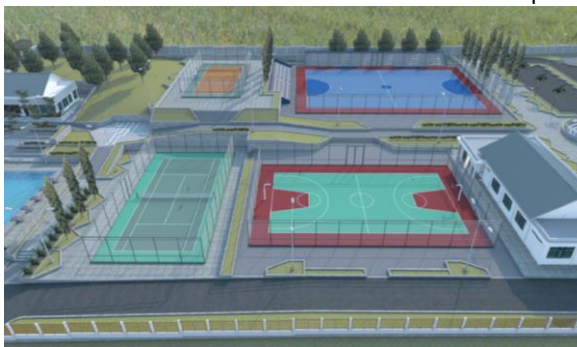
Gedung Training Center



Gedung Laboratorium/Bengkel Terpadu



Spot Olahraga



Spot Olahraga



Demikian halnya dengan penataan interior dan sarana penunjang perkantoran dan pembelajaran pada Gedung Kuliah (Training Centre) termasuk ruangan Auditorium (Exchebition) yang disajikan dalam gambar 3.9 dibawah ini.

Gambar 3.9 Model Desain Interior





BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Berdasarkan sasaran strategis Politeknik Negeri Kupang dalam mewujudkan misi yang telah ditetapkan untuk periode 2020-2024 serta mendukung sasaran strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Politeknik Negeri Kupang menetapkan empat sasaran strategis yang ingin dicapai yang mencerminkan keberhasilan dan keberlanjutan dari program yang telah ditetapkan. Tingkat keberhasilan pencapaian atas saran strategis dan program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program. Penjabaran Indikator Kinerja Sasaran Strategis Politeknik Negeri Kupang dan Target Kinerja yang akan dicapai pada periode 2020-2024 tercantum dalam Tabel 4.1 dibawah ini.

Tabel 4.1 Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja
Politeknik Negeri Kupang Tahun 2020-2024

Sasaran / Indikator	Sasaran Strategis	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SS 1	Mewujudkan Sistem Tata Kelola Manajemen dan Kualitas Pendidikan Vokasi Berstandar Industri						
IKSS 1.1	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB
IKSS 1.2	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-KL Satker minimal 93	Nilai	93	94	98,0	98,1	98,5
Kegiatan I	Meningkatkan Kualitas Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis						
SK I.1 (Output)	Layanan Perkantoran						
IKK 1.01	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	Org	336	339	407	410	415
IKK 1.02	Jumlah Tenaga Kependidikan ASN Penerima Tunjangan Kinerja Pegawai	Org	130	135	140	146	151
IKK 1.03	Jumlah Dosen Penerima Sertifikasi Dosen	Org	194	197	222	237	267
SK I.2 (Output)	SDM Penggerak Tata Kelola						
IKK 2.01	Presentase Nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran)	%	0	93	95	96	98
IKK 2.02	Presentase Nilai EKA (Evaluasi Kinerja Anggaran)	%	0	93	95	96	98
IKK 2.03	Presentase Daya Serap Anggaran Tahunan	%	84,56	90,21	90,50	90,75	92,00
IKK 2.04	Presentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	%	94,11	88,01	93,72	98,99	98,99
IKK 2.05	Penerimaan Hibah	Nominal	0	0	0	0	0
IKK 2.06	Presentase Capaian Serapan SBSN	%	0	0	0	0	0
IKK 2.07	Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di kampus	SK	0	0	1	1	1
IKK 2.08	Target Keindahan, Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan di kampus	Dokumen	0	0	1	1	1
IKK 2.09	Nilai score SINDE dari Biro Umum Kemdikbudristek	%	0	0	75%	80%	85%
IKK 2.10	Jenis urusan manajemen kampus berbasis digital	Dokumen	0	0	10	20	30
IKK 2.11	Jumlah upaya yang dilakukan untuk Meningkatkan Daya Tarik Kampus	Dokumen	2	2	5	10	15
IKK 2.12	Pembentukan Tim Humas	SK	1	1	1	1	1
IKK 2.13	Jumlah Tenaga Kependidikan yang Bersertifikat Kompetensi (Fungsional)	Orang	54	56	56	60	65
IKK 2.14	Jumlah Tenaga Kependidikan Mengikuti Diklat Kompetensi (Teknisi/PLP)	Orang	6	9	12	15	21
IKK 2.15	Tenaga kependidikan (Non Dosen) yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	0	6	15	24	30
IKK 2.16	Persentase Kuantitas Tindak Lanjut Temuan Inspektorat	%	50%	60%	70%	75%	80%



Sasaran / Indikator	Sasaran Strategis	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
IKK 2.17	Persentase Tindak Lanjut Bernilai Rupiah Temuan Inspektorat	%	0,69%	0,66%	0,64%	0,63%	0,62%
IKK 2.18	Penyelesaian temuan BPK-RI	Temuan	0	0	5	3	0
IKK 2.19	Publikasi pemberitaan/sosialisasi yang dilaksanakan secara digital	Konten	0	0	10	20	30
IKK 2.20	Publikasi pemberitaan/sosialisasi yang dilaksanakan secara konvensional	Konten	0	0	5	5	5
IKK 2.21	Persentase Laporan LHKPN	%	3,31%	3,32%	3,33%	3,34%	3,36%
IKK 2.22	Persentase Laporan LHKS	%	92,00%	93,00%	94,00%	95,00%	96,00%
IKK 2.23	Jumlah pimpinan pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti pelatihan manajemen bisnis berbasis industry	Org	1	1	1	1	1
SK I.3 (Output)	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Evaluasi, Serta Akuntabilitas dan Pencapaian Kinerja						
IKK 3.1	Dokumen Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	Dok	1	1	1	1	1
IKK 3.2	Dokumen Penyusunan Standar Satuan Biaya Pendidikan Tinggi (UKT)	Dok	1	1	1	1	1
IKK 3.3	Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran (SPASIKITA)	Dok	4	4	4	4	4
IKK 3.5	Laporan Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Lap	4	4	4	4	4
IKK 3.6	Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIN)	Dok	1	1	1	1	1
SK I.4 (Output)	Layanan Internal (Overhead)						
IKK 4.1	Jumlah Layanan Pengadaan Perlengkapan Operasional Perkantoran	Unit	12	12	12	12	12
IKK 4.2	Pengadaan Kendaraan Operasional Pimpinan dan Perkantoran	Unit	0	0	0	0	1
IKK 4.3	Jumlah Kendaraan Operasional Roda 4 dan 6	Unit	1	1	2	4	4
IKK 4.4	Jumlah Kendaraan Operasional Roda 2	Unit	0	0	2	3	3
IKK 4.5	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi	Set	0	1	1	1	1
IKK 4.6	Pengadaan Aplikasi Sistem e-Layanan	System	1	1	1	1	1
Kegiatan II	Pembinaan Pendidikan Vokasi dan Profesi						
SK II.1 (Output)	Dukungan Operasional PTN (BOPTN/Vokasi)						
IKK 1.1	Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	Layanan	12	12	12	12	12
IKK 1.2	Operasional Penyelenggaraan Perkantoran	Layanan	12	12	12	12	12
SK II.2 (Output)	Pengembangan Kelembagaan						
IKK 2.1	Jumlah institusi pendidikan tinggi vokasi mendapatkan pembinaan menuju BLU	Satker	0	0	0	0	1
IKK 2.2	Jumlah Satker yang dibina menuju WBK	Satker	0	0	1	1	1
SS 2	Mewujudkan Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi						
IKSS 2.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	%	55	55	55	55	55
IKSS 2.2	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 SKS diluar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	%	10	10	15	15	16
Kegiatan I	Pembinaan Pendidikan Vokasi dan Profesi						
SK I.1 (Output)	Layanan Pembelajaran (BOPTN Vokasi)						
IKK 1.01	Dukungan Pengadaan Bahan Praktikum Jurusan	Jurusan	6	6	6	6	6
IKK 1.02	Dukungan Pengadaan Bahan Kuliah Jurusan	Jurusan	6	6	6	6	6
IKK 1.03	Dukungan Pengadaan Tools Praktikum Jurusan	Jurusan	6	6	6	6	6
SK I.2 (Output)	Buku Perpustakaan (BOPTN Vokasi)						
IKK 2.01	Pengadaan Literasi, CD Pembelajaran dan Buku Perpustakaan	Paket	0	1	0	1	1
IKK 2.02	Pengadaan Bahan Pustaka dan Jurnal	Paket	0	0	1	1	1



Sasaran / Indikator	Sasaran Strategis	Satuan	Target				
SK I.3 (Output)	Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola. Kelembagaan dan SDM(BOPTN Vokasi)						
IKK 3.01	Dokumen Pelaksanaan Audit SPI	Dok	6	6	6	6	6
IKK 3.02	Dokumen Pelaksanaan Audit SPMI	Dok	6	6	6	6	6
SK I.4 (Output)	Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN Vokasi)						
IKK 4.01	Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran	Unit	1	1	1	1	1
IKK 4.02	Pengadaan Meubelair Pendukung Layanan Pembelajaran	Unit	1	1	1	1	1
IKK 4.03	Pemeliharaan Sarana Prasarana Pembelajaran	Dokumen	1	1	1	1	1
SK I.5 (Output)	Layanan Kegiatan Kemahasiswaan (BOPTN Vokasi)						
IKK 5.01	Jumlah Pembinaan Unit Kegiatan Mahasiswa	UKM	2	3	4	4	5
IKK 5.02	Jumlah Mahasiswa Berprestasi Dalam Minat dan Bakat	MHS	1	2	3	4	5
IKK 5.03	Jumlah Mahasiswa Berprestasi Dalam Penalaran Akademik	MHS	0	1	2	3	4
IKK 5.04	Hasil Karya penelitian terapan Mahasiswa (Berupa Produk)	Judul/Mhs	241	338	419	450	479
IKK 5.05	Hasil karya penelitian terapan mahasiswa yang dapat dihilirisasi ke pasar/masyarakat/industri	Judul/Mhs	0	0	10	15	20
IKK 5.06	Forum ajang kreatifitas mahasiswa yang dilaksanakan di kampus	Kegiatan	0	0	2	4	6
IKK 5.07	Ajang kreatifitas mahasiswa yang diikuti diluar kampus	Event	0	0	1	1	1
SK I.6 (Output)	Layanan Pendidikan (PNBP/BLU Vokasi)						
IKK 6.01	Penerimaan Mahasiswa	Mhs	2000	2100	2200	2300	2400
IKK 6.02	Peningkatan Jumlah Mahasiswa	Mhs	7.278	8.955	9.972	10.120	11.225
IKK 6.03	Mahasiswa yang memperoleh beasiswa	Mhs	1.807	1.328	2.321	2.410	2.550
IKK 6.04	Mahasiswa yang diluluskan	Mhs	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
IKK 6.05	Jumlah mahasiswa yang mengikuti program D2 Fast Track	Mhs	0	0	0	0	0
IKK 6.06	Pabrik Wirausaha – Mahasiswa D4/D3/D2	Produk	0	0	0	1	2
IKK 6.07	Dokumen Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru	Lap	1	1	1	1	1
IKK 6.08	Dokumen Bantuan Beasiswa Swadana	Lap	1	1	1	1	1
IKK 6.09	Dukungan Pembinaan Unit Organisasi Kemahasiswaan (BEM/BLM, UKM Kerohanian, HMJ)	Lap	2	3	4	4	5
IKK 6.10	Dukungan Pembinaan Penalaran Keilmuan/ Kerjasama Berbasis Pendidikan (Kompetisi Internal Jurusan, Remedial Course, Workshop ESP, Seminar Jurusan)	Lap	9	9	9	9	9
IKK 6.11	Dukungan Kewirausahaan Mahasiswa	Lap	1	1	1	1	1
IKK 6.12	Dokumen Seminar/Pelatihan/Workshop PSDM Tenaga Pendidik	Lap	1	1	1	1	1
IKK 6.13	Dokumen Penyelenggaraan Tugas Tambahan dan KJM Dosen	Dok	2	2	2	2	2
SK I.7 (Output)	Sarana Prasarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU Vokasi)						
IKK 7.01	Pengadaan Tambahan Peralatan Pendukung Layanan Perkantoran	Unit	1	1	1	1	1
IKK 7.02	Pengadaan Meubelair Pendukung Layanan Perkantoran	Unit	1	1	1	1	1
IKK 7.03	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran	Dokumen	1	1	1	1	1
SK I.8 (Output)	Dukungan Layanan Pembelajaran (PNBP/BLU Vokasi)						
IKK 8.01	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran	Layanan	4	4	4	4	4
IKK 8.02	Laporan Kinerja Tenaga Kependidikan Non PNS	Lap	1	1	1	1	1
IKK 8.03	Dokumen/Laporan Sistem Tata Kelola dan Kelembagaan	Lap	2	2	3	3	4
SK I.9 (Output)	Peningkatan Layanan Kemahasiswaan dan Penyiapan Karir						
IKK 9.01	Berapa penghargaan/prestasi nasional yang dapat diperoleh dari aktifitas mahasiswa	Prestasi	0	0	10	15	20
IKK 9.02	Berapa penghargaan/prestasi internasional yang dapat diperoleh dari aktifitas mahasiswa	Prestasi	0	0	1	1	1



Sasaran / Indikator	Sasaran Strategis	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
IKK 9.03	Jumlah mahasiswa yang menghabiskan paling sedikit 20 SKS di luar kampus	Mhs	0	0	12	15	25
IKK 9.04	Jumlah mahasiswa yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat	Mhs	22	44	44	44	44
IKK 9.05	Jumlah mahasiswa baru yang diterima karena prestasi olahraga dan seni	Mhs	0	2	5	10	12
IKK 9.06	Persentase lulusan D4 Tepat Waktu	%	71,00%	72,00%	73,00%	74,00%	75,00%
IKK 9.07	Persentase lulusan D3 Tepat Waktu	%	53,00%	53,05%	54,00%	54,05%	55,00%
IKK 9.08	Rata-rata Lama Studi lulusan D4	Nilai	4,01	4,03	4,05	4,06	4,07
IKK 9.09	Rata-rata Lama Studi lulusan D3	Nilai	3,31	3,33	3,34	3,35	3,36
IKK 9.10	Rata-rata IPK lulusan D4	Nilai	70,01	70,02	70,03	70,04	70,05
IKK 9.11	Rata-rata IPK lulusan D3	Nilai	54,01	54,03	54,04	54,05	54,06
IKK 9.12	Rata-rata Waktu Tunggu Mendapatkan Pekerjaan	Nilai	6,5	6,0	5,5	5,3	5,1
IKK 9.13	Jumlah Mahasiswa Aktif	MHS	7069	7365	7637	7537	8435
IKK 9.14	Persentase Mahasiswa Drop Out	%	35%	30%	25%	20%	15%
SS 3	Mewujudkan Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi						
IKSS 3.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (<i>QS100 by subject</i>), bekerja sebagai praktisi di dunia industry, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir	%	15	15	15	16	17
IKSS 3.2	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industry dan dunia kerja; atau beraal dari kalangan praktisi profesional, dunia industry atau dunia kerja	%	30	30	44	45	46
IKSS 3.3	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen	Hasil Penelitian per jumlah dosen	0.10	0.10	0.7	0.75	0.8
Kegiatan I	Pembinaan Pendidikan Vokasi dan Profesi						
SK I.1 (Output)	Penelitian (PNBP/BLU Vokasi)						
IKK 1.01	Dosen yang memperoleh Hibah Bersaing penelitian dari berbagai sumber	Dosen	6	10	15	20	25
IKK 1.02	Hasil penelitian terapan dosen yang dipublikasikan	Judul	10	15	20	30	40
IKK 1.03	Hasil penelitian Terapan Dosen yang dihilirisasi ke pasar/industry/masyarakat	Produk	10	15	20	30	40
IKK 1.04	HAKI / Paten yang diperoleh	Dokumen	1	1	2	2	3
IKK 1.05	Berapa penghargaan nasional yang dapat diperoleh dari aktifitas Tenaga Kependidikan	Dokumen	0	0	1	2	2
IKK 1.06	Berapa penghargaan internasional yang dapat diperoleh dari aktifitas Tenaga Kependidikan	Dokumen	0	0	0	0	1
IKK 1.07	Jumlah Publikasi Internasional	Judul	2	5	8	10	12
IKK 1.08	Jumlah Jurnal Internasional Terakreditasi	Judul	62	65	69	73	75
IKK 1.09	Jumlah Publikasi Nasional	Judul	15	27	35	42	50
IKK 1.10	Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Nasional	Judul	1	1	2	3	5
IKK 1.11	Jumlah Jurnal Nasional Terakreditasi	Judul	22	22	22	22	22
IKK 1.12	Jumlah Produk Inovasi	Model	4	8	10	12	15
IKK 1.13	Jumlah Sitasi Karya Ilmiah	Kali	800	1.200	1.500	2.100	2.500
IKK 1.14	Jumlah Prototipe Penelitian dan Pengembangan (Research and Development / R & D)	Model	4	8	10	12	15
IKK 1.15	Jumlah Prototipe Industri	Model	3	5	8	10	12
IKK 1.16	Persentase SDM R & D Yang Berkualifikasi Doktor	%	10	10	11	11	11
SK I.2 (Output)	Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU Vokasi)						
IKK 2.01	Jumlah Judul Pengabdian Dosen Kepada Masyarakat	Judul	22	22	22	22	22
IKK 2.02	Jumlah Judul Hibah Pengabdian	Judul	12	14	16	18	20
SK I.3 (Output)	Pengembangan Mutu Sumber Daya Manusia Tenaga Pendidik						
IKK 3.01	Jumlah Dosen Tetap	Org	216	228	239	240	245
IKK 3.02	Jumlah Dosen P3K	Org	20	20	18	17	15
IKK 3.03	Jumlah Dosen dari PT Lain/Tidak Tetap	Org	15	15	13	12	10



Sasaran / Indikator	Sasaran Strategis	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
IKK 3.04	Jumlah SDM Yang Meningkatkan Karirnya	Org	85	86	87	88	89
IKK 3.05	Jumlah Dosen Bersertifikasi Pendidik (Serdos)	Org	194	197	222	237	267
IKK 3.06	Jumlah Dosen Bersertifikat Kompetensi/Profesi	Org	79	79	26	74	102
IKK 3.07	Ratio Jumlah Dosen Terhadap Jumlah Mahasiswa	Ratio	1 : 36	1 : 35	1 : 34	1 : 33	1 : 32
IKK 3.08	Ratio Dosen Tetap Terhadap Jumlah Dosen	Ratio	1 : 1,2	1 : 1,4	1 : 1,6	1 : 1,7	1 : 1,8
IKK 3.09	Persentase Dosen Politeknik berasal dari kalangan praktisi profesional atau industri	%	0,52%	1,03%	1,55%	2,06%	2,58%
IKK 3.10	Jumlah dosen berkualifikasi S2 dalam negeri	Org	193	193	194	196	197
IKK 3.11	Jumlah dosen berkualifikasi S2 luar negeri	Org	4	4	4	4	4
IKK 3.12	Jumlah dosen berkualifikasi S3 dalam negeri	Org	7	9	12	13	15
IKK 3.13	Jumlah dosen berkualifikasi S3 luar negeri	Org	3	3	6	12	14
IKK 3.14	Jumlah dosen yang naik pangkat dan golongan	Org	9	1	11	15	18
IKK 3.15	Jumlah Lektor Kepala	Org	78	79	80	81	82
IKK 3.16	Jumlah Guru Besar	Org	1	1	1	2	3
IKK 3.17	Jumlah Dosen Mengikuti Pelatihan Pekerti	Org	5	11	15	16	20
IKK 3.18	Jumlah Dosen Mengikuti Pelatihan AA	Org	5	11	15	16	20
IKK 3.19	Jumlah Dosen yang mengikuti short course di luar negeri	Org	0	0	5	10	12
IKK 3.20	Jumlah Dosen yang mengikuti pelatihan dan sertifikasi dosen di luar negeri	Org	0	0	2	4	7
IKK 3.21	Jumlah Dosen yang mengikuti Bridging Course	Org	0	0	3	5	9
IKK 3.22	Jumlah Dosen yang Magang ke Industri Dalam Negeri	Org	0	1	2	4	6
IKK 3.23	Jumlah Dosen yang Magang ke Industri Luar Negeri	Org	0	0	0	5	6
IKK 3.24	Jumlah Dosen Mengikuti Pelatihan/Workshop/Seminar/Konferensi ke PT di Dalam Negeri	Org	10	20	35	40	45
IKK 3.25	Jumlah Dosen Mengikuti Pelatihan/Workshop/Seminar/Konferensi ke PT di Luar Negeri	Org	0	0	2	5	10
IKK 3.26	Jumlah penghargaan nasional yang diraih tenaga kependidikan	Lap	0	0	1	1	1
IKK 3.27	Jumlah penghargaan Internasional yang diraih tenaga kependidikan		0	0	0	0	1
IKK 3.28	Jumlah dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain (nasional)	Org	5	7	10	15	20
IKK 3.29	Jumlah dosen yang berkegiatan tridharma di kampus QS 100 berdasarkan bidang ilmu	Org	0	0	1	2	3
SK I.4 (Output)	Layanan Pendidikan						
IKK 4.01	Jumlah dosen yang bekerja sebagai praktisi di DUDI	Org	2	3	4	4	6
IKK 4.02	Jumlah dosen yang membina mahasiswa dan berhasil meraih prestasi tingkat nasional dalam 5 tahun terakhir	Org	5	5	10	15	20
IKK 4.03	Jumlah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi dan/diakui oleh DUDI	Org	2	2	2	2	2
IKK 4.04	Jumlah dosen yang berasal dari kalangan praktisi profesional	Org	3	3	4	4	5
IKK 4.05	Jumlah dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan berhasil mendapat rekognisi nasional	Org	8	17	20	25	30
IKK 4.06	Praktisi DU/DI yang mengajar di kampus	Org	3	5	6	8	3
IKK 4.07	Dosen yang menerapkan metode pembelajaran PBL	Org	15	21	25	34	45
IKK 4.08	Jumlah Dosen Tetap Non PNS	Org	19	22	23	24	25
IKK 4.09	Jumlah Dosen Luar Biasa	Org	12	12	13	14	15
SS 4	Mewujudkan Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran						
IKSS 4.1	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerjasama dengan mitra	%	35	35	50	50	56
IKSS 4.2	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah	%	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5



Sasaran / Indikator	Sasaran Strategis	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
IKSS 4.3	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team based project</i>) sebagian bobot evaluasi	%	35	35	60	60	61
Kegiatan I	Pembinaan Pendidikan Vokasi dan Profesi						
SK I.1 (Output)	Dukungan Operasional PTN (BOPTN/Vokasi)						
IKK 1.01	Jumlah Pembukaan Program Studi Baru	Prodi	0	0	1	1	1
IKK 1.02	Persentase Program Studi Terakreditasi Unggul	%	0	0	0	0	6,25%
IKK 1.03	Persentase Program Studi Terakreditasi Minimal Sangat Baik	%	68,75%	75,00%	81,25%	87,50%	93,75%
IKK 1.04	Jumlah prodi yang melibatkan praktisi profesional industri dalam proses pembelajaran dan perkuliahan	Prodi	0	0	1	1	1
IKK 1.05	Program Studi Mendapat Fasilitas dan Bimbingan Teknis SPMI	Laporan	0	0	1	0	1
SK I.2 (Output)	Peningkatan Layanan Mutu Pendidikan Tinggi						
IKK 2.01	Dokumen Pelaksanaan Audit SPMI	Dokumen	1	1	2	2	2
IKK 2.02	Dokumen Instrumen Uji Kompetensi	Dokumen	8	12	14	16	20
IKK 2.03	Laporan Penyelenggaraan Uji Kompetensi	Laporan	5	7	10	11	12
IKK 2.04	Jumlah Program Studi Penyelenggara Uji Kompetensi	Prodi	5	7	10	11	12
IKK 2.05	Penghargaan yang diraih tingkat internasional		0	0	0	0	1
IKK 2.06	Penghargaan yang diraih tingkat nasional		0	0	1	1	1
IKK 2.07	Jumlah Kerja Sama dengan Dunia Kerja (DU/DI) dalam negeri	MoU/MoA	5	7	10	15	20
IKK 2.08	Jumlah Kerja Sama dengan Dunia Kerja (DU/DI) Luar negeri	MoU/MoA	3	4	5	6	7
IKK 2.09	Survei Kepuasan Masyarakat dan Industri	Laporan	1	1	1	1	1
IKK 2.10	Jumlah dan jenis media informasi dan publikasi		3	5	7	8	10
IKK 2.11	Jumlah Follower pada Akun Sosial Media	Follower	0	0	2000	2500	3000
IKK 2.12	Jumlah Subscriber pada Akun Youtube Official	Subscriber	0	0	800	1000	1500
IKK 2.13	Laporan Pengelolaan Data dan Informasi (PDPT)	Laporan	2	2	2	2	2
IKK 2.14	Jumlah Laboratorium Terakreditasi	Unit	0	0	0	0	1
IKK 2.15	Jumlah Kalibrasi Peralatan Fungsional	Buah	1	1	1	1	1
SK I.3 (Output)	Layanan BOPTN Non Penelitian						
IKK 3.01	Layanan Langganan Daya dan Jasa Lainnya	Layanan	4	4	4	4	4
IKK 3.02	Jumlah Tenaga Admin, Teknisi Non PNS, Sopir, Satpam dan Cleaning Service	Orang	203	205	197	197	190
SK I.4 (Output)	Dukungan Layanan Pembelajaran PNB/BLU Vokasi						
IKK 4.01	Jumlah lulusan yang terserap di dunia kerja/bekerja satu tahun setelah lulus	Orang	35	57	78	99	125
IKK 4.02	Jumlah lulusan yang terserap dengan wirausaha satu tahun setelah lulus	Orang	6	12	20	27	30
IKK 4.03	Jumlah Mahasiswa yang lulus dan melanjutkan ke Perguruan Tinggi	MHS	35	48	60	71	80
IKK 4.04	Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA)	MHS	0	0	20	35	50
IKK 4.05	Kampus Mengajar Mahasiswa D4	MHS	0	0	1	3	5
IKK 4.06	Mahasiswa yang dimagangkan ke Perusahaan Luar Negeri	MHS	0	0	2	4	7
IKK 4.07	Mahasiswa yang dimagangkan ke Perusahaan Dalam Negeri	MHS	0	0	5	10	25
IKK 4.08	Mahasiswa yang magang bersertifikat kampus merdeka (microcedensial bermagang) Mahasiswa D4/D3/D2	MHS	0	0	10	15	25
IKK 4.09	Mahasiswa mengikuti studi Independent bersertifikat kampus merdeka (microcedensial non magang) Mahasiswa D4/D3/D2	MHS	0	0	2	5	10
IKK 4.10	Jumlah Mahasiswa yang memperoleh sertifikat kompetensi dalam negeri dalam satu tahun	MHS	0	0	250	300	350
IKK 4.11	Jumlah Mahasiswa yang memperoleh sertifikat kompetensi luar negeri dalam satu tahun	MHS	0	0	0	2	5

Sasaran / Indikator	Sasaran Strategis	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SK I.5 (Output)	Sarana Prasarana Pembelajaran (BOPTN Vokasi)						
IKK 5.01	Reviu DED dan Master Plan	Dokumen	1	0	1	0	0
IKK 5.02	Pengadaan Bangunan/Gedung Bertingkat	M ²	1	0	1	0	1
IKK 5.03	Pengadaan Bangunan Sederhana lainnya	M ²	1	1	1	1	1

Berdasarkan penjabaran diatas, sasaran program, sasaran kegiatan telah ditentukan indicator kinerja yang pencapaian targetnya dilakukan setiap tahun pada kurun waktu periodisasi renstra yang ditetapkan dengan terus bersinergi bila terjadi perubahan sasaran program dan indikator kinerja sasaran program berdasarkan restrukturisasi program yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2021. Penyesuaian tersebut akan dilakukan melalui reviu atau revisi renstra kelembagaan Politeknik Negeri Kupang.

4.2. Kerangka Pendanaan

Untuk menunjang pelaksanaan dan kontinuitas program dan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam renstra serta dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan Politeknik Negeri Kupang pada tahun 2022 dengan sejumlah sasaran strategis yang telah ditetapkan diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya, dukungan dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi pemerintah dan kebijakan internal serta sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan pendanaan tersebut, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategi dibagi dalam periode tahun berjalan maupun periodisasi empat tahunan berikutnya berdasarkan prioritas program yang ditetapkan. Kebutuhan pendanaan periode pertama tahun 2020 bersumber dari Rupiah Murni maupun PNPB dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan Kemendikbur sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis
Politeknik Negeri Kupang Tahun 2020-2024

No	Program/Kegiatan	Kebutuhan Pendanaan				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	<i>Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Vokasi</i>	8.917.854.000	4.985.471.000	6.267.172.000	0	0
2	<i>Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi Vokasi</i>	24.524.630.000	25.927.731.000	19.412.324.000	0	0
3	<i>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi</i>	48.209.310.000	50.591.450.000	49.257.835.000	0	0
Total		81.651.794.000	81.504.652.000	74.937.331.000	0	0

Total anggaran yang dibutuhkan Politeknik Negeri Kupang untuk menunjang target kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2022 membutuhkan alokasi pembiayaan melalui Kegiatan Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Vokasi sebesar Rp. 6.267.172.000,-; Kegiatan

Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi Vokasi sebesar Rp. 19.412.324.000,-; serta Kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Diksi sebesar Rp. 49.257.835.000,-. Sehingga total anggaran yang tertuang dalam RKA-KL / DIPA Politeknik Negeri Kupang adalah sebesar Rp. 74.937.331.000,-.

Sementara estimasi kebutuhan pendanaan pada tahun 2021-2024 mengikuti pola struktur anggaran proporsional yang ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi setelah memperhitungkan target PNBP dari tiap satuan kerja. Nominal target PNBP Politeknik Negeri Kupang setiap tahunnya mengalami peningkatan yang ditentukan oleh Pendapatan Biaya Pendidikan, Pendapatan Pendidikan Lainnya, serta Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan dikarenakan ketersediaan. Profil Penyusunan Target PNBP dan Penggunaan PNBP yang tertuang dalam RKAKL adalah sebagai sebagaimana disajikan pada Tabel 4.3 sebagai berikut :

Tabel 4.3 Target dan Ijin Penggunaan PNBP dalam DIPA
Politeknik Negeri Kupang Tahun 2021 – 2024

No	Uraian	Penerimaan Negara Bukan Pajak				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Target PNBP DIPA	18.900.000.000	27.498.391.000	20.712.960.000	26.484.470.000	30.174.510.000
2	Pagu PNBP	24.524.630.000	25.927.731.000	19.412.324.000	26.219.625.000	29.872.764.900

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, penggunaan pagu PNBP pada tahun 2020 mengalami kenaikan signifikan karena dipengaruhi oleh akumulasi tambahan PNBP Estimasi yang diperhitungkan pada akhir tahun anggaran. Pada tahun 2021, akibat penambahan pagu PNBP Estimasi tersebut berdampak pada pula penyusunan target PNBP DIPA yang mengalami lonjakan kenaikan yang sangat besar, sementara pada tahun berikutnya setelah mempertimbangkan keberadaan mahasiswa aktif dan penerimaan fungsional lain-lain maka target PNBP DIPA terkoreksi pada kisaran nominal 20,7 Milyar di tahun 2022, 26,4 Milyar di tahun 2023 dan 30,1 Milyar di tahun 2024. Kenaikan yang signifikan pada tahun 2023 dan 2024 menggunakan tren mahasiswa aktif yang tersedia tanpa mempertimbangkan jumlah mahasiswa yang di-lulus-kan, DO, Cuti/meninggal dan keluar terhadap varian nilai UKT yang ditetapkan.



BAB V PENUTUP

Rencana strategis (Renstra) Politeknik Negeri Kupang Periode 2020–2024 yang telah mengalami perubahan pada Misi; Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan; serta Sasaran Strategis/Program dan Indikator Kinerja Program dilaksanakan untuk mewujudkan pembangunan SDM yang unggul dan berkarakter dengan bersinergi dengan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai manifestasi Nawacita Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana tertuang dalam RPJMN. Renstra ini juga menjadi panduan kebijakan dalam penyusunan Penetapan Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA) Politeknik Negeri Kupang sehingga akan lebih terarah dan terencana dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta lebih efisien dalam pelaksanaannya, baik dipandang dari aspek pengelolaan sumber pembiayaan maupun dalam percepatan waktu realisasinya. Kegiatan dengan output yang mendukung program prioritas nasional akan selalu diutamakan selain kegiatan yang secara langsung menjadi tanggungjawab dan sesuai dengan tugas dan fungsi Politeknik Negeri Kupang. Namun demikian untuk hal-hal yang bersifat mendesak akan tetap dipertimbangkan untuk diprogramkan sesuai dengan skala urgensinya dan ketersediaan dukungan anggaran.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan di lingkungan Politeknik Negeri Kupang juga dihasilkan berkat adanya dukungan unit terkait lainnya, civitas akademika termasuk *stakeholders* pendidikan. Kerja keras dari segenap jajaran *level* manajemen dalam organisasi dan sinergitas pemangku kegiatan dengan pihak terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan Politeknik Negeri Kupang yang tertuang dalam Rencana Strategis Politeknik Negeri Kupang.

Arah pembangunan dan pengembangan Politeknik Negeri Kupang (PNK) untuk lima tahun kedepan, Implementasi Rencana Strategis Politeknik Negeri Kupang 2020–2024 ini akan dilaksanakan oleh seluruh *level* manajemen menurut *Cascading* Perjanjian Kinerja dalam organisasi mulai dari Direktur, Wakil Direktur, Ketua Jurusan, Koordinator, Subkoordinator, Kepala Pusat, Kepala Unit dan Unit Pelaksana Teknis dengan menjabarkan perencanaan Sasaran ke dalam Rencana Strategis pada setiap masing-masing Unit Organisasi PNK.



Direktur,
Politeknik Negeri Kupang

Frans Mangngi, ST., M.Eng
NIP. 196803011994031001



Lampiran II
Keputusan Direktur Politeknik Negeri Kupang
Nomor : 324a Tahun 2022
Tentang Renstra Politeknik Negeri Kupang
Periode 2020 – 2024 Reviu Tahun 2022

KERANGKA PENDANAAN

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam jutaan rupiah)					Penanggung jawab Bidang dan Kegiatan
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3					4					5
Mewujudkan Sistem Tata Kelola Manajemen dan Kualitas Pendidikan Vokasi Berstandar Industri												
IKSS 1.1	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	BB	BB	BB	BB	BB						Keuangan
IKSS 1.2	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-KL Satker minimal 93	93	94	98,0	98,1	98,5						Keuangan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis							48,001.301	55,269.573	55,269.573	55,269.573	55,269.573	
SK I.1 (Output)	Layanan Perkantoran											
IKK 1.01	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	331	330	329	337	335						Keuangan
IKK 1.02	Jumlah Tenaga Kependidikan ASN Penerima Tunjangan Kinerja Pegawai	331	327	322	316	310						Keuangan
IKK 1.03	Jumlah Dosen Penerima Sertifikasi Dosen	145	148	153	160	165						Keuangan
SK I.2 (Output)	SDM Penggerak Tata Kelola											
IKK 2.01	Presentase Nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran)	0	0									Keuangan
IKK 2.02	Presentase Nilai EKA (Evaluasi Kinerja Anggaran)	0	0									Keuangan
IKK 2.03	Presentase Daya Serap Anggaran Tahunan	84,56	90,21	90,50	90,75	91,00						Keuangan
IKK 2.04	Presentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	94,11	88,01	93,72	98,99	98,99						Keuangan
IKK 2.05	Penerimaan Hibah	0	0	0	0	0						Keuangan
IKK 2.06	Presentase Capaian Serapan SBSN	0	0	0	0	0						Keuangan
IKK 2.07	Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di kampus	0	0	1	1	1						Akamawa
IKK 2.08	Target Keindahan, Keamanan. Ketertiban, Kenyamanan di kampus	0	0	1	1	1						Keuangan
IKK 2.09	Nilai score SINDE dari Biro Umum Kemdikbudristek	0	0	75%	80%	85%						Keuangan
IKK 2.10	Jenis urusan manajemen kampus berbasis digital	0	0	10	20	30						UPT TIK
IKK 2.11	Jumlah upaya yang dilakukan untuk Meningkatkan Daya Tarik Kampus	2	2	5	10	15						Keuangan
IKK 2.12	Pembentukan Tim Humas	1	1	1	1	1						Kerjasama
IKK 2.13	Persentase Tenaga Kependidikan dengan Sertifikat Kompetensi	35,00%	40,00%	45,00%	50,00%	55,00%						Kepegawaian
IKK 2.14	Jumlah Tenaga Kependidikan Mengikuti Diklat Kompetensi (Teknisi/PLP)	20	30	35	37	40						Kepegawaian



Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam jutaan rupiah)					Penanggung jawab Bidang dan Kegiatan
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKK 2.15	Persentase Kuantitas Tindak Lanjut Temuan Inspektorat	50%	60%	70%	75%	80%						Kepegawaian
IKK 2.16	Persentase Tindak Lanjut Bernilai Rupiah Temuan Inspektorat	0,69%	0,66%	0,64%	0,63%	0,62%						Keuangan
IKK 2.17	Penyelesaian temuan BPK-RI	0	0	5	3	0						Keuangan
IKK 2.18	Publikasi pemberitaan/sosialisasi yang dilaksanakan secara digital	0	0	10	20	30						Humas
IKK 2.19	Publikasi pemberitaan/sosialisasi yang dilaksanakan secara konvensional	0	0	5	5	5						Humas
IKK 2.20	Persentase Laporan LHKPN	3,31%	3,32%	3,33%	3,34%	3,36%						Kepegawaian
IKK 2.21	Persentase Laporan LHKSN	92,00%	93,00%	94,00%	95,00%	96,00%						Kepegawaian
IKK 2.22	Jumlah pimpinan pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti pelatihan manajemen bisnis berbasis industry	1	1	1	1	1						Kepegawaian
SK I.3 (Output)	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Evaluasi, Serta Akuntabilitas dan Pencapaian Kinerja											
IKK 3.1	Dokumen Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	1	1	1	1	1						Keuangan
IKK 3.2	Dokumen Penyusunan Standar Satuan Biaya Pendidikan Tinggi (UKT)	1	1	1	1	1						Keuangan
IKK 3.3	Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran (SIMPROKA)	4	4	4	4	4						Akademik
IKK 3.5	Laporan Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	4	4	4	4	4						Akademik
IKK 3.6	Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIN)	1	1	1	1	1						Akademik
SK I.4 (Output)	Layanan Internal (Overhead)											
IKK 4.1	Jumlah Layanan Pengadaan Perlengkapan Operasional Perkantoran	12	12	12	12	12						Keuangan
IKK 4.2	Pengadaan Kendaraan Operasional Pimpinan dan Perkantoran	0	0	0	0	1						Keuangan
IKK 4.3	Jumlah Kendaraan Operasional Roda 4 dan 6	1	1	2	4	4						Keuangan
IKK 4.4	Jumlah Kendaraan Operasional Roda 2	0	0	2	3	3						Keuangan
IKK 4.5	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi	0	1	1	1	1						Keuangan
IKK 4.6	Pengadaan Aplikasi Sistem e-Layanan	1	1	1	1	1						Keuangan
Pembinaan Pendidikan Vokasi dan Profesi							23,896.732					
SK II.1 (Output)	Dukungan Operasional PTN (BOPTN/Vokasi)											
IKK 1.01	Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	12	12	12	12	12						Akademik
IKK 1.02	Operasional Penyelenggaraan Perkantoran	12	12	12	12	12						Keuangan
SK II.2 (Output)	Pengembangan Kelembagaan											
IKK 2.1	Jumlah institusi pendidikan tinggi vokasi mendapatkan pembinaan menuju BLU	0	0	0	0	1						
IKK 2.2	Jumlah Satker yang dibina menuju WBK	0	0	1	1	1						



Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam jutaan rupiah)					Penanggung jawab Bidang dan Kegiatan
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Mewujudkan Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi												
IKSS 2.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	55	55	55	55	55						
IKSS 2.2	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 SKS diluar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	10	10	15	15	16						
Kegiatan I	Pembinaan Pendidikan Vokasi dan Profesi											
SK I.1 (Output)	Layanan Pembelajaran (BOPTN Vokasi)											
IKK 1.01	Dukungan Pengadaan Bahan Praktikum Jurusan	6	6	6	6	6						
IKK 1.02	Dukungan Pengadaan Bahan Kuliah Jurusan	6	6	6	6	6						
IKK 1.03	Dukungan Pengadaan Tools Praktikum Jurusan	6	6	6	6	6						
SK I.2 (Output)	Buku Perpustakaan (BOPTN Vokasi)											
IKK 2.01	Pengadaan Literasi, CD Pembelajaran dan Buku Perpustakaan	0	1	0	1	1						
IKK 2.02	Dukungan Pengadaan Bahan Pustaka	0	0	1	1	1						
SK I.3 (Output)	Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola. Kelembagaan dan SDM(BOPTN Vokasi)											
IKK 3.01	Dokumen Pelaksanaan Audit SPI	6	6	6	6	6						
IKK 3.02	Dokumen Pelaksanaan Audit SPMI	6	6	6	6	6						
SK I.4 (Output)	Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN Vokasi)											
IKK 4.01	Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran	1	1	1	1	1						
IKK 4.02	Pengadaan Meubelair Pendukung Layanan Pembelajaran	1	1	1	1	1						
IKK 4.03	Pengadaan Sarana Prasarana Pembelajaran	1	1	1	1	1						
SK I.5 (Output)	Layanan Kegiatan Kemahasiswaan (BOPTN Vokasi)											
IKK 5.01	Jumlah Pembinaan Unit Kegiatan Mahasiswa	2	3	4	4	5						
IKK 5.02	Jumlah Mahasiswa Berprestasi Dalam Minat dan Bakat	1	2	3	4	5						
IKK 5.03	Jumlah Mahasiswa Berprestasi Dalam Penalaran Akademik	0	1	2	3	4						
IKK 5.04	Hasil Karya Penelitian Terapan Mahasiswa Berupa Produk	241	338	419	450	479						
IKK 5.05	Hasil Karya Penelitian Terapan Mahasiswa Yang Dapat Dihilirisasike Pasar / Masyarakat / Industri	0	0	10	15	20						
IKK 5.06	Forum Ajang Kreativitas Mahasiswa yang dilaksanakan di kampus	0	0	2	4	6						
IKK 5.07	Ajang Kreativitas Mahasiswa yang diikuti diluar kampus	0	0	1	1	1						



Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam jutaan rupiah)					Penanggung jawab Bidang dan Kegiatan
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK I.6 (Output)	Layanan Pendidikan (PNBP/BLU Vokasi)											
IKK 6.01	Penerimaan Mahasiswa	2000	2100	2200	2300	2400						
IKK 6.02	Peningkatan Jumlah Mahasiswa	7.278	8.955	9.972	10.120	11.225						
IKK 6.03	Mahasiswa yang memperoleh beasiswa	1.807	1.328	2.321	2.410	2.550						
IKK 6.04	Mahasiswa yang diluluskan	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400						
IKK 6.05	Jumlah mahasiswa yang mengikuti program D2 Fast Track	0	0	0	0	0						
IKK 6.06	Pabrik Wirausaha – Mahasiswa D4/D3/D2	0	0	0	1	2						
IKK 6.07	Dokumen Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru	1	1	1	1	1						
IKK 6.08	Dokumen Bantuan Beasiswa Swadana	1	1	1	1	1						
IKK 6.09	Dukungan Pembinaan Unit Organisasi Kemahasiswaan (BEM/BLM, UKM Kerohanian, HMJ)	2	3	4	4	5						
IKK 6.10	Dukungan Pembinaan Penalaran Keilmuan/ Kerjasama Berbasis Pendidikan (Kompetisi Internal Jurusan, Remedial Course, Workshop ESP, Seminar Jurusan)	9	9	9	9	9						
IKK 6.11	Dukungan Kewirausahaan Mahasiswa	1	1	1	1	1						
IKK 6.12	Dokumen Seminar/Pelatihan/Workshop PSDM Tenaga Pendidik	1	1	1	1	1						
IKK 6.13	Dokumen Penyelenggaraan Tugas Tambahan dan KJM Dosen	2	2	2	2	2						
SK I.7 (Output)	Sarana Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU Vokasi)											
IKK 7.01	Pengadaan Tambahan Peralatan Pendukung Layanan Perkantoran	1	1	1	1	1						
IKK 7.02	Pengadaan Meubelair Pendukung Layanan Perkantoran	1	1	1	1	1						
IKK 7.03	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran	1	1	1	1	1						
SK I.8 (Output)	Sarana Prasarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU Vokasi)											
IKK 8.01	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran	4	4	4	4	4						
IKK 8.02	Laporan Kinerja Tenaga Kependidikan Non PNS	1	1	1	1	1						
IKK 8.03	Dokumen/Laporan Sistem Tata Kelola dan Kelembagaan	2	2	3	3	4						
SK I.9 (Output)	Dukungan Layanan Pembelajaran (PNBP/BLU Vokasi)											
IKK 9.01	Berapa penghargaan/prestasi nasional yang dapat diperoleh dari aktifitas mahasiswa	0	0	10	15	20						
IKK 9.02	Berapa penghargaan/prestasi internasional yang dapat diperoleh dari aktifitas mahasiswa	0	0	1	1	1						



Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam jutaan rupiah)					Penanggung jawab Bidang dan Kegiatan
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKK 9.03	Jumlah mahasiswa yang menghabiskan paling sedikit 20 SKS di luar kampus	0	0	12	15	25						
IKK 9.04	Jumlah mahasiswa yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat	22	44	44	44	44						
IKK 9.05	Jumlah mahasiswa baru yang diterima karena prestasi olahraga dan seni	0	2	5	10	12						
IKK 9.06	Persentase lulusan D4 Tepat Waktu	71,00	72,0	73,00	74,00	75,00						
IKK 9.07	Persentase lulusan D3 Tepat Waktu	53,00	53,05	54,00	54,05	55,00						
IKK 9.08	Rata-rata Lama Studi lulusan D4	4,01	4,03	4,05	4,06	4,07						
IKK 9.09	Rata-rata Lama Studi lulusan D3	3,31	3,33	3,34	3,35	3,36						
IKK 9.10	Rata-rata IPK lulusan D4	70,01	70,02	70,03	70,04	70,05						
IKK 9.11	Rata-rata IPK lulusan D3	54,01	54,03	54,04	54,05	54,06						
IKK 9.12	Rata-rata Waktu Tunggu Mendapatkan Pekerjaan	6,5	6,0	5,5	5,3	5,1						
IKK 9.13	Jumlah Mahasiswa Aktif	7.069	7.365	7.637	7.537	8.435						
IKK 9.14	Persentase Mahasiswa Droup Out	35%	30%	25%	20%	15%						
Mewujudkan Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi												
IKSS 3.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (<i>QS100 by subject</i>), bekerja sebagai praktisi di dunia industry, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih preatasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir	15	15	15	16	17						
IKSS 3.2	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industry dan dunia kerja; atau beraal dari kalangan praktisi profesional, dunia industry atau dunia kerja	30	30	44	45	46						
IKSS 3.3	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen	0.10	0.10	0.7	0.75	0.8						
Kegiatan I	Pembinaan Pendidikan Vokasi dan Profesi											
SK I.1 (Output)	Penelitian (PNBP/BLU Vokasi)											
IKK 1.01	Dosen yang memperoleh Hibah Bersaing penelitian dari berbagai sumber	6	10	15	20	25						
IKK 1.02	Hasil penelitian terapan dosen yang dipublikasikan	10	15	20	30	40						
IKK 1.03	Hasil penelitian Terapan Dosen yang dihilirisasi ke pasar/industry/masyarakat	10	15	20	30	40						
IKK 1.04	HAKI / Paten yang diperoleh	1	1	2	2	3						
IKK 1.05	Berapa penghargaan nasional yang dapat diperoleh dari aktifitas Tenaga Kependidikan	0	0	1	2	2						



Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam jutaan rupiah)					Penanggung jawab Bidang dan Kegiatan
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKK 1.06	Berapa penghargaan internasional yang dapat diperoleh dari aktifitas Tenaga Kependidikan	0	0	0	0	1						
IKK 1.07	Jumlah Publikasi Internasional	2	5	8	10	12						
IKK 1.08	Jumlah Jurnal Internasional Terakreditasi	62	65	69	73	75						
IKK 1.09	Jumlah Publikasi Nasional	15	27	35	42	50						
IKK 1.10	Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Nasional	1	1	2	3	5						
IKK 1.11	Jumlah Jurnal Nasional Terakreditasi	22	22	22	22	22						
IKK 1.12	Jumlah Produk Inovasi	4	8	10	12	15						
IKK 1.13	Jumlah Sitasi Karya Ilmiah	800	1.200	1.500	2.100	2.500						
IKK 1.14	Jumlah Prototipe Penelitian dan Pengembangan (Research and Development / R & D)	4	8	10	12	15						
IKK 1.15	Jumlah Prototipe Industri	3	5	8	10	12						
IKK 1.16	Persentase SDM R & D Yang Berkualifikasi Doktor	10	10	11	11	11						
SK I.2 (Output)	Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU Vokasi)											
IKK 2.01	Jumlah Judul Pengabdian Dosen Kepada Masyarakat	22	22	22	22	22						
IKK 2.02	Jumlah Judul Hibah Pengabdian	12	14	16	18	20						
SK I.3 (Output)	Pengembangan Mutu Sumber Daya Manusia Tenaga Pendidik											
IKK 3.01	Jumlah Dosen Tetap	216	228	239	240	245						
IKK 3.02	Jumlah Dosen P3K	20	20	18	17	15						
IKK 3.03	Jumlah Dosen dari PT Lain/Tidak Tetap	15	15	13	12	10						
IKK 3.04	Jumlah SDM Yang Meningkatkan Karirnya	85	86	87	88	89						
IKK 3.05	Jumlah Dosen Bersertifikasi Pendidik (Serdos)	194	197	222	237	267						
IKK 3.06	Jumlah Dosen Bersertifikat Kompetensi/Profesi	79	79	26	74	102						
IKK 3.07	Ratio Jumlah Dosen Terhadap Jumlah Mahasiswa	1 : 36	1 : 35	1 : 34	1 : 33	1 : 32						
IKK 3.08	Ratio Dosen Tetap Terhadap Jumlah Dosen	1 : 1,2	1 : 1,4	1 : 1,6	1 : 1,7	1 : 1,8						
IKK 3.09	Persentase Dosen Politeknik berasal dari kalangan praktisi profesional atau industri	0,52%	1,03%	1,55%	2,06%	2,58%						
IKK 3.10	Jumlah dosen berkualifikasi S2 dalam negeri	193	193	194	196	197						
IKK 3.11	Jumlah dosen berkualifikasi S2 luar negeri	4	4	4	4	4						
IKK 3.12	Jumlah dosen berkualifikasi S3 dalam negeri	7	9	12	13	15						



Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam jutaan rupiah)					Penanggung jawab Bidang dan Kegiatan
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKK 3.13	Jumlah dosen berkualifikasi S3 luar negeri	3	3	6	12	14						
IKK 3.14	Jumlah dosen yang naik pangkat dan golongan	9	1	11	15	18						
IKK 3.15	Jumlah Lektor Kepala	78	79	80	81	82						
IKK 3.16	Jumlah Guru Besar	1	1	1	2	3						
IKK 3.17	Jumlah Dosen Mengikuti Pelatihan Pekerti	5	11	15	16	20						
IKK 3.18	Jumlah Dosen Mengikuti Pelatihan AA	5	11	15	16	20						
IKK 3.19	Jumlah Dosen yang mengikuti short course di luar negeri	0	0	5	10	12						
IKK 3.20	Jumlah Dosen yang mengikuti pelatihan dan sertifikasi dosen di luar negeri	0	0	2	4	7						
IKK 3.21	Jumlah Dosen yang mengikuti Bridging Course	0	0	3	5	9						
IKK 3.21	Jumlah Dosen yang mengikuti Bridging Course	0	0	3	5	9						
IKK 3.22	Jumlah Dosen yang Magang ke Industri Dalam Negeri	0	1	2	4	6						
IKK 3.23	Jumlah Dosen yang Magang ke Industri Luar Negeri	0	0	0	5	6						
IKK 3.24	Jumlah Dosen Mengikuti Pelatihan/Workshop/Seminar/Konferensi ke PT di Dalam Negeri	10	20	35	40	45						
IKK 3.25	Jumlah Dosen Mengikuti Pelatihan/Workshop/Seminar/Konferensi ke PT di Luar Negeri	0	0	2	5	10						
IKK 3.26	Jumlah penghargaan nasional yang diraih tenaga kependidikan	0	0	1	1	1						
IKK 3.27	Jumlah penghargaan Internasional yang diraih tenaga kependidikan	0	0	0	0	1						
IKK 3.28	Jumlah dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain (nasional)	5	7	10	15	20						
IKK 3.29	Jumlah dosen yang berkegiatan tridharma di kampus QS 100 berdasarkan bidang ilmu	0	0	1	2	3						
IKK 3.21	Jumlah Dosen yang mengikuti Bridging Course	0	0	3	5	9						
IKK 3.22	Jumlah Dosen yang Magang ke Industri Dalam Negeri	0	1	2	4	6						
IKK 3.23	Jumlah Dosen yang Magang ke Industri Luar Negeri	0	0	0	5	6						
IKK 3.24	Jumlah Dosen Mengikuti Pelatihan/Workshop/Seminar/Konferensi ke PT di Dalam Negeri	10	20	35	40	45						
IKK 3.25	Jumlah Dosen Mengikuti Pelatihan/Workshop/Seminar/Konferensi ke PT di Luar Negeri	0	0	2	5	10						
IKK 3.26	Jumlah penghargaan nasional yang diraih tenaga kependidikan	0	0	1	1	1						
IKK 3.27	Jumlah penghargaan Internasional yang diraih tenaga kependidikan	0	0	0	0	1						



Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam jutaan rupiah)					Penanggung jawab Bidang dan Kegiatan
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKK 3.28	Jumlah dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain (nasional)	5	7	10	15	20						
IKK 3.29	Jumlah dosen yang berkegiatan tridharma di kampus QS 100 berdasarkan bidang ilmu	0	0	1	2	3						
SK I.4 (Output)	Layanan Pendidikan											
IKK 4.01	Jumlah dosen yang bekerja sebagai praktisi di DUDI	2	3	4	4	6						
IKK 4.02	Jumlah dosen yang membina mahasiswa dan berhasil meraih prestasi tingkat nasional dalam 5 tahun terakhir	5	5	10	15	20						
IKK 4.03	Jumlah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi dan/diakui oleh DUDI	2	2	2	2	2						
IKK 4.04	Jumlah dosen yang berasal dari kalangan praktisi profesional	3	3	4	4	5						
IKK 4.05	Jumlah dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan berhasil mendapat rekognisi nasional	3	3	4	4	5						
IKK 4.06	Praktisi DU/DI yang mengajar di kampus	8	17	20	25	30						
IKK 4.07	Dosen yang menerapkan metode pembelajaran PBL	3	5	6	8	3						
IKK 4.08	Jumlah Dosen Tetap Non PNS	19	22	23	24	25						
IKK 4.09	Jumlah Dosen Luar Biasa	12	12	13	14	15						
Mewujudkan Kualitas Kurikulum Pembelajaran												
IKSS 4.1	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerjasama dengan mitra	35	35	50	50	56						
IKSS 4.2	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5						
IKSS 4.3	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team based project</i>) sebagian bobot evaluasi	35	35	60	60	61						
Kegiatan I	Pembinaan Pendidikan Vokasi dan Profesi											
SK I.1 (Output)	Dukungan Operasional PTN (BOPTN/Vokasi)											
IKK 1.01	Jumlah Pembukaan Program Studi Baru	0	0	1	1	1						
IKK 1.02	Persentase Program Studi Terakreditasi Unggul	0	0	0	0	6,25						
IKK 1.03	Persentase Program Studi Terakreditasi Minimal Sangat Baik	68,75	75,00	81,25	87,50	93,75						
IKK 1.04	Jumlah prodi yang melibatkan praktisi profesional industri dalam proses pembelajaran dan perkuliahan	0	0	1	1	1						
IKK 1.05	Program Studi Mendapat Fasilitas dan Bimbingan Teknis SPMI	0	0	1	0	1						



Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam jutaan rupiah)					Penanggung jawab Bidang dan Kegiatan
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK I.2 (Output)	Peningkatan Layanan Mutu Pendidikan Tinggi											
IKK 2.01	Dokumen Pelaksanaan Audit SPMI	1	1	2	2	2						
IKK 2.02	Dokumen Instrumen Uji Kompetensi	8	12	14	16	20						
IKK 2.03	Laporan Penyelenggaraan Uji Kompetensi	5	7	10	11	12						
IKK 2.04	Jumlah Program Studi Penyelenggara Uji Kompetensi	5	7	10	11	12						
IKK 2.05	Penghargaan yang diraih tingkat internasional	0	0	0	0	1						
IKK 2.06	Penghargaan yang diraih tingkat nasional	0	0	1	1	1						
IKK 2.07	Jumlah Kerja Sama dengan Dunia Kerja (DU/DI) dalam negeri	5	7	10	15	20						
IKK 2.08	Jumlah Kerja Sama dengan Dunia Kerja (DU/DI) Luar negeri	3	4	5	6	7						
IKK 2.09	Survei Kepuasan Masyarakat dan Industri	1	1	1	1	1						
IKK 2.10	Jumlah dan jenis media informasi dan publikasi	3	5	7	8	10						
IKK 2.11	Jumlah Follower pada Akun Sosial Media	0	0	2.000	2.500	3.000						
IKK 2.12	Jumlah Subscriber pada Akun Youtube Official	0	0	800	1.000	1.500						
IKK 2.13	Laporan Pengelolaan Data dan Informasi (PDPT)	2	2	2	2	2						
IKK 2.14	Jumlah Laboratorium Terakreditasi	0	0	0	0	1						
IKK 2.15	Jumlah Kalibrasi Peralatan Fungsional	1	1	1	1	1						
SK I.3 (Output)	Layanan BOPTN Non Penelitian											
IKK 3.1	Layanan Langganan Daya dan Jasa Lainnya	4	4	4	4	4						
IKK 3.2	Jumlah Tenaga Admin, Teknisi Non PNS, Sopir, Satpam dan Cleaning Service	203	205	197	197	190						
SK I.4 (Output)	Dukungan Layanan Pembelajaran PNB/BLU Vokasi											
IKK 4.01	Jumlah lulusan yang terserap di dunia kerja/bekerja satu tahun setelah lulus	35	57	78	99	125						
IKK 4.02	Jumlah lulusan yang terserap dengan wirausaha satu tahun setelah lulus	6	12	20	27	30						
IKK 4.03	Jumlah Mahasiswa yang lulus dan melanjutkan ke Perguruan Tinggi	35	48	60	71	80						
IKK 4.04	Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA)	0	0	20	35	50						
IKK 4.05	Kampus Mengajar Mahasiswa D4	0	0	1	3	5						
IKK 4.06	Mahasiswa yang dimagangkan ke Perusahaan Luar Negeri	0	0	2	4	7						
IKK 4.07	Mahasiswa yang dimagangkan ke Perusahaan Dalam Negeri	0	0	5	10	25						



Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Alokasi (dalam jutaan rupiah)					Penanggung jawab Bidang dan Kegiatan
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKK 4.08	Mahasiswa yang magang bersertifikat kampus merdeka (microcedensial bermagang) Mahasiswa D4/D3/D2	0	0	10	15	25						
IKK 4.09	Mahasiswa mengikuti studi Independent bersertifikat kampus merdeka (microcedensial non magang) Mahasiswa D4/D3/D2	0	0	2	5	10						
IKK 4.10	Jumlah Mahasiswa yang memperoleh sertifikat kompetensi dalam negeri dalam satu tahun	0	0	250	300	350						
IKK 4.11	Jumlah Mahasiswa yang memperoleh sertifikat kompetensi luar negeri dalam satu tahun	0	0	0	2	5						
SK I.5 (Output)	Sarana Prasarana Pembelajaran (BOPTN Vokasi)											
IKK 5.01	Reviu DED dan Master Plan	1	0	1	0	0						
IKK 5.02	Pengadaan Bangunan/Gedung Bertingkat	1	0	1	0	1						
IKK 5.03	Pengadaan Bangunan Sederhana lainnya	1	1	1	1	1						



Direktur,
Politeknik Negeri Kupang

Frans Mangngi, ST., M.Eng
NIP. 196803011994031001



DEFINISI OPERASIONAL METODE PERHITUNGAN PENGUKURAN IKU DAN SUMBER DATA

Indikator Kinerja Utama/ IKU	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Sumber Data
Capaian IKU 1 sampai dengan IKU 8 mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 / M / 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lambaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan			
IKU-1	Kriteria pengukuran: a. Pekerjaan : 1) Mendapatkan pekerjaan dengan masa tunggu kurang dari 6 (enam) bulan dan gaji lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali Upah Minimum Regional (UMR) di : a. Perusahaan swasta, termasuk perusahaan nasional, perusahaan multinasional, perusahaan rintisan (startup company), Usaha Mikro , Kecil dan Menengah (UMKM), dan seterusnya; b. Organisasi nirlaba; c. Institusi/organisasi multilateral; d. Lembaga pemerintah; atau e. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau 2) Sudah berpenghasilan lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali Upah Minimum Regional (UMR) sebelum lulus, bekerja paruh waktu (part time) atau magang di perusahaan dalam kategori sebagaimana disebut pada angka 1) diatas. b. Kelanjutan Studi : 1) Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Akademik Mendapatkan surat penerimaan untuk melanjutkan proses pembelajaran di program studi S2/S2 terapan, S3/S3 Terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus.	Formula : $\frac{n}{t} \times 100$ $n =$ lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wira-swasta $t =$ total jumlah lulusan S1 dan D4/D3/D2	Referensi data menggunakan data <i>trucer study</i> PIC : 1. Koord. KPKTS*) 2. Penanggungjawab Bidang Kemahasiswaan & Kerjasama



Lanjutan

Indikator Kinerja Utama/ IKU		Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Sumber Data
		2) PTN Vokasi Mendapatkan surat penerimaan untuk melanjutkan proses pembelajaran di program studi S1/S1 terapan, S2/S2 terapan atau S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus. 3) PTN Seni Budaya Mendapatkan surat penerimaan untuk melanjutkan proses pembelajaran di program studi, S2/S2 terapan atau S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus. c. Kewirausahaan : 1) PTN Akademik dan PTN Vokasi a) Mulai bekerja dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan setelah lulus dan berpenghasilan lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali Upah Minimum Regional (UMR), sebagai : • Pendiri atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) perusahaan; atau • Pekerja lepas (<i>freelancer</i>), atau 2) PTN Seni Budaya a) Mulai bekerja dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan setelah lulus sebagai : • Pendiri atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) perusahaan (contoh : membuka sanggar); atau • Pekerja lepas (<i>freelancer</i>) yang menghasilkan karya seni dan budaya, atau b) Sudah berpenghasilan sebelum lulus, bekerja sebagai peran sebagaimana disebut pada huruf a) di atas.		

Indikator Kinerja Utama/ IKU		Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Sumber Data
IKU-2	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 SKS diluar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	Kriteria pengukuran: a. Pengalaman di luar kampus : Lulusan yang mendapatkan paling sedikit 20 (dua puluh) SKS dari kegiatan di luar kampus (dengan dosen pembimbing), sesuai dengan Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka. Kegiatan boleh dikombinasi dan dihitung kumulatif : 1) Magang atau praktek kerja : Kegiatan magang di sebuah perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan (<i>startup company</i>). Bagi program studi vokasi yang sudah memiliki program magang wajib, tidak dapat dihitung. 2) Proyek di desa Proyek social/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lain-lain. 3) Mengajar di sekolah Kegiatan mengajar di sekolah dasar dan menengah selama beberapa bulan. Sekolah dapat berlokasi di kota, desa, atau daerah terpencil 4) Pertukaran pelajar Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi, baik luar negeri maupun dalam negeri berdasarkan perjanjian kerja sama yang sudah diadakan antar perguruan tinggi atau pemerintah. 5) Penelitian atau riset Kegiatan riset akademik, baik sains maupun <i>social humaniora</i> yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti 6) Kegiatan wirausaha Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri, dibuktikan dengan penjelasan/proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai.	Formula : $\frac{n}{t} \times 100$ <i>n = jumlah mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang Menjalankan paling sedikit 20 (dua puluh) SKS di luar kampus atau berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional.</i> <i>t = total jumlah mahasiswa</i>	Referensi data merujuk pada implementasi kurikulum MB-KM di lingkup PNK PIC : 1. Penanggungjawa Bidang Akademik 2. Para Ketua Jurusan 3. Koordinator Akamawa



Lanjutan

Indikator Kinerja Utama/ IKU	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Sumber Data
	7) Studi atau proyek independen Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa social) yang pengerjaannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain. 8) Proyek kemanusiaan Kegiatan social/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program perguruan tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan, baik didalam maupun di luar negeri (seperti penanganan bencana alam, pemberdayaan masyarakat, penyelamatan lingkungan, palang merah, <i>peace corps</i>, dan seterusnya), yang disetujui perguruan tinggi. b. Kewirausahaan : Berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional		



Indikator Kinerja Utama/ IKU		Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Sumber Data
IKU-3	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industry, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir	Kriteria pengukuran: a. Syarat pelaporan ke Pimpinan Perguruan Tinggi 1) Kegiatan harus sepengetahuan institusi atau pimpinan perguruan tinggi, minimal dengan persetujuan tingkat Ketua Departemen atau Dekan; 2) Format kegiatan dapat berupa kebijakan cuti meninggalkan tugas akademik dan administrative dalam satu kurun waktu tertentu untuk kepentingan riset atau menulis karya akademik dengan tetap mendapatkan penghasilan dari institusi tempatnya bekerja (<i>sabbatical leave</i>) atau paruh waktu (<i>part time</i>); 3) Kegiatan harus disertai kontrak atau surat keputusan diantara perguruan tinggi asal dan organisasi luar kampus; dan 4) Dosen dapat diberikan keringanan beban kerja/jumlah sks yang harus dicapai selama sedang berkegiatan tridharma di luar kampus. b. Perguruan Tinggi 1) Perguruan tinggi, baik di dalam negeri maupun luar negeri yang setidaknya memiliki program studi yang terdaftar dalam QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject); atau 2) Perguruan tinggi di dalam negeri lainnya c. Kegiatan Daftar kegiatan dapat mengacu pada rubric kegiatan beban kerja dosen. Beberapa contoh kegiatan, antara lain : 1) Pendidikan : menjadi pengajar, pembimbing, penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program studi atau rencana kuliah, dan seterusnya. 2) Penelitian : memulai penelitian baru, membantu penelitian dosen di kampus lain, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, dan seterusnya. 3) Pengabdian kepada masyarakat : fasilitas pembelajaran pengabdian masyarakat, fasilitas kuliah kerja nyata, memberikan latihan kepada masyarakat, dan seterusnya.	Formula : $\frac{n}{(x + y)} \times 100$ <i>n</i> = jumlah dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, berkegiatan tridharma di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), atau bekerja sebagai praktisi di dunia industry dalam 5 tahun terakhir <i>x</i> = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) <i>y</i> = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK)	Referensi data menggunakan Renstra Penelitian dan Pengabdian serta MoU/MoA Tridharma PT PIC : 1. Penanggungjawa Bidang Akademik 2. Kepala Pusat P2M



Lanjutan

Indikator Kinerja Utama/ IKU		Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Sumber Data
		d. Pengalaman Praktisi 1) Untuk PTN Akademik dan PTN Vokasi Bekerja sebagai peneliti, konsultan, atau pegawai penuh waktu (<i>full time</i>) atau paruh waktu (<i>part time</i>) di : a) Perusahaan multinasional; b) Perusahaan swasta nasional; c) Perusahaan teknologi global; d) Perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi; e) Organisasi nirlaba kelas dunia; f) Lembaga pemerintah; atau g) BUMN / BUMD. 2) Untuk PTN Seni Budaya Sama dengan PTN Akademik dan PTN Vokasi dengan tambahan : a) Menjadi pendiri (<i>founder</i>) atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) perusahaan (contoh : membuka sanggar); b) Berkreasi independen atau menampilkan karya; atau c) Menjadi juri, kurator, dan/atau panitia acara seni budaya tingkat nasional. e. Prestasi Berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional		

Indikator Kinerja Utama/ IKU		Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Sumber Data
IKU-4	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3, memiliki serti-fikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industry dan dunia kerja; atau beraal dari kalangan praktisi profesional, dunia industry atau dunia kerja	Kriteria pengukuran: a. Kualifikasi Akademik S3 Kualifikasi akademik S3/S3 terapan dari perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri yang relevan dengan program studi. b. Lembaga kompetensi 1) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) nasional dengan lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) aktif; 2) Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 3) Lembaga atau asosiasi profesi atau sertifikasi internasional; 4) Sertifikasi dari perusahaan Fortune 500; atau 5) Sertifikasi dari perusahaan BUMN. c. Berpengalaman praktisi 1) Untuk PTN Akademik Berpengalaman kerja di : a) Perusahaan multinasional; b) Perusahaan swasta nasional; c) Perusahaan teknologi global; d) Perusahaan rintisan (startup company) teknologi; e) Organisasi nirlaba kelas dunia; f) Institusi/organisasi multilateral; g) Lembaga pemerintah; atau h) BUMN / BUMD. 2) Untuk PTN Vokasi Pengalaman kerja relevan dengan program studi selama lebih dari 5 (lima) tahun di : a) Perusahaan multinasional; b) Perusahaan swasta nasional; c) Perusahaan teknologi global; d) Perusahaan rintisan (startup company) teknologi; e) Organisasi nirlaba kelas dunia; f) Institusi/organisasi multilateral; g) Lembaga pemerintah; atau h) BUMN / BUMD;	Formula : $\frac{n}{(x + y)} \times 100$ <i>n = jumlah dosen yang berkualifikasi S3, memiliki sertifikasi kompetensi / profesi, atau berpengalaman kerja sebagai praktisi.</i> <i>x = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)</i> <i>y = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK)</i>	Referensi data menggunakan data PD-DIKTI, Dokumen LSP, Rekapitulasi Data Pembebanan Mata Kuliah, dll PIC : 1. Penanggungjawab Bidang Akademik 2. Koordinator Akademik 3. Kepala LSP – PNK 4. Para Ketua Jurusan 5. Subkor Kepegawaian



Lanjutan

Indikator Kinerja Utama/ IKU		Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Sumber Data				
		i) Perusahaan swasta sebagai pendiri (founder) atau pasangan pendiri (co-founder); atau j) Dunia industry sebagai pekerja lepas (freelancer) yang terbukti produktif. 3) Untuk PTN Seni Budaya Kriteria sama dengan PTN Akademik dengan tambahan : a) Berkreasi independen atau menampilkan karya; atau b) Menjadi juri, kurator, atau panitia acara seni budaya tingkat nasional.						
IKU-5	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen	Kriteria pengukuran: a. Karya tulis ilmiah, terdiri atas : 1) Jurnal ilmiah, buku akademik, dan bab (<i>chapter</i>) dalam buku akademik. <table> <tr> <th>Kriteria Rekognisi Internasional</th> <th>Kriteria Penerapan di Masyarakat</th> </tr> <tr> <td>Terindeks oleh lembaga global yang bereputasi (urutan penulis tidak dibedakan bobotnya, untuk memendo-rong kolaborasi internasional); Karya ilmiah / buah pemikiran dide-siminasikan di konferensi atau semi-nar internasional; atau Karya ilmiah / buah pemikiran dide-siminasikan dalam bentuk artikel ilmiah populer yang diterbitkan di media dengan pembaca interna-sional.</td> <td>Ide didalam jurnal, buku, atau bab (<i>chapter</i>) dipakai oleh pemerintah, perusa-haan, atau orga-nisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan; Penelitian dikutip lebih dari 10 (sepuluh) kali oleh peneliti lain; Hasil penelitian dipakai sebagai bahan mengajar oleh dosen lain; atau Buku berhasil diterbitkan deng-an skala distribusi tingkat nasio-nal.</td> </tr> </table>	Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di Masyarakat	Terindeks oleh lembaga global yang bereputasi (urutan penulis tidak dibedakan bobotnya, untuk memendo-rong kolaborasi internasional); Karya ilmiah / buah pemikiran dide-siminasikan di konferensi atau semi-nar internasional; atau Karya ilmiah / buah pemikiran dide-siminasikan dalam bentuk artikel ilmiah populer yang diterbitkan di media dengan pembaca interna-sional.	Ide didalam jurnal, buku, atau bab (<i>chapter</i>) dipakai oleh pemerintah, perusa-haan, atau orga-nisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan; Penelitian dikutip lebih dari 10 (sepuluh) kali oleh peneliti lain; Hasil penelitian dipakai sebagai bahan mengajar oleh dosen lain; atau Buku berhasil diterbitkan deng-an skala distribusi tingkat nasio-nal.	Formula : $\frac{n}{(x + y)}$ <i>n</i> = jumlah keluaran penelitian yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh industri / masyarakat /pemerintah. <i>x</i> = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) <i>y</i> = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK)	Referensi data mengguna-kan Laporan Kinerja P2M, Publikasi Internasional dan Jurnal Internasional Terindeks Scopus, MoA, dll PIC : 1. Penanggungjawa Bidang Akademik 2. Penanggungjawa Bidang Kemahasis-waan & Kerjasama 3. Kepala Pusat P2M
Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di Masyarakat							
Terindeks oleh lembaga global yang bereputasi (urutan penulis tidak dibedakan bobotnya, untuk memendo-rong kolaborasi internasional); Karya ilmiah / buah pemikiran dide-siminasikan di konferensi atau semi-nar internasional; atau Karya ilmiah / buah pemikiran dide-siminasikan dalam bentuk artikel ilmiah populer yang diterbitkan di media dengan pembaca interna-sional.	Ide didalam jurnal, buku, atau bab (<i>chapter</i>) dipakai oleh pemerintah, perusa-haan, atau orga-nisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan; Penelitian dikutip lebih dari 10 (sepuluh) kali oleh peneliti lain; Hasil penelitian dipakai sebagai bahan mengajar oleh dosen lain; atau Buku berhasil diterbitkan deng-an skala distribusi tingkat nasio-nal.							

Lanjutan

Indikator Kinerja Utama/ IKU		Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Sumber Data				
		2) Karya rujukan : buku saku (<i>handbook</i>), pedoman (<i>guidelines</i>), manual, buku teks (<i>textbook</i>), monografi, ensiklopedia, kamus.						
		<table><tr><th>Kriteria Rekognisi Internasional</th><th>Kriteria Penerapan di Masyarakat</th></tr><tr><td>Dipublikasikan oleh penerbit internasional; Dipakai di komunitas akademik atau profesional skala internasional; Disusun bersama penulis dengan latar belakang internasional; atau Terlibat dalam penyusunan buku saku (<i>handbook</i>) berisi pemikiran mutakhir dan orisinal dari sesama akademisi internasional yang mempunyai spesialisasi di bidangnya.</td><td>Buku saku (<i>handbook</i>), atau buku teks (<i>textbook</i>), monograf dipakai oleh pemerintah perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan.</td></tr></table>			Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di Masyarakat	Dipublikasikan oleh penerbit internasional; Dipakai di komunitas akademik atau profesional skala internasional; Disusun bersama penulis dengan latar belakang internasional; atau Terlibat dalam penyusunan buku saku (<i>handbook</i>) berisi pemikiran mutakhir dan orisinal dari sesama akademisi internasional yang mempunyai spesialisasi di bidangnya.	Buku saku (<i>handbook</i>), atau buku teks (<i>textbook</i>), monograf dipakai oleh pemerintah perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan.
		Kriteria Rekognisi Internasional			Kriteria Penerapan di Masyarakat			
		Dipublikasikan oleh penerbit internasional; Dipakai di komunitas akademik atau profesional skala internasional; Disusun bersama penulis dengan latar belakang internasional; atau Terlibat dalam penyusunan buku saku (<i>handbook</i>) berisi pemikiran mutakhir dan orisinal dari sesama akademisi internasional yang mempunyai spesialisasi di bidangnya.			Buku saku (<i>handbook</i>), atau buku teks (<i>textbook</i>), monograf dipakai oleh pemerintah perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan.			
3) Studi kasus								
<table><tr><th>Kriteria Rekognisi Internasional</th><th>Kriteria Penerapan di Masyarakat</th></tr><tr><td>Studi kasus digunakan sebagai bagian pembelajaran atau penelitian di perguruan tinggi luar negeri.</td><td>Studi kasus digunakan sebagai bahan pembelajaran pemecahan studi kasus (<i>case method</i>) dalam mata kuliah perguruan tinggi nasional.</td></tr></table>		Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di Masyarakat	Studi kasus digunakan sebagai bagian pembelajaran atau penelitian di perguruan tinggi luar negeri.	Studi kasus digunakan sebagai bahan pembelajaran pemecahan studi kasus (<i>case method</i>) dalam mata kuliah perguruan tinggi nasional.			
Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di Masyarakat							
Studi kasus digunakan sebagai bagian pembelajaran atau penelitian di perguruan tinggi luar negeri.	Studi kasus digunakan sebagai bahan pembelajaran pemecahan studi kasus (<i>case method</i>) dalam mata kuliah perguruan tinggi nasional.							

Lanjutan

Indikator Kinerja Utama/ IKU		Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Sumber Data				
		4) Laporan penelitian untuk mitra						
		<table><tr><th>Kriteria Rekognisi Internasional</th><th>Kriteria Penerapan di Masyarakat</th></tr><tr><td>Memenuhi semua kriteria kesuk-sesan penerapan di masyarakat, pada skala multilateral atau internasional.</td><td>Penelitian diterapkan atau diker-jakan untuk lembaga pemerin-tah, perusahaan swasta, BUMN / BUMD, organisasi nirlaba, atau organisasi multilateral.</td></tr></table>			Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di Masyarakat	Memenuhi semua kriteria kesuk-sesan penerapan di masyarakat, pada skala multilateral atau internasional.	Penelitian diterapkan atau diker-jakan untuk lembaga pemerin-tah, perusahaan swasta, BUMN / BUMD, organisasi nirlaba, atau organisasi multilateral.
		Kriteria Rekognisi Internasional			Kriteria Penerapan di Masyarakat			
		Memenuhi semua kriteria kesuk-sesan penerapan di masyarakat, pada skala multilateral atau internasional.			Penelitian diterapkan atau diker-jakan untuk lembaga pemerin-tah, perusahaan swasta, BUMN / BUMD, organisasi nirlaba, atau organisasi multilateral.			
		b. Karya terapan, terdiri atas :						
1) Produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototype).								
<table><tr><th>Kriteria Rekognisi Internasional</th><th>Kriteria Penerapan di Masyarakat</th></tr><tr><td>Mendapat penghargaan internasional; Dipakai oleh perusahaan atau organisasi pemerintah / nonpemerintah berskala internasional; atau Terdapat kemitraan antara inventor dan perusahaan atau organisasi pemerintah / nonpemerintah berskala internasional.</td><td>Memperoleh paten nasional; Pengakuan asosiasi; Dipakai oleh industri / perusahaan atau lembaga pemerintah / nonpemerintah; atau Terdapat kemitraan antara inventor dan perusahaan atau organisasi pemerintah / nonpemerintah berskala nasional.</td></tr></table>	Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di Masyarakat	Mendapat penghargaan internasional; Dipakai oleh perusahaan atau organisasi pemerintah / nonpemerintah berskala internasional; atau Terdapat kemitraan antara inventor dan perusahaan atau organisasi pemerintah / nonpemerintah berskala internasional.	Memperoleh paten nasional; Pengakuan asosiasi; Dipakai oleh industri / perusahaan atau lembaga pemerintah / nonpemerintah; atau Terdapat kemitraan antara inventor dan perusahaan atau organisasi pemerintah / nonpemerintah berskala nasional.				
Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di Masyarakat							
Mendapat penghargaan internasional; Dipakai oleh perusahaan atau organisasi pemerintah / nonpemerintah berskala internasional; atau Terdapat kemitraan antara inventor dan perusahaan atau organisasi pemerintah / nonpemerintah berskala internasional.	Memperoleh paten nasional; Pengakuan asosiasi; Dipakai oleh industri / perusahaan atau lembaga pemerintah / nonpemerintah; atau Terdapat kemitraan antara inventor dan perusahaan atau organisasi pemerintah / nonpemerintah berskala nasional.							

Lanjutan

Indikator Kinerja Utama/ IKU		Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Sumber Data				
		2) Pengembangan invensi dengan mitra						
		<table><tr><th>Kriteria Rekognisi Internasional</th><th>Kriteria Penerapan di Masyarakat</th></tr><tr><td>Karya dikembangkan bersama dengan mitra internasional atau multinasional.</td><td>Karya didanai oleh, dikembangkan bersama dengan, atau digunakan oleh industri di dalam negeri.</td></tr></table>			Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di Masyarakat	Karya dikembangkan bersama dengan mitra internasional atau multinasional.	Karya didanai oleh, dikembangkan bersama dengan, atau digunakan oleh industri di dalam negeri.
		Kriteria Rekognisi Internasional			Kriteria Penerapan di Masyarakat			
		Karya dikembangkan bersama dengan mitra internasional atau multinasional.			Karya didanai oleh, dikembangkan bersama dengan, atau digunakan oleh industri di dalam negeri.			
		c. Karya seni, terdiri atas :						
1) Visual, audio, audio-visual, pertunjukan (<i>performance</i>)								
<table><tr><th>Kriteria Rekognisi Internasional</th><th>Kriteria Penerapan di Masyarakat</th></tr><tr><td>Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan : - Dapat <i>sponsorship</i> / pendanaan dari organisasi non pemerintah internasional; - Tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil; - Ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (misalnya panel juri, dan tema, dan lain-lain); atau - Mendapat penghargaan berskala internasional. </td><td>Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan : - Dapat <i>sponsorship</i> / pendanaan dari organisasi nonpemerintah; - Dipublikasikan dalam pameran, atau pertunjukan resmi nasional; - Lolos kurasi pihak ketiga; - Metode berkarya (<i>art methods</i>) digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti <i>art therapy</i> untuk situasi kebencanaan, penerapan desain yang inklusif untuk disabilitas, dan lain-lain; atau - Diakuisisi atau dibiayai oleh industri atau pemerintah. </td></tr></table>	Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di Masyarakat	Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan : - Dapat <i>sponsorship</i> / pendanaan dari organisasi non pemerintah internasional; - Tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil; - Ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (misalnya panel juri, dan tema, dan lain-lain); atau - Mendapat penghargaan berskala internasional.	Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan : - Dapat <i>sponsorship</i> / pendanaan dari organisasi nonpemerintah; - Dipublikasikan dalam pameran, atau pertunjukan resmi nasional; - Lolos kurasi pihak ketiga; - Metode berkarya (<i>art methods</i>) digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti <i>art therapy</i> untuk situasi kebencanaan, penerapan desain yang inklusif untuk disabilitas, dan lain-lain; atau - Diakuisisi atau dibiayai oleh industri atau pemerintah.				
Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di Masyarakat							
Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan : - Dapat <i>sponsorship</i> / pendanaan dari organisasi non pemerintah internasional; - Tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil; - Ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (misalnya panel juri, dan tema, dan lain-lain); atau - Mendapat penghargaan berskala internasional.	Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan : - Dapat <i>sponsorship</i> / pendanaan dari organisasi nonpemerintah; - Dipublikasikan dalam pameran, atau pertunjukan resmi nasional; - Lolos kurasi pihak ketiga; - Metode berkarya (<i>art methods</i>) digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti <i>art therapy</i> untuk situasi kebencanaan, penerapan desain yang inklusif untuk disabilitas, dan lain-lain; atau - Diakuisisi atau dibiayai oleh industri atau pemerintah.							



Lanjutan

Indikator Kinerja Utama/ IKU		Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Sumber Data
		2) Desain konsep, desain produk, desain komunikasi visual, desain arsitektur, desain kriya		
		Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di Masyarakat	
		Karya tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademi-komersil; Karya ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional; atau Karya mendapat penghargaan berskala internasional.	- Koleksi karya asli; - Dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi di daerah maupun nasional; - Lolos kurasi pihak ketiga; - Metode berkarya (<i>art methods</i>) digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti <i>art therapy</i> untuk situasi bencana, penerapan desain yang inklusif untuk disabilitas, dan lain-lain; atau - Karya diakuisisi atau dibiayai oleh industri atau pemerintah.	



Lanjutan

Indikator Kinerja Utama/ IKU		Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Sumber Data	
		3) Karya preservasi, contoh : modernisasi seni tari daerah			
		<table><tr><th>Kriteria Rekognisi Internasional</th><th>Kriteria Penerapan di Masyarakat</th></tr><tr><td> • Dapat sponsorship / pendanaan dari organisasi non pemerintah internasional; • Karya tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik aka-demik maupun komersil; • Karya ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan ber-skala internasional dengan pro-ses seleksi yang ketat (misalnya panel juri, tema, dan lain-lain); atau • Karya mendapat penghargaan berskala internasional. </td><td> • Dapat sponsorship / pendanaan dari organisasi nonpemerintah; • Dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional; • Lolos kurasi pihak ketiga; atau • Karya diakuisisi atau dibiayai oleh sektor privat atau industri atau pemerintah. </td></tr></table>	Kriteria Rekognisi Internasional		Kriteria Penerapan di Masyarakat
Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di Masyarakat				
• Dapat sponsorship / pendanaan dari organisasi non pemerintah internasional; • Karya tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik aka-demik maupun komersil; • Karya ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan ber-skala internasional dengan pro-ses seleksi yang ketat (misalnya panel juri, tema, dan lain-lain); atau • Karya mendapat penghargaan berskala internasional.	• Dapat sponsorship / pendanaan dari organisasi nonpemerintah; • Dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional; • Lolos kurasi pihak ketiga; atau • Karya diakuisisi atau dibiayai oleh sektor privat atau industri atau pemerintah.				



Lanjutan

Indikator Kinerja Utama/ IKU		Definisi Operasional		Metode Perhitungan	Sumber Data
		4) Karya tulis novel, sajak, puisi, notasi musik			
		Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di Masyarakat		
		• Karya mendapat penghar-gaan (<i>award, shortlisting, prizes</i>) berskala internasi-onal; • Karya ditampilkan di festival atau acara pertunjukan berskala nasio-nal; atau • Karya ditinjau / direviu secara sub-stansial oleh kalangan akademisi / praktisi internasional.	• Karya asli; • Karya dipublikasikan / didisku-sikan di festival atau acara pertunjukan berskala nasional; • Karya diterbitkan, baik oleh penerbit akademik maupun penerbit komersial yang bere-putasi; atau • Karya dibiayai oleh industri atau pemerintah.		

Indikator Kinerja Utama/ IKU		Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Sumber Data
IKU-6	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerjasama dengan mitra	Kriteria pengukuran: a. Kemitraan Perjanjian kerjasama yang setidaknya menyatakan komitmen mitra dalam penyerapan lulusan. dapat diperkuat dengan bentuk kerjasama lainnya seperti : 1) Untuk PTN Akademik : a) Pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (output) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); dan b) Menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh. Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian. 2) Untuk PTN Vokasi : a) Pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (output) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); b) Menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh; c) Menyediakan kesempatan kerja; dan d) Mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi. Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian dan/atau memberikan pelatihan bagi dosen dan instruktur. 3) Untuk PTN Seni Budaya a) Pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (output) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); dan b) Menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh. Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian.	Formula : $\frac{n}{(x + y)} \times 100$ <i>n = jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerjasama dengan mitra.</i> <i>x = jumlah program studi S1</i> <i>y = jumlah program studi D4/D3 /D2</i>	Referensi data menggunakan Mou dan MoA, Surat Tugas PIC : 1. Penanggungjawa Bidang Kemahasiswaan & Kerjasama 2. Koordinator Kerjasama



Lanjutan

Indikator Kinerja Utama/ IKU		Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Sumber Data
		b. Mitra 1) Perusahaan multinasional; 2) Perusahaan nasional berstandar tinggi; 3) Perusahaan teknologi global; 4) Perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi; 5) Organisasi nirlaba kelas dunia; 6) Institusi / organisasi multilateral; 7) Perusahaan tinggi yang masuk dalam daftar QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject); 8) Perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan (untuk PTN Vokasi dan PTN Seni Budaya); 9) Instansi pemerintah, BUMN, dan/atau BUMD; 10) Rumah sakit; 11) UMKM; atau 12) Lembaga riset pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional.		



Indikator Kinerja Utama/ IKU		Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Sumber Data
IKU-7	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah	Kriteria pengukuran: a. Lembaga akreditasi yang sudah diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam persetujuan internasional (sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional; atau b. Lembaga akreditasi internasional lainnya : 1) British Accreditation Council (BAC); 2) The Southern Association of College and Schools Commission on Colleges (SACSCOC); 3) The Quality Assurance Agency (QAA); 4) The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB International); 5) Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET); 6) Accreditation Council for Pharmacy Education (ACPE); 7) Hong Kong Council for Accreditation of Academic & Vocational Qualifications (HKCAAVQ); 8) Higher Education Evaluation and Accreditation Council of Taiwan (HEEACT); 9) Tertiary Education Quality and Standards Agency (TEQSA); 10) The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB); 11) The Association of MBAs (AMBA); 12) EFMD Quality Improvement System (EQUIS); 13) Internasional Accreditation Council for Business Education (IACBE); 14) Association of Asia-Pacific Business Schools (AAPBS); 15) Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP); 16) Royal Society of Chemistry (RSC); 17) The Rehabilitation Council of India (RCI); atau 18) Council for the Accreditation of Educator Preparation (CAEP). Khusus untuk PTN Vokasi dan PTN Seni Budaya: akreditasi atau sertifikasi institusi yang diberikan lembaga yang direkognisi dan bereputasi secara internasional	Formula : $\frac{n}{(x + y)} \times 100$ <i>n = jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.</i> <i>x = jumlah program studi S1</i> <i>y = jumlah program studi D4/D3/D2</i>	Referensi menggunakan data Borang Akreditasi Internasional dan Sertifikat Akreditasi PIC : 1. Penanggungjawab Bidang Akademik 2. Kepala Pusat Penjaminan Mutu 3. Koordinator P3AI

Indikator Kinerja Utama/ IKU		Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Sumber Data
IKU-8	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team based project</i>) sebagian bobot evaluasi	Kriteria pengukuran: a. Metode pembelajaran di dalam kelas harus menggunakan salah satu kombinasi dari metode pembelajaran pemecah kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>) 1) Pemecah kasus (<i>case method</i>) : - Mahasiswa berperan sebagai “protagonist” yang berusaha untuk memecahkan sebuah kasus; - Mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk membangun rekomendasi solusi, dibantu dengan diskusi kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi; dan - Kelas berdiskusi secara aktif, dengan mayoritas dari percakapan dilakukan oleh mahasiswa, sedangkan dosen hanya memfasilitasi dengan cara mengarahkan diskusi, memberikan pertanyaan, dan observasi. 2) Pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>) : - Kelas dibagi menjadi kelompok lebih dari 1 (satu) mahasiswa untuk mengerjakan tugas bersama selama jangka waktu yang ditentukan; - Kelompok diberikan masalah nyata yang terjadi di masyarakat atau pertanyaan kompleks, lalu diberikan ruang untuk membuat rencana kerja atau model kolaborasi; - Setiap kelompok mempersiapkan presentasi/karya akhir yang ditampilkan di depan dosen, kelas, atau audiens lainnya yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif; dan - Dosen membina setiap kelompok selama periode pekerjaan proyek dan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam kolaborasi. b. Evaluasi : 50% (lima puluh persen) dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas (<i>case method</i>) dan/atau presentasi akhir pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>)	Formula : $\frac{n}{t} \times 100$ <i>n = jumlah mata kuliah yang menggunakan case method atau team-based project sebagai bagian dari bobot evaluasi.</i> <i>t = total jumlah mata kuliah</i>	Referensi menggunakan Data / Laporan SPASIKITA Dokumen Kurikulum Prodi PIC : - Penanggungjawab Bidang Akademik - Para Ketua Jurusan



Indikator Kinerja Utama/ IKU		Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Sumber Data																								
IKU-9	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	Kriteria pengukuran: A. Perencanaan Kinerja (30%) B. Pengukuran Kinerja (30%) C. Pelaporan Kinerja (15%) D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (25%) Kategori Peringkat SAKIP <table><thead><tr><th>Kategori</th><th>Skor</th><th>Interpretasi</th></tr></thead><tbody><tr><td>AA</td><td>> 90 - 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>> 80 - 90</td><td>Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel</td></tr><tr><td>BB</td><td>> 70 - 80</td><td>Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal</td></tr><tr><td>B</td><td>> 60 - 70</td><td>Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan</td></tr><tr><td>CC</td><td>> 50 - 60</td><td>Cukup (memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar</td></tr><tr><td>C</td><td>> 30 - 50</td><td>Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar</td></tr><tr><td>D</td><td>0 - 30</td><td>Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar</td></tr></tbody></table>	Kategori	Skor	Interpretasi	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan	A	> 80 - 90	Memuaskan , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel	BB	> 70 - 80	Sangat Baik , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal	B	> 60 - 70	Baik , Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan	CC	> 50 - 60	Cukup (memadai) , Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar	C	> 30 - 50	Kurang , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar	D	0 - 30	Sangat Kurang , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar		Referensi data kinerja satker yang termonitoring melalui SPASIKITA, SAKTI, E-PLANING, SIMKEU, dll PIC : 1. Wadir II 2. Subkor Anggaran 3. SPI
Kategori	Skor	Interpretasi																										
AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan																										
A	> 80 - 90	Memuaskan , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel																										
BB	> 70 - 80	Sangat Baik , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal																										
B	> 60 - 70	Baik , Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan																										
CC	> 50 - 60	Cukup (memadai) , Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar																										
C	> 30 - 50	Kurang , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar																										
D	0 - 30	Sangat Kurang , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar																										



Indikator Kinerja Utama/ IKU		Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Sumber Data								
IKU-10	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-KL Satker minimal 98	<u>Kriteria pengukuran:</u> A. Nilai Indikator Kinertja Pelaksanaan Anggaran : 1. Kualitas Perencanaan Anggaran (20%) : a. Revisi DIPA (10%) b. Deviasi Halaman III DIPA (10%) 2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran (55%) : a. Penyerapan Anggaran (20%) b. Belanja Kontrak (10%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Pengelolaan UP dan TUP (10%) e. Dispensasi SPM (5%) 3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%) : a. Capaian Output (25%) B. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran : a. Hasil akhir penyerapan anggaran b. Konsistensi Halaman III DIPA c. Capaian Output d. Efisiensi <u>Kriteria Nilai:</u> <table><tr><td>Nilai IKPA≥ 95</td><td>=> Sangat Baik</td></tr><tr><td>89 ≤ nilai IKPA < 95</td><td>=> Baik</td></tr><tr><td>70 ≤ nilai IKPA < 89</td><td>=> Cukup</td></tr><tr><td>Nilai IKPA < 70</td><td>=> Kurang</td></tr></table>	Nilai IKPA≥ 95	=> Sangat Baik	89 ≤ nilai IKPA < 95	=> Baik	70 ≤ nilai IKPA < 89	=> Cukup	Nilai IKPA < 70	=> Kurang	Formula : NKA= IKPA + EKA NKA = Nilai Kinerja Anggara IKPA = Indikator Kinerja Pelaksana- naan Anggaran EKA = Evaluasi Kinerja Angga- ran	Referensi data mengguna- kan progres capaian / Lapo- ran SPASIKITA, dll PIC : 1. Wadir II 2. PPK 01 dan PPK 02 3. Subkor Anggaran
Nilai IKPA≥ 95	=> Sangat Baik											
89 ≤ nilai IKPA < 95	=> Baik											
70 ≤ nilai IKPA < 89	=> Cukup											
Nilai IKPA < 70	=> Kurang											



Direktur,
Politeknik Negeri Kupang

Frans Mangngi, ST., M.Eng
NIP. 196803011994031001



Lampiran IV
Keputusan Direktur Politeknik Negeri Kupang
Nomor : 324a Tahun 2022
Tentang Renstra Politeknik Negeri Kupang
Periode 2020 – 2024 Reviu Tahun 2022

MATRIK KERANGKA REGULASI

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Strata Kebijakan	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
1	Peraturan Direktur Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penggunaan Identitas Politeknik Negeri Kupang 2020-2024	Melaksanakan dan mensinergikan amanat arah kebijakan Permendiknas No. 44 Tahun 2008 Tentang Statuta Politeknik Negeri Kupang dan peraturan terkait Penggunaan Identitas	Dokumen Tatacara Penggunaan Identitas PNK	Bidang Adm. Umum dan Keuangan	- Pudir II - Bagian Adum dan Keuangan - Subbag Adum dan Tata Usaha	2020
2	Peraturan Direktur Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Negeri Kupang	Melaksanakan dan mensinergikan amanat arah kebijakan Permendiknas No. 44 Tahun 2008 Tentang Statuta Politeknik Negeri Kupang dan peraturan terkait Penyelenggaraan Akademi	Dokumen Penyelenggaraan Akademik	Bidang Akamawa, Kemahasiswaan	- Pudir I - Pudir III - Bagian Akamawa dan PSI - Subbag Perencanaan	2020
3	Peraturan Direktur Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Kurikulum Politeknik Negeri Kupang	Melaksanakan dan mensinergikan amanat arah kebijakan Permendiknas No. 44 Tahun 2008 Tentang Statuta Politeknik Negeri Kupang dan peraturan terkait Kurikulum	Dokumen Kurikulum	Bidang Akamawa,	- Pudir I - Bagian Akamawa dan PSI - Subbag Perencanaan	2020
4	Peraturan Direktur Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Wisuda Politeknik Negeri Kupang	Melaksanakan dan mensinergikan amanat arah kebijakan Permendiknas No. 44 Tahun 2008 Tentang Statuta Politeknik Negeri Kupang dan peraturan terkait Wisuda	Dokumen Tata Cara Wisuda	Bidang Akamawa,	- Pudir I - Bagian Akamawa dan PSI - Subbag Perencanaan	2020
5	Peraturan Direktur Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Negeri Kupang	Melaksanakan dan mensinergikan amanat arah kebijakan Permendiknas No. 44 Tahun 2008 Tentang Statuta Politeknik Negeri Kupang dan peraturan terkait Penerimaan Mahasiswa Baru	Dokumen Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru	Bidang Akamawa,	- Pudir I - Bagian Akamawa dan PSI - Subbag Perencanaan	2020
6	Peraturan Direktur Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Negeri Kupang	Melaksanakan dan mensinergikan amanat arah kebijakan Permendiknas No. 44 Tahun 2008 Tentang Statuta Politeknik Negeri Kupang dan peraturan terkait Pelaksanaan P2M	Dokumen Penyelenggaraan P2M	Bidang Akamawa, Kerjasama	- Pudir I - Pudir IV - Bagian Akamawa dan PSI - Subbag Perencanaan	2020



No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Strata Kebijakan	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
7	Peraturan Direktur Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Kode Etik dan Etika Akademik Politeknik Negeri Kupang	Melaksanakan dan mensinergikan amanat arah kebijakan Permendiknas No. 44 Tahun 2008 Tentang Statuta Politeknik Negeri Kupang dan peraturan terkait Kode Etik dan Etika Akademik	Dokumen Kode Etik dan Etika Akademik	Bidang Akamawa, Keuangan	- Pudir I - Pudir II - Bagian Akamawa dan PSI - Bagian Adum dan Keuangan - Subbag Perencanaan	2020
8	Peraturan Direktur Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan Politeknik Negeri Kupang	Melaksanakan dan mensinergikan amanat arah kebijakan Permendiknas No. 44 Tahun 2008 Tentang Statuta Politeknik Negeri Kupang dan peraturan terkait Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan	Dokumen Kode Etik dan Etika Akademik	Bidang Akamawa	- Pudir I - Bagian Akamawa dan PSI - Subbag Perencanaan	2020
9	Peraturan Direktur Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Gelar dan Penghargaan Politeknik Negeri Kupang	Melaksanakan dan mensinergikan amanat arah kebijakan Permendiknas No. 44 Tahun 2008 Tentang Statuta Politeknik Negeri Kupang dan peraturan terkait Gelar dan Penghargaan	Dokumen Kode Etik dan Etika Akademik	Bidang Akamawa,	- Pudir I - Bagian Akamawa dan PSI - Subbag Perencanaan	2020
10	Peraturan Direktur Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Rencana Pengembangan Jangka Panjang, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Politeknik Negeri Kupang	Turunan Peraturan Organisasi Tata Kelola Nomor 28 Tahun 2020 terkait Pedoman Rencana Pengembangan PNK termasuk Renstra dan RKT	Dokumen OTK PNK Baru	Bidang Akamawa	- Pudir I - Bagian Akamawa dan PSI - Subbag Perencanaan	2020
11	Peraturan Direktur Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Satuan Pengawas Internal Politeknik Negeri Kupang	Melaksanakan dan mensinergikan amanat arah kebijakan Permendiknas No. 44 Tahun 2008 Tentang Statuta Politeknik Negeri Kupang dan peraturan terkait Tatacara pengangkatan SPI	Dokumen Persyaratan dan Tatacara Pengangkatan SPI	Bidang Adm. Umum dan Keuangan	- Pudir II - Bagian Adum dan Keuangan - Subbag Adum dan Tata Usaha	2020
12	Peraturan Direktur Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Penyantun Politeknik Negeri Kupang	Melaksanakan dan mensinergikan amanat arah kebijakan Permendiknas No. 44 Tahun 2008 Tentang Statuta Politeknik Negeri Kupang dan peraturan terkait Tatacara Pemilihan Dewan Penyantun	Dokumen Persyaratan dan Tatacara Pemilihan Dewan Penyantun	Bidang Adm. Umum dan Keuangan	- Pudir II - Bagian Adum dan Keuangan - Subbag Adum dan Tata Usaha	2020
13	Peraturan Direktur Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Direktur Politeknik Negeri Kupang	Melaksanakan dan mensinergikan amanat arah kebijakan Permendiknas No. 44 Tahun 2008 Tentang Statuta Politeknik Negeri Kupang dan peraturan terkait Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Direktur	Dokumen Persyaratan dan Tatacara Pemilihan Wakil Direktur	Bidang Adm. Umum dan Keuangan	- Pudir II - Bagian Adum dan Keuangan - Subbag Adum dan Tata Usaha - Subbag Kepegawaian	2020



No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Strata Kebijakan	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
14	Peraturan Direktur Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Politeknik Negeri Kupang	Melaksanakan dan mensinergikan amanat arah kebijakan Permendiknas No. 44 Tahun 2008 Tentang Statuta Politeknik Negeri Kupang dan peraturan terkait Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Kujur dan Sekjur	Dokumen Persyaratan dan Tatacara Pemilihan Kujur dan Sekjur	Bidang Adm. Umum dan Keuangan	- Pudir II - Bagian Adum dan Keuangan - Subbag Adum dan Tata Usaha - Subbag Kepegawaian	2020
15	Peraturan Direktur Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Pusat Politeknik Negeri Kupang	Melaksanakan dan mensinergikan amanat arah kebijakan Permendiknas No. 44 Tahun 2008 Tentang Statuta Politeknik Negeri Kupang dan peraturan terkait Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Pusat	Dokumen Persyaratan dan Tatacara Pemilihan Kepala Pusat	Bidang Adm. Umum dan Keuangan	- Pudir II - Bagian Adum dan Keuangan - Subbag Adum dan Tata Usaha - Subbag Kepegawaian	2020
16	Peraturan Direktur Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala UPT Politeknik Negeri Kupang	Melaksanakan dan mensinergikan amanat arah kebijakan Permendiknas No. 44 Tahun 2008 Tentang Statuta Politeknik Negeri Kupang dan peraturan terkait Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala UPT	Dokumen Persyaratan dan Tatacara Pemilihan Kepala UPT	Bidang Umum & Bidang Akamawa	- Pudir I - Pudir II - Bagian Akamawa - Bagian Adum dan Keuangan - Subbag Adum dan Tata Usaha	2020
17	Peraturan Direktur Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Sistem Pengendalian dan Pengawas Internal Politeknik Negeri Kupang	Melaksanakan dan mensinergikan amanat arah kebijakan Permendiknas No. 44 Tahun 2008 Tentang Statuta Politeknik Negeri Kupang dan peraturan terkait Sistem Pengendalian dan Pengawas Internal	Dokumen Sistem Pengendalian dan Pengawas Internal	Bidang Akamawa	- Pudir I - Bagian Akamawa, - Bagian Adum dan Keuangan - Jurusan, - Unit/UPT Terkait	2020
18	Peraturan Direktur Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Program Studi dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio Politeknik Negeri Kupang	Melaksanakan dan mensinergikan amanat arah kebijakan Permendiknas No. 44 Tahun 2008 Tentang Statuta Politeknik Negeri Kupang dan peraturan terkait Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Kaprodi dan Kaleb	Dokumen Persyaratan dan Tatacara Pemilihan Kaprodi dan Kaleb	Bidang Umum & Bidang Akamawa	- Pudir I - Bagian Akamawa - Subbag Perencanaan	2020
19	Peraturan Direktur Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Kemahasiswaan Politeknik Negeri Kupang	Melaksanakan dan mensinergikan amanat arah kebijakan Permendiknas No. 44 Tahun 2008 Tentang Statuta Politeknik Negeri Kupang dan peraturan terkait Kemahasiswaan	Dokumen Pedoman Kemahasiswaan	Bidang Akamawa,	- Pudir I - Bagian Akamawa - Subbag Perencanaan	2020
20	Peraturan Direktur Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Sarana Prasarana Politeknik Negeri Kupang	Melaksanakan dan mensinergikan amanat arah kebijakan Permendiknas No. 44 Tahun 2008 Tentang Statuta Politeknik Negeri Kupang dan peraturan terkait Penggunaan Sarana Prasarana	Dokumen Penggunaan Sarana Prasarana	Bidang Adm. Umum dan Keuangan	- Pudir II - Bagian Adum dan Keuangan - Subbag Adum dan Tata Usaha - Subbag Perencanaan	2020



No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Strata Kebijakan	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
21	Peraturan Direktur Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Kerjasama Politeknik Negeri Kupang	Melaksanakan dan mensinergikan amanat arah kebijakan Permendiknas No. 44 Tahun 2008 Tentang Statuta Politeknik Negeri Kupang dan peraturan terkait Kerjasama	Dokumen Kerjasama	Bidang Kerjasama	- Pudir IV - Bagian Adum dan Keuangan - Subbag Adum, Tata Usaha - Subbag Perencanaan	2020
22	Peraturan Direktur Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Negeri Kupang	Melaksanakan dan mensinergikan amanat arah kebijakan Permendiknas No. 44 Tahun 2008 Tentang Statuta Politeknik Negeri Kupang dan peraturan terkait SPMI	Dokumen SPMI	Bidang Akamawa,	- Pudir I - Bagian Akamawa - Subbag Perencanaan	2020
23	Keputusan Direktur Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Politeknik Negeri Kupang 2020-2024	Pedoman Pelaksanaan Rencana Strategis Lembaga	Penetapan Renstra PNK 2020-2024	Bidang Akamawa,	- Pudir I - Bagian Akamawa - Subbag Perencanaan	2020



Direktur,
Politeknik Negeri Kupang

Frans Mangngi, ST., M.Eng
NIP. 19803011994031001



POLITEKNIK NEGERI KUPANG